

PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

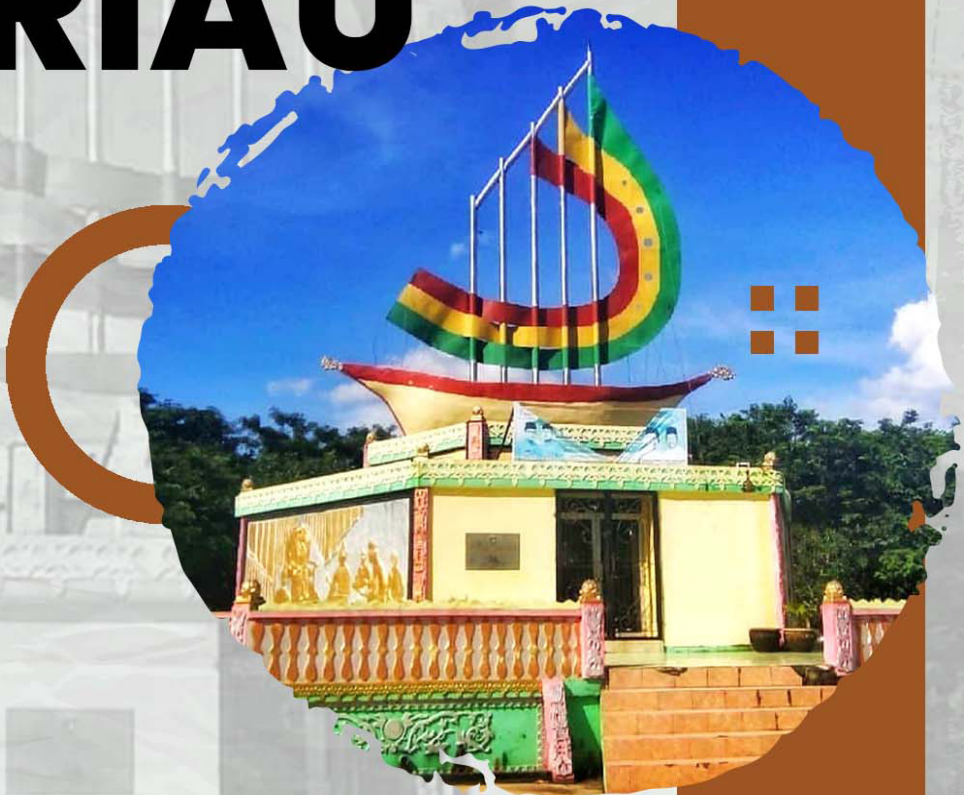
PROVINSI RIAIAU





PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI RIAUAU





Peta Pembinaan Provinsi Riau

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Herdina Kuswari, S.Stat
2. Drs. Awan Yanuarko, M.Si

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BENGKALIS	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	13
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN INDRAGILIR HULU	24
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	25
Aspek Satuan Inovasi Daerah	26
D. KABUPATEN KAMPAR	32
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	33
Aspek Satuan Inovasi Daerah	34
E. KABUPATEN KEP. MERANTI	40
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	40
Aspek Satuan Inovasi Daerah	41
F. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	47
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	48
Aspek Satuan Inovasi Daerah	49
G. KABUPATEN PELALAWAN	60
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	60
Aspek Satuan Inovasi Daerah	61
H. KABUPATEN ROKAN HILIR	67
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	68
Aspek Satuan Inovasi Daerah	69
I. KABUPATEN ROKAN HULU	74
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	75
Aspek Satuan Inovasi Daerah	76
J. KABUPATEN SIAK	82
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	82
Aspek Satuan Inovasi Daerah	83

K. KOTA DUMAI	89
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	90
Aspek Satuan Inovasi Daerah	91
L. KOTA PEKANBARU	97
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	97
Aspek Satuan Inovasi Daerah	98
BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI	107

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Bengkulu
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bengkulu
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bengkulu
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Indragiri Hilir
- Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Indragiri Hilir

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Indragiri Hilir

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Indragiri Hulu

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Indragiri Hulu

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Indragiri Hulu

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Indragiri Hulu

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kampar

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Kampar

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Kampar

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Kampar

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Kampar

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kampar

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Kampar

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Kampar

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Kampar

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kampar

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kampar

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kep. Meranti

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Kep. Meranti

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kep. Meranti

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kep. Meranti

Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kuantan Singingi

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Kuantan Singingi

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kuantan Singingi

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kuantan Singingi

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Pelalawan

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Pelalawan

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Pelalawan

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Pelalawan

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Pelalawan

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Pelalawan

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Pelalawan

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Pelalawan

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Pelalawan

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Pelalawan

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Pelalawan

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Rokan Hilir

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Rokan Hilir

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hilir

Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hilir

Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Rokan Hulu

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Rokan Hulu

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hulu

Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hulu

Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Siak

Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Siak

Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Siak

Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Siak

Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Siak

Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Siak

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Siak

Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Siak

Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Siak

Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Siak

Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Siak

Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Dumai

Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Dumai

Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Dumai

Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Dumai

Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Dumai

Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Dumai

Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Dumai

Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Dumai

Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Dumai

Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai

Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai

Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Pekanbaru

Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pekanbaru

Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Pekanbaru

Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Pekanbaru

Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Pekanbaru

Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Pekanbaru

Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Pekanbaru

Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Pekanbaru

Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Pekanbaru

Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Bengkalis beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Indragiri Hilir beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Indragiri Hulu beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Kampar beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Kep. Meranti beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kab. Kuantan Singingi beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Pelalawan beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hilir beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu beserta Skor Kematangannya

Tabel 11 Daftar Inovasi Kabupaten Siak beserta Skor Kematangannya

Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Dumai beserta Skor Kematangannya

Tabel 13 Daftar Inovasi Kota Pekanbaru beserta Skor Kematangannya



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Riau. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten

Kampar, Kabupaten Kep. Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Riau yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
Roadmap SiDA		
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis	Pedoman Teknis

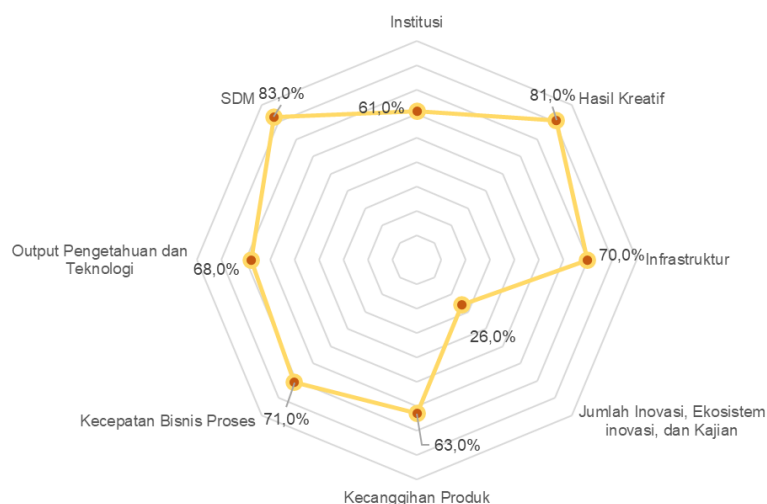
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
	Proses	Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah



BAB II

**INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA**

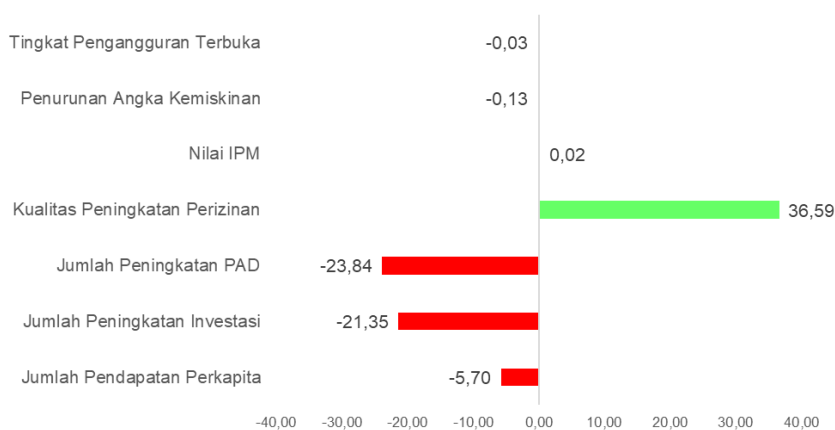
A. KABUPATEN BENGKALIS



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Bengkulu memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83,0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 26%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bengkulu

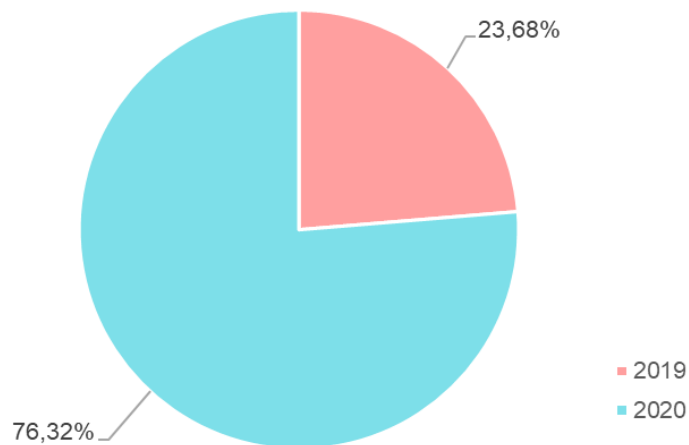
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bengkulu belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 5 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,03%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0,03% dibandingkan tahun 2019. Namun hal

ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan turun sebesar 0.13%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.13% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan PAD turun sebesar 23.84% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 21.35%, yang berarti bahwa jumlah investasi turun sebesar 21.35% dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 5.70%. Kelima indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, naik sebesar 8% bagi jumlah PAD, naik sebesar 0.45% bagi jumlah investasi, dan turun hanya sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

Dua indikator lain yang mengalami perubahan positif adalah indikator Nilai IPM dan Kualitas Peningkatan Perizinan. Indikator Nilai IPM pada tahun 2020 naik sebesar 0.02% dibandingkan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan naik sebesar 36.59%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 36.59% dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM dan naik sebesar 5% bagi jumlah perizinan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

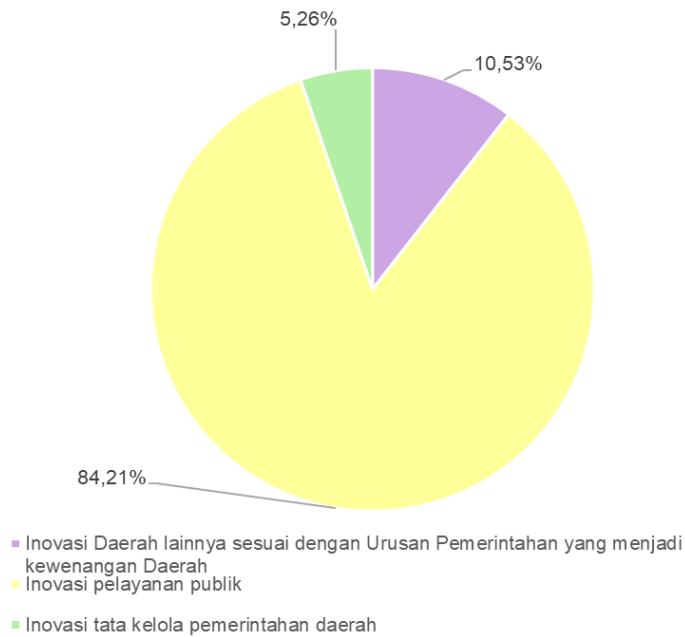
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkalis telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 29 (76.32%) inovasi dari 38 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020, dan 9 (23.68%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

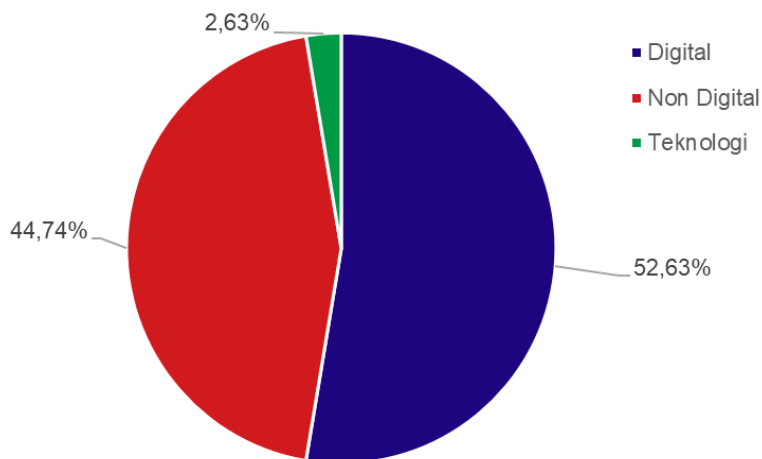
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkulu merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 32 (84.21%) inovasi dari total 38 inovasi. Sedangkan sejumlah 4 (10.53%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 2 (5.26%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

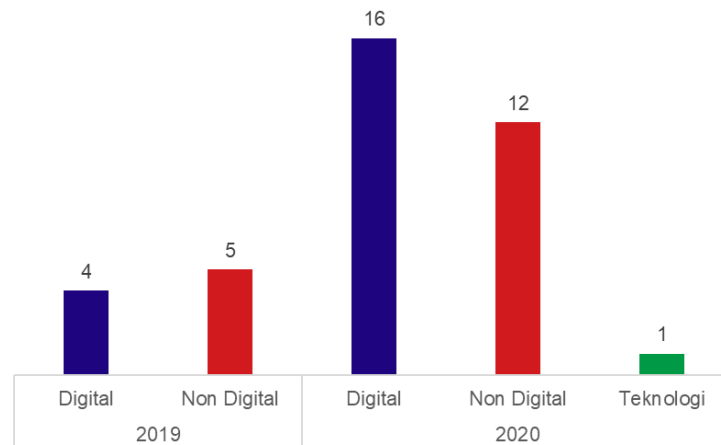


Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bengkulu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 20 (52.63%) dari 38 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Bengkulu merupakan inovasi

digital, kemudian 17 (44.74%) inovasi merupakan inovasi non digital, dan 1 (2.63%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

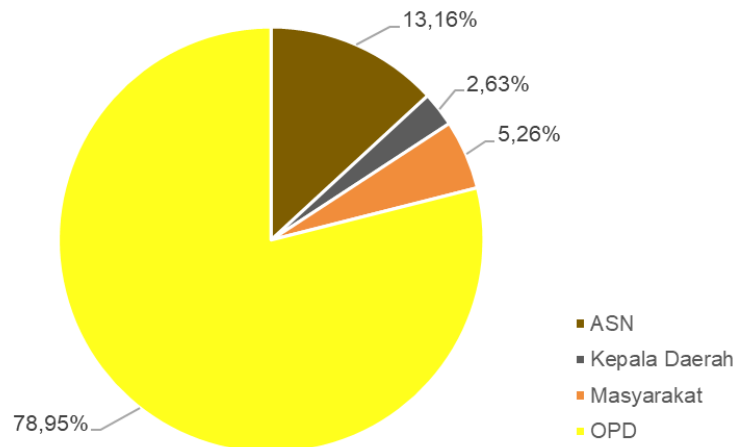
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bengkalis

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, inovasi non digital, maupun inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami kenaikan dari sejumlah 4 inovasi pada tahun 2019, menjadi 16 inovasi pada tahun 2020. Inovasi non digital mengalami kenaikan dari 5 inovasi menjadi 12 inovasi. Sedangkan inovasi teknologi mengalami kenaikan dari tidak ada inovasi di tahun 2019 menjadi 1 inovasi di tahun 2020.

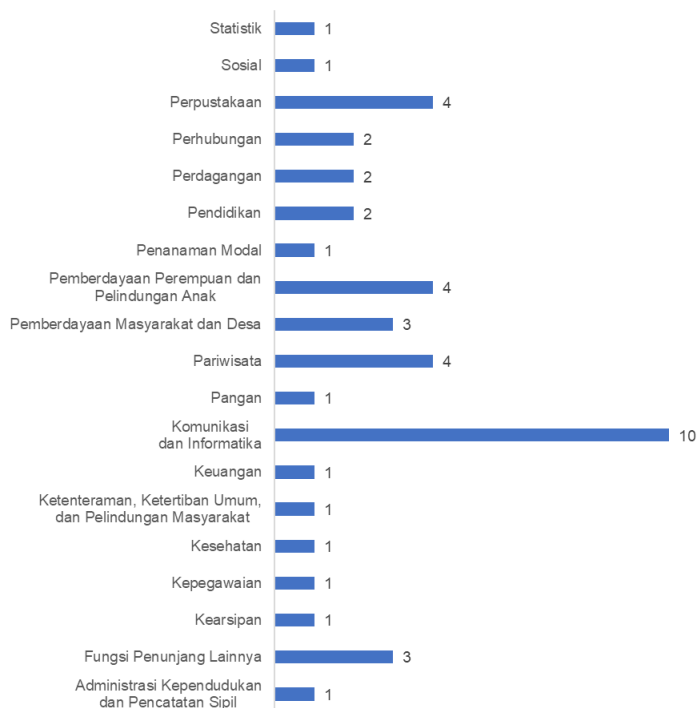
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Bengkalis

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 30 (78.95%) inovasi. Sejumlah 5 (13.16%) inovasi diinisiasi oleh ASN, 2 (5.26%) inovasi diinisiasi oleh masyarakat, dan 1 (2.63%) inovasi sisanya diinisiasi oleh kepala daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD.

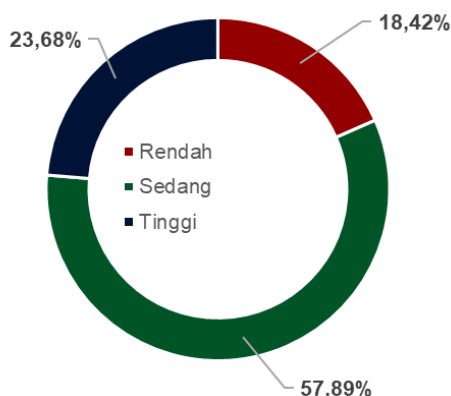
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bengkulu

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Bengkulu berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan komunikasi dan informatika dengan 10 inovasi dari 38 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 2 inovasi, urusan kesehatan dengan 1 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 1 inovasi, serta urusan sosial dengan 1 inovasi.

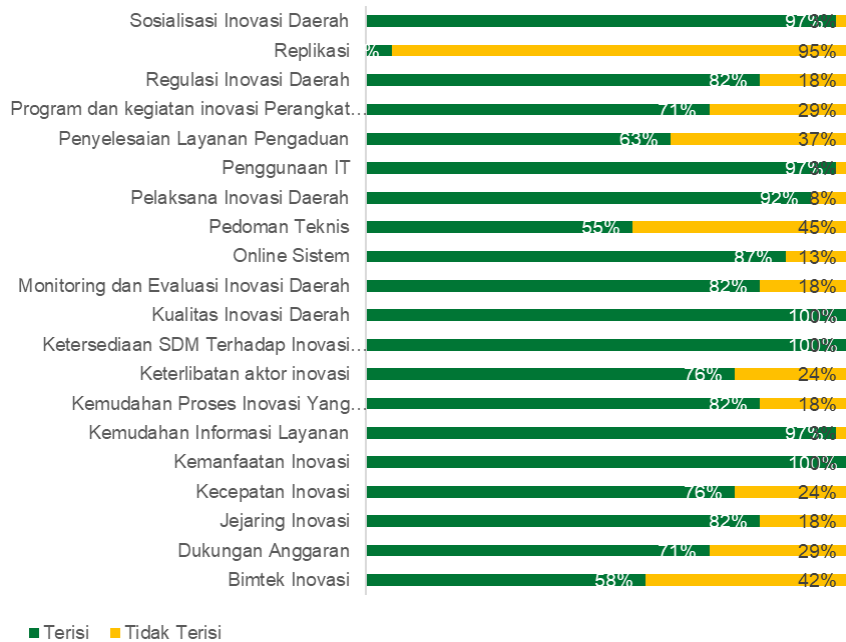
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bengkulu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 7 (18.42%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 22 (57.89%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 9 (23.68%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

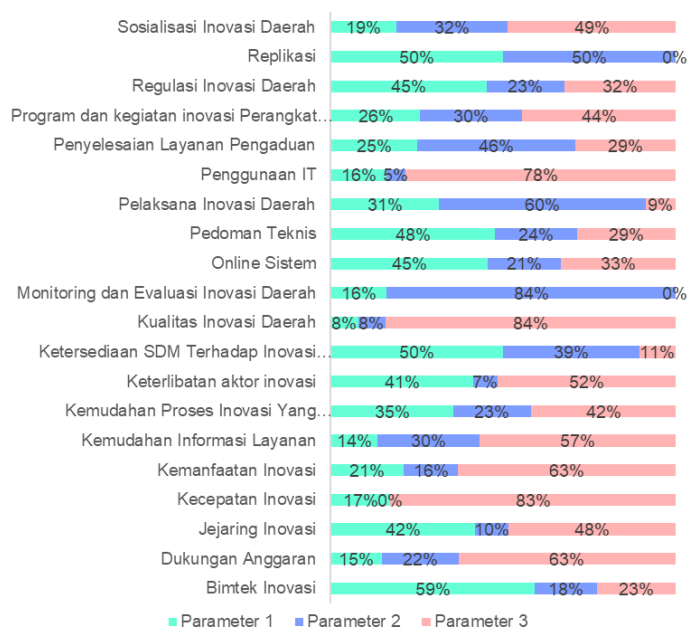


Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 78.68%, artinya dari 38 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Bengkulu rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 16 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bengkulu telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 5%, yang berarti bahwa hanya 2 dari 38 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian sebesar 84%, yang berarti bahwa 84% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 84%, yang berarti bahwa 84% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi yaitu sebesar 59% yang berarti bahwa sebesar 59% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

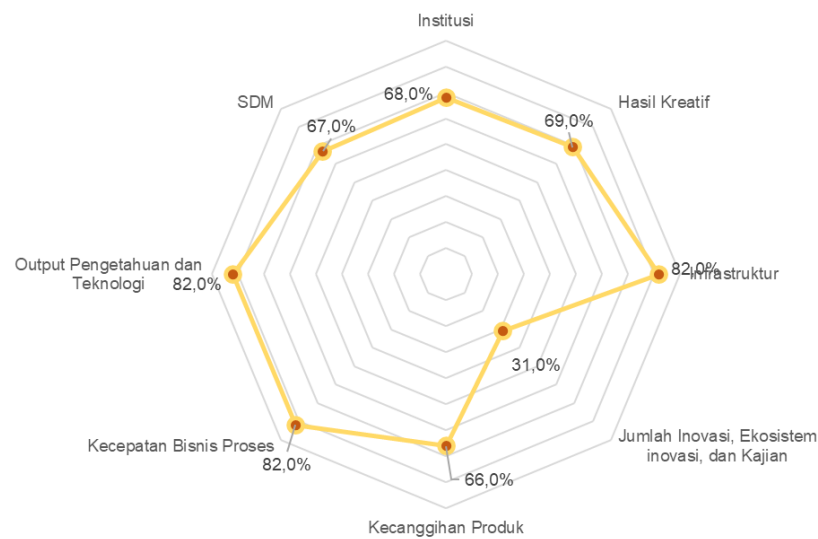
j. Daftar Inovasi Kabupaten Bengkalis beserta Skor Kematangannya

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Bengkalis beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Jemput Bola Secara Massif dan Terintegrasi (Jebol Master)	119
Si Tangan Besi (Sistem Penanganan Kasus Bersinergi)	111
GERANAT ASAP (Gerakan Anak Tempatan Aktif Sosialisasikan Amanah Pemerinatah) Kabupaten Bengkalis	107
Aplikasi PPID Kabupaten Bengkalis	107
Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan) Kecamatan Siak Kecil	104
Aplikasi Android Diskominfo	104
apo (Aplikasi Pendaftaran Online)	103
Website Pesona Bengkalis	101
CITIGOV	101

SAPA EDELWEIS RIAU Yayasan Sahabat Perempuan dan Anak Edelweis Riau	99
Sihijau Penjaga Gambut	99
Bilik Berita Diskominfo	98
Aplikasi Statistik Sektoral	96
GERBANG PERKASA (GERAKAN MEMBANGUN PEREMPUAN KAMPUNG DAN DESA)	95
Pengujian Keling (Kendaraan Keliling) yg Berbasis Online	93
Aplikasi CCTV Pelabuhan	92
Sistem Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (SIDEDIK)	85
Sistem Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai secara online (SKP-Online)	84
Pendamping Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkalis	76
Mitra BUBU	75
SIPENDEKAR (Aplikasi Pendengar Keluhan dan Aspirasi Rakyat)	75
Sabara (Sabtu Baca Ramai-Ramai)	70
BEBORAK (Berbincang Besame Orang Kite) Kecamatan Rupat Utara	68
Mibara (Minggu Baca Ramai-Ramai)	67
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	65
Aplikasi "Bengkalis Menawan"	63
Si-Atand	63
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata	62
Sikoran (Literasi untuk Perekonomian dan Kesejahteraan)	61
Buku Bicara	61
VIDEO PROFIL KECAMATAN BENGKALIS	55
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Restoran	35
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	33
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern	33
SDM PKH Otonom	33
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel	29
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum	27
PEMBENTUKAN KOMUNITAS PENGELOLAAN BUMDes (KOPDes) di KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS	26

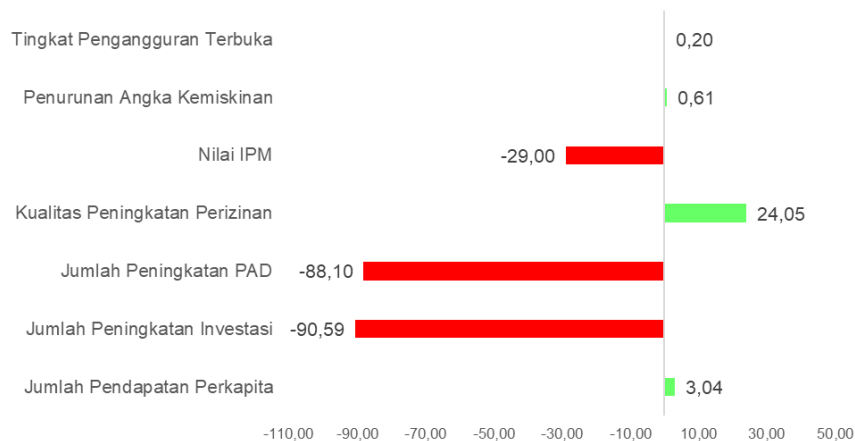
B. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Indragiri Hilir

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, Kecepatan Bisnis Proses, serta Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu masing-masing sebesar 82,0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel-variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 31%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Indragiri Hilir

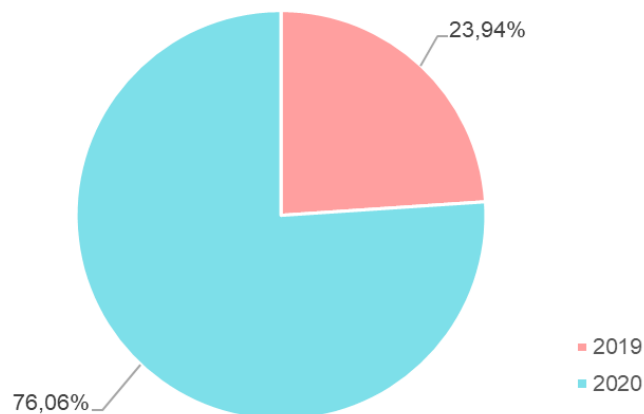
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir

belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih terdapat 3 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Pada tahun 2020, indikator Nilai IPM mengalami penurunan sebesar 29% dibandingkan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 88.10% dibandingkan tahun lalu. Serta indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 90.59%, yang berarti bahwa jumlah investasi menurun sebesar 90.59% dibandingkan tahun 2019. Perubahan ketiga indikator ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM, naik sebesar 8% bagi jumlah PAD, serta naik sebesar 0.45% bagi jumlah investasi.

Empat indikator lain yang mengalami perubahan positif adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, Kualitas Peningkatan Perizinan, dan Jumlah Pendapatan Perkapita. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan sebesar 0.20%, yang berarti bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 turun sebesar 0.20% dibandingkan tahun 2019. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.61%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.61% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 24.05%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 24.05% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan sebesar 3.04% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan keempat indikator ini telah lebih dibandingkan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka, turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, naik sebesar 5% bagi jumlah perizinan, dan turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

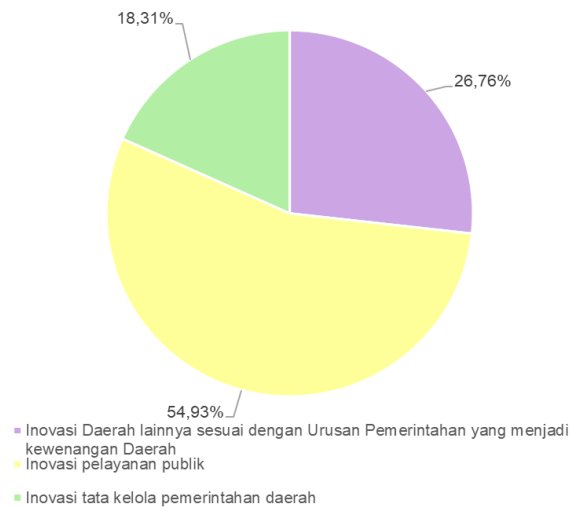
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 54 (76.06%) inovasi dari 71 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020 dan sejumlah 17 (23.94%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

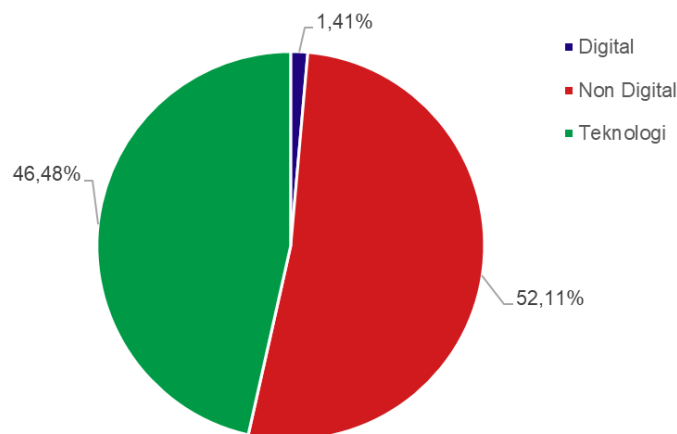
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kab. Indragiri Hilir merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 39 (54.93%) inovasi dari total 71 inovasi. Sedangkan sejumlah 19 (26.76%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 13 (18.31%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

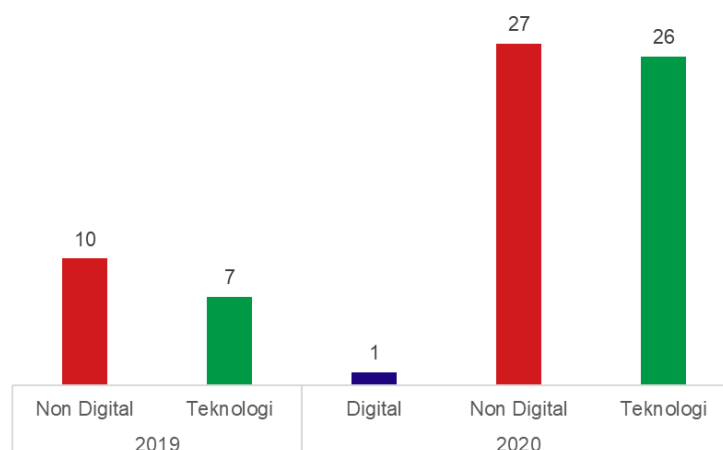
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 37 (52.11%) dari 71 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan inovasi non digital, kemudian 33 (46.48%) inovasi merupakan inovasi teknologi, dan 1 (1.41%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

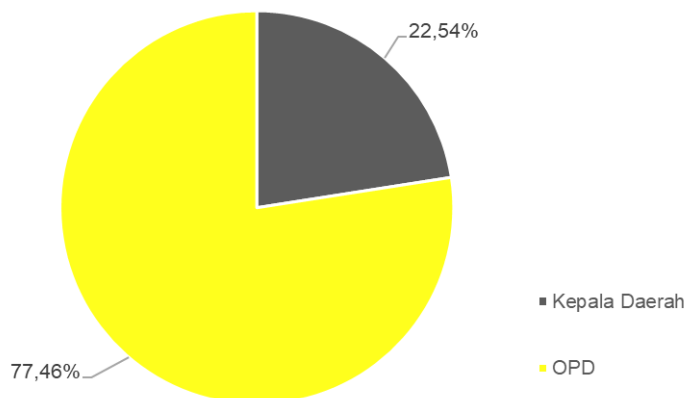
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Indragiri Hilir

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, inovasi non digital, maupun inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami kenaikan dari tidak ada inovasi pada tahun 2019, menjadi 1 inovasi pada tahun 2020. Inovasi non digital mengalami kenaikan dari 10 inovasi menjadi 27 inovasi. Sedangkan inovasi teknologi mengalami kenaikan dari 7 inovasi di tahun 2019 menjadi 26 inovasi di tahun 2020.

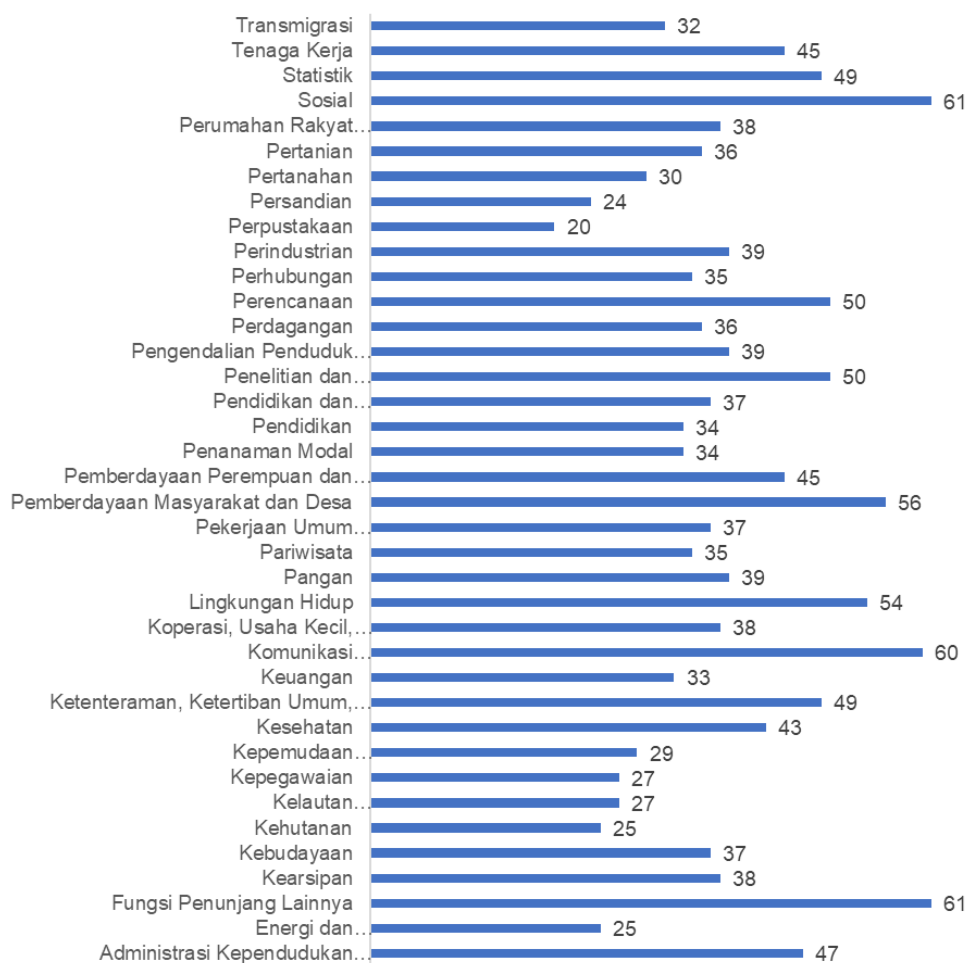
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Indragiri Hilir

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 55 (77.46%) inovasi. Sedangkan sejumlah 16 (22.54%) inovasi lainnya diinisiasi oleh kepala daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD, masyarakat, dan ASN.

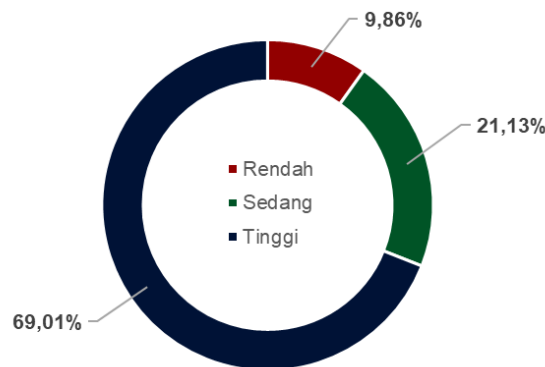
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Indragiri Hilir

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Tiap inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir dapat mencakup beberapa urusan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan sosial dan urusan fungsi penunjang lainnya dengan masing-masing sebanyak 61 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat semua urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 34 inovasi, urusan kesehatan dengan 43 inovasi, urusan pekerjaan umum, dan penataan ruang dengan 37 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 38 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 49 inovasi, serta urusan sosial dengan 61 inovasi.

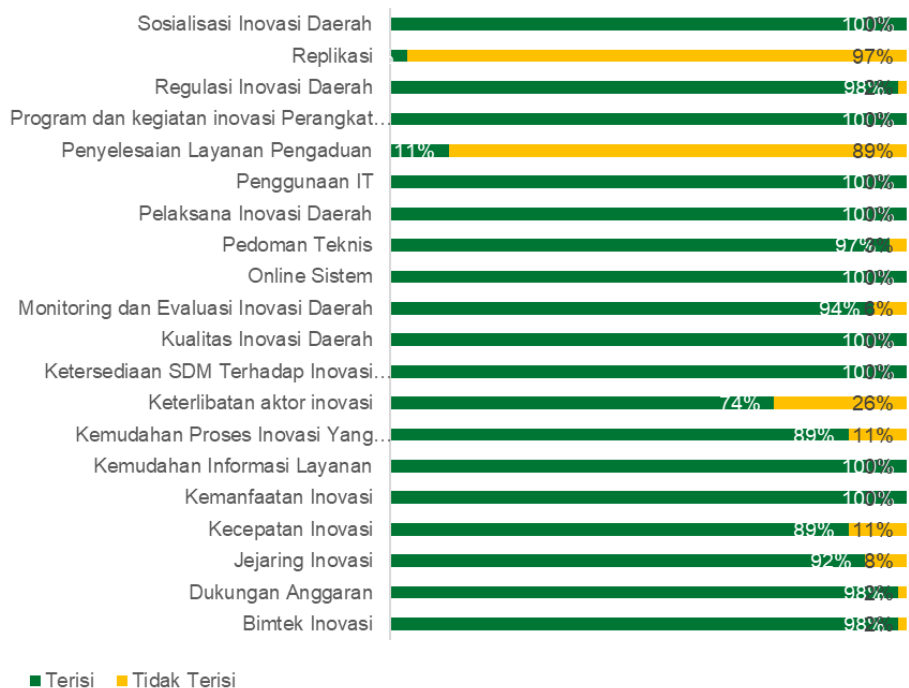
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Indragiri Hilir

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 7 (9.86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 15 (21.13%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 49 (69.01%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

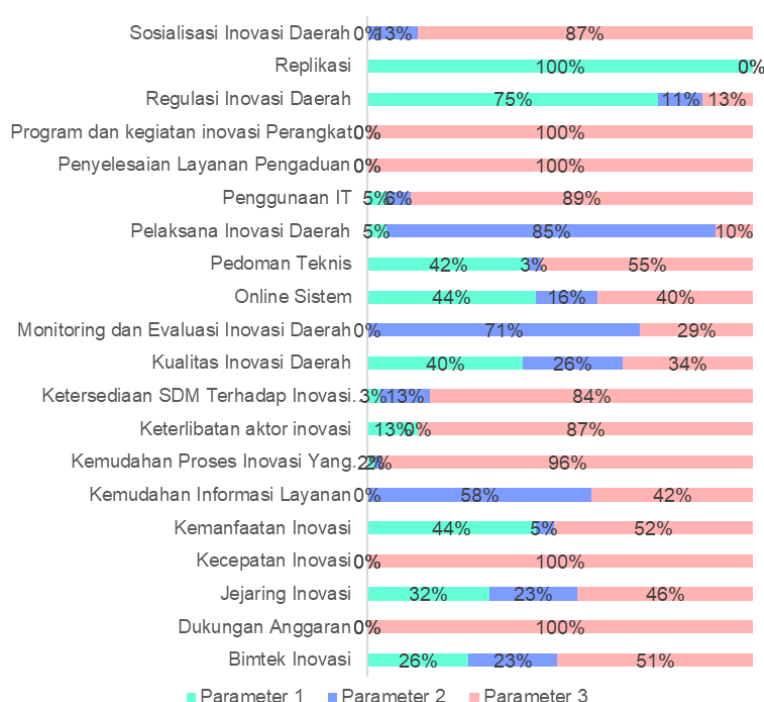


Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Indragiri Hilir

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 87.18%, artinya dari 71 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 17 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi daerah, Online Sistem, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 3%, yang berarti bahwa hanya 2 dari 71 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Kecepatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran dengan masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 85%, yang berarti bahwa sebanyak 85% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi

yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Indragiri Hilir beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Indragiri Hilir beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Gerakan 1 Desa 1 Kelurahan 1 Rumah Tahfidz Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir	139
INOVASI "PIAGAM PUALAM" (Pelayanan Prima 3 Jam Pengurusan Izin Reklame) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	130
LAYANAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Lokasi Kecamatan Kemuning)	125
INOVASI "SI ATAH PADI" (Sidang Istbat Nikah Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir	125
INOVASI DAERAH "TIM SI CEPAT PEDULI HAM" (TIM KOORDINASI PERCEPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PEDULI HAM) PRODUK INOVASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	125
INOVASI "PIDADA INHIL" (PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	122
INOVASI "SI KUDA" (Sistem Informasi Kepegawaian Umum dan Data) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	122
INOVASI DAERAH "SALAMAN" (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran) PRODUK INOVASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	122
INOVASI "LAPOR URC SAJA" (Layanan Pengaduan On-line Rakyat Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong PraJA) Kabupaten Indragiri Hilir	121
INOVASI DAERAH "SI KANCIL INHIL" (Sistem Informasi Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Indragiri Hilir) INOVASI DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	120
INOVASI DAERAH "FOKUS PBJ" (Forum Komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) PRODUK INOVASI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	120
INOVASI "NASI UDUK INHIL" (Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	119
INOVASI PEMANFAATAN AIR BUDIDAYA LELE BIOFLOK UNTUK TANAMAN PRODUK INOVASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	118
INOVASI DAERAH "SI KAPAL LAYAR" (Sitem Informasi Kas dan	118

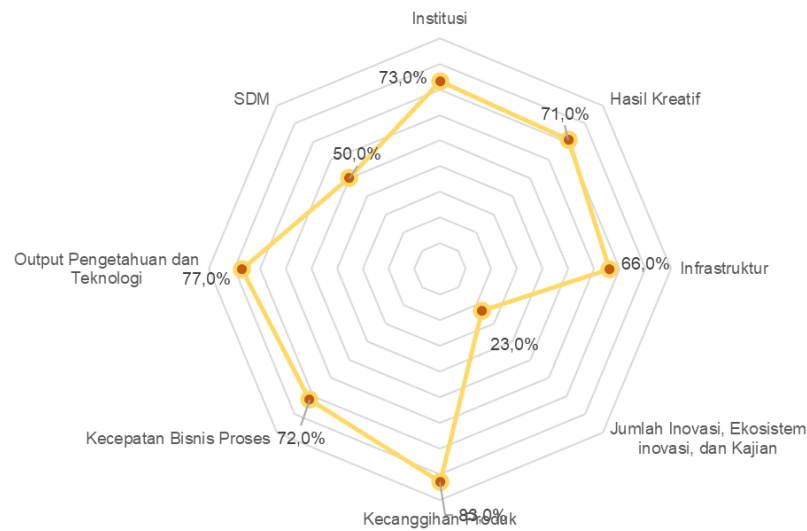
Pencairan Digital Langsung Bayar) PRODUK INOVASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
INOVASI GAMBAS CEK MINAH (Gambut Basah Cegah Kebakaran Lahan Masyarakat Indragiri Hilir) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	117
INOVASI DAERAH "DEMI TUAN INHIL" (Dermaga Miring Untuk Anak Negeri Indragiri Hilir) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	117
INOVASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA PLUS TERINTEGRASI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	116
INOVASI DAERAH "INHIL TERBILANG" (Indragiri Hilir Terdapat Bibit Kelapa Sri Gemilang) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	114
INOVASI DAERAH "SULTAN" (SISTEM KEMUDAHAN LAYANAN TATA RUANG) PRODUK INOVASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	114
INOVASI DAERAH "LAYANAN KOPI INHIL" (LAYANAN KONSULTASI ONLINE PENGAWASAN INTERN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) PRODUK INOVASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	113
INOVASI DAERAH "BIORE" (Bilik Video Conference) PRODUK INOVASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	113
INOVASI "SI PAPA KU" (Aplikasi Pendamping Penatausahaan Keuangan) LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PRODUK INOVASI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	112
INOVASI DAERAH "SI DAYANG" (Inovasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) PRODUK INOVASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	111
INOVASI DAERAH "POPAL" (PENGEMBANGAN POTENSI PADI INDRAGIRI HILIR) PRODUK INOVASI DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	110
INOVASI DAERAH "LOGO INHIL NAN MOLEK" PRODUK INOVASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	109
INOVASI DAERAH "TEMAN SEHATI" (Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir) PRODUK INOVASI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	109
INOVASI DAERAH "SLIP" (Sistem Layanan Informasi Perkim) PRODUK INOVASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	109
Tim SIRTU (Penyisir Peraturan) RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	106
INOVASI DAERAH "GERAKAN SATU HATI PEDULI STUNTING DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR" PRODUK INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	106
INOVASI DAERAH "TIM TREMBESI" (TIM PERCEPATAN PELAYANAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI) PRODUK INOVASI DINAS	106

KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
INOVASI DAERAH "KODOK'S MELONCHAT" (Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telepon dan Chat) PRODUK INOVASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TENGGU SULUNG PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	106
INOVASI DAERAH "KELAPA KOPYOR BISA" (KEGIATAN PENGOLAHAN PANGAN KOMODITAS PERTANIAN YANG BERORIENTASI BISNIS AGRO) PRODUK INOVASI KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	106
INOVASI DAERAH "SIMPEL" (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Elektronik) PRODUK INOVASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	105
INOVASI DAERAH "PANTAI CERMIN" (Pelayanan Tani Cerdas, Cermat dan Integrasi) PRODUK INOVASI KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	105
"E-Monev" (Pelaporan Evaluasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik) PRODUK INOVASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	104
INOVASI DAERAH "SAPA RASA" (Sapa Pasien, Rangkul Dengan Santun) PRODUK INOVASI RSUD RAJA MUSA SUNGAI GUNTUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	104
INOVASI DAERAH "TIM INFORMASI CAKRA" (Cepat, Akurat, Kredibel, Respon dan Akuntabel) PRODUK INOVASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	103
INOVASI DAERAH "INTI RETEH" (Registrasi Online Surat Pindah di Kecamatan Reteh) PRODUK INOVASI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	103
INOVASI DAERAH "SI PELANGI PAGI" (Sistem Pengaduan dan Layanan Administrasi Pelangiran Penggunaan Aktif Teknologi) PRODUK INOVASI KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	103
INOVASI DAERAH "SI PRIMA 15 Menit" (Inovasi Pelayanan Ramah, Menyenangkan, Akurat dan Cepat 15 Menit) PRODUK INOVASI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	102
INOVASI DAERAH "POS KEAMANAN TERPADU SATU ATAP (BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS)" PRODUK INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	102
INOVASI DAERAH "D' Bumil O" (Data Ibu Hamil Online) PRODUK INOVASI KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	102
INOVASI DAERAH "INVEST" (Inovasi Pengurusan Surat Tanah) PRODUK INOVASI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	102
INOVASI DAERAH "KORSI PANAS" (Kontak Informasi Pelayanan Akuntabel dan Sistematis) PRODUK INOVASI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	101
INOVASI DAERAH "ADA SI UDIN OCIT" (Administrasi Surat Izin Dispensasi Nikah Online Bagi Calon Pengantin) PRODUK INOVASI KECAMATAN TEMBLAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	101
OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI INFORMASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (InPas) TV DIGITAL	100

PRODUK INOVASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
INOVASI DAERAH "PERMATA TRC-19" (Pemutus Rantai Tim Reaksi Covid -19) PRODUK INOVASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	100
INOVASI DAERAH "TANAM KELAPA" (TAMU SENANG, NYAMAN, KEAMANAN DAN PELAYANAN PRIMA) PRODUK INOVASI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	100
INOVASI DAERAH "BU KIA PERTAMA" (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Menjadi Persyaratan Tambahan Masuk Sekolah) PRODUK INOVASI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	100
INOVASI DAERAH "SAGU MANDAH" (Inovasi Sistem Akuntabilitas Guna Untuk Masyarakat Lebih Mudah) PRODUK INOVASI KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	98
INOVASI DAERAH "LAYANAN SIAAP" (Sistem Aplikasi Administrasi Produk Hukum Daerah) PRODUK INOVASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	98
INOVASI DAERAH "TIPEKK" (Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan) PRODUK INOVASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	96
INOVASI DAERAH "SIMPIDADE & KIAMBANG" (Sistim Informasi Pelayanan Dari Desa & Kelurahan, Inovatif, Murah, Berkualitas, Menyenangkan) PRODUK INOVASI KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	96
INOVASI DAERAH "WARDAN-MBAK IKHA" (Warga Damai, Aman, Membangun Kampung Indah, Kreatif, Harmonis, dan Asri) PRODUK INOVASI KECAMATAN TELUK BELENGKONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	95
INOVASI DAERAH "KELAPA MUDA" (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah dan Akurat) PRODUK INOVASI KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	93
INOVASI DAERAH "JAM TANGAN" (Jaga Kampung Dengan Semangat Gotong Royong) PRODUK INOVASI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	93
INOVASI DAERAH "SIPETUS" (SISTEM PENGADUAN TUMPUKAN SAMPAH) PRODUK INOVASI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	93
INOVASI DAERAH "TIM SIBER" (Tim Penyisir Kebersihan) PRODUK INOVASI KELURAHAN SUNGAI BERINGIN KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	93
INOVASI "PUSPA BERSERI" (Puskesmas Peduli Aids Masyarakat Sehat dan Mandiri) POLA POSYANDU BOUGENVILE PRODUK INOVASI DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	92
INOVASI DAERAH "TALI SERAT" (Taman Literasi Sekolah dan Masyarakat) PRODUK INOVASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	92
INOVASI DAERAH "SIKES" (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Secara Online) PRODUK INOVASI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	89
INOVASI DAERAH "SAPAT" (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi) PRODUK INOVASI KECAMATAN KUALA	88

INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	
Inovasi Layanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Akupuntur Medik) di RSUD Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	87
INOVASI DAERAH "PATEN PEPES" (Pelayanan Andmistrasi Terpadu Kecamatan Spesial Pesisir) PRODUK INOVASI KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	85
VIDEO NEW NORMAL LIFE SEKTOR PASAR MODERN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	27
VIDEO NEW NORMAL LIFE SEKTOR PASAR TRADISONAL	27
VIDEO NEW NORMAL LIFE SEKTOR TRANSPORTASI UMUM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	27
VIDEO NEW NORMAL LIFE SEKTOR PTSP DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	27
VIDEO NEW NORMAL LIFE SEKTOR RESTORAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	27
VIDEO NEW NORMAL LIFE SEKTOR OBJEK WISATA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	19
VIDEO NEW NORMAL LIFE SEKTOR PERHOTELAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	8

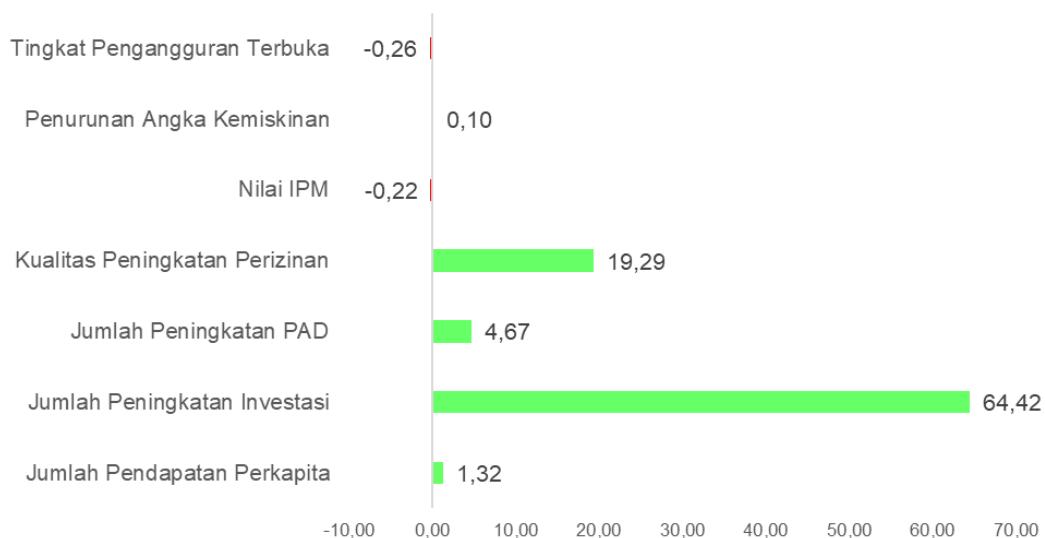
C. KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Indragiri Hulu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Indragiri Hulu memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu sebesar 83,0%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel-variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 23%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



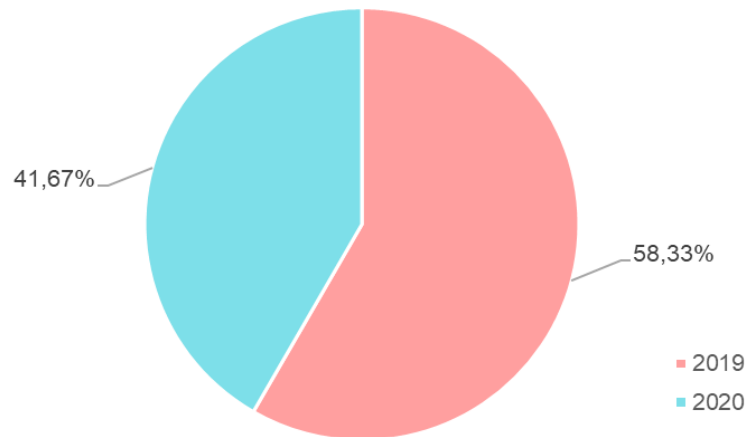
Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Indragiri Hulu

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.26%, yang berarti bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0.26% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan jumlah pengangguran terbuka ini masih lebih baik dibandingkan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92%. Selain itu, indikator Nilai IPM turun sebesar 0.22% dibandingkan tahun 2019. Perubahan nilai IPM ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM.

Lima indikator lain yang mengalami perubahan positif adalah indikator Penurunan Angka Kemiskinan, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Peningkatan PAD, Jumlah Peningkatan Investasi, dan Jumlah Pendapatan Perkapita. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.10%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 turun sebesar 0.10% dibandingkan dengan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 19.29%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 19.29% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan sebesar 4.67% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan sebesar 64.42%, dan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan sebesar 1.32%. Kenaikan lima indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, naik sebesar 5% bagi jumlah perizinan, naik sebesar 8% bagi jumlah PAD, naik sebesar 0.45% bagi jumlah investasi, dan turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

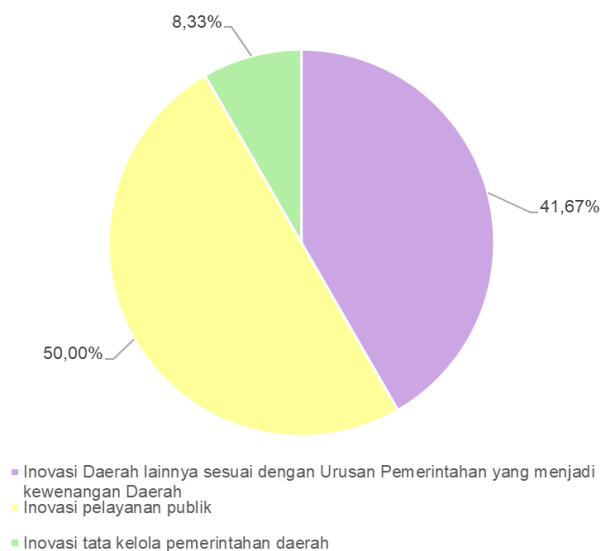
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 21 (58.33%) inovasi dari 36 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sejumlah 15 (41.67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

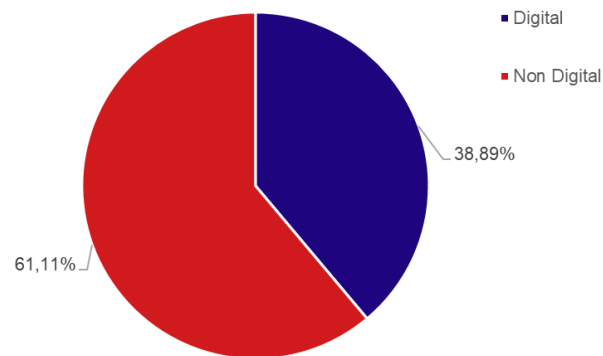
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kab. Indragiri Hulu merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 18 (50%) inovasi dari total 36 inovasi. Sedangkan sejumlah 15 (41.67%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 3 (8.33%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

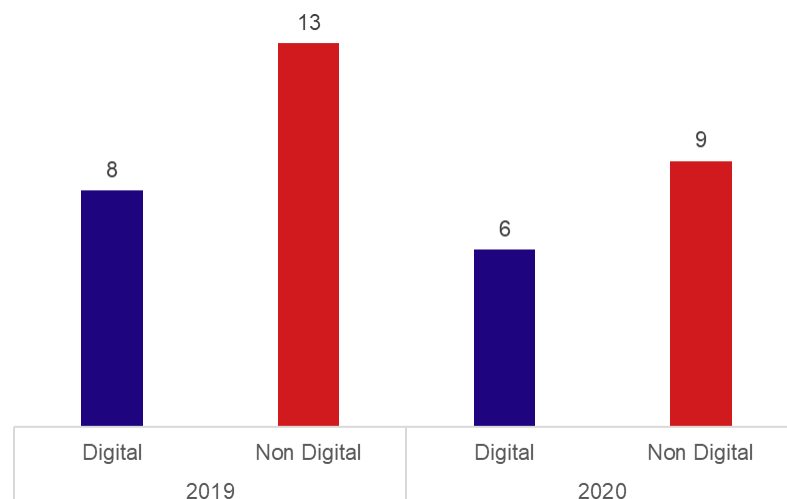
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 22 (61.11%) dari 36 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan inovasi non digital, dan 14 (38.89%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021.

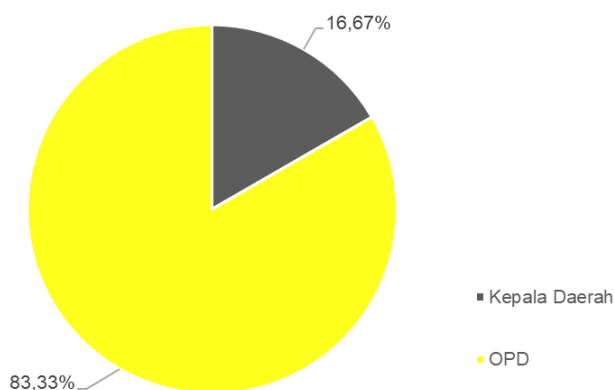
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Indragiri Hulu

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami penurunan dari 8 inovasi pada tahun 2019, menjadi 6 inovasi pada tahun 2020. Inovasi non digital mengalami penurunan dari 13 inovasi menjadi 9 inovasi.

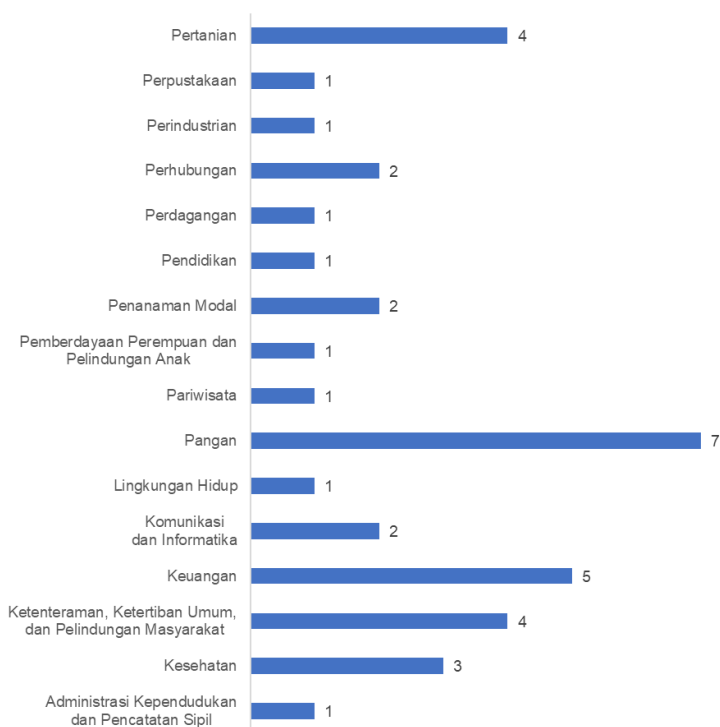
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Indragiri Hulu

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 30 (83.33%) inovasi. Sedangkan sejumlah 6 (16.67%) inovasi lainnya diinisiasi oleh kepala daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD, masyarakat, dan ASN.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

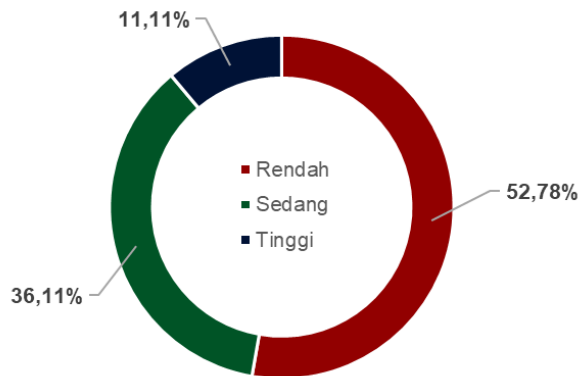


Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Indragiri Hulu

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pangan, yaitu sebanyak 7 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat semua urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 1 inovasi, urusan

kesehatan dengan 3 inovasi, dan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 4 inovasi.

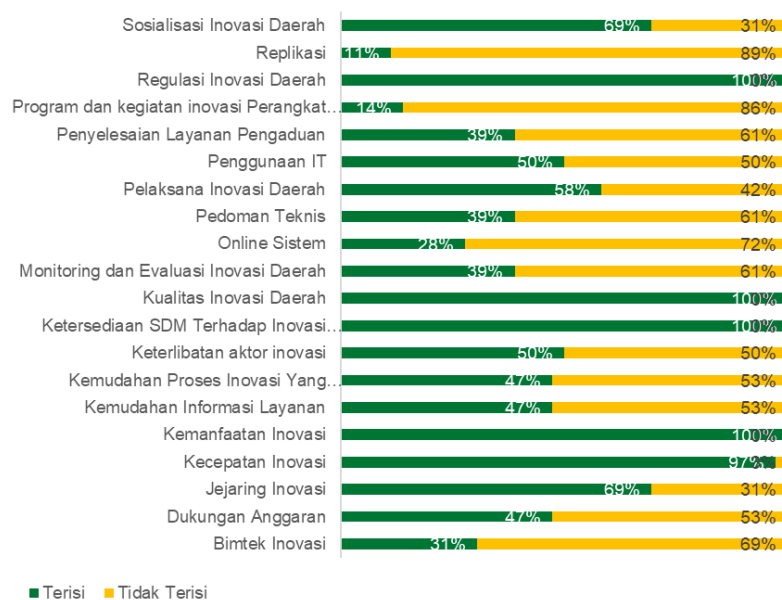
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Indragiri Hulu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 19 (52.78%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 13 (36.11%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 4 (11.11%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

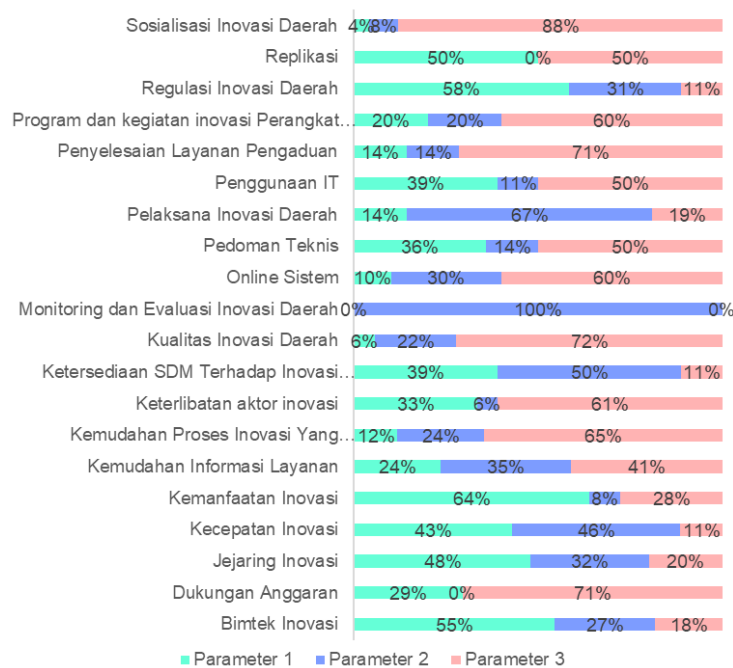


Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Indragiri Hulu

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 56.81%, artinya dari 36 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 11 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 11%, yang berarti bahwa hanya 4 dari 36 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Indragiri Hulu

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 88%, yang berarti bahwa sebanyak 88% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi yaitu sebesar 64%, yang berarti bahwa sebanyak 64% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

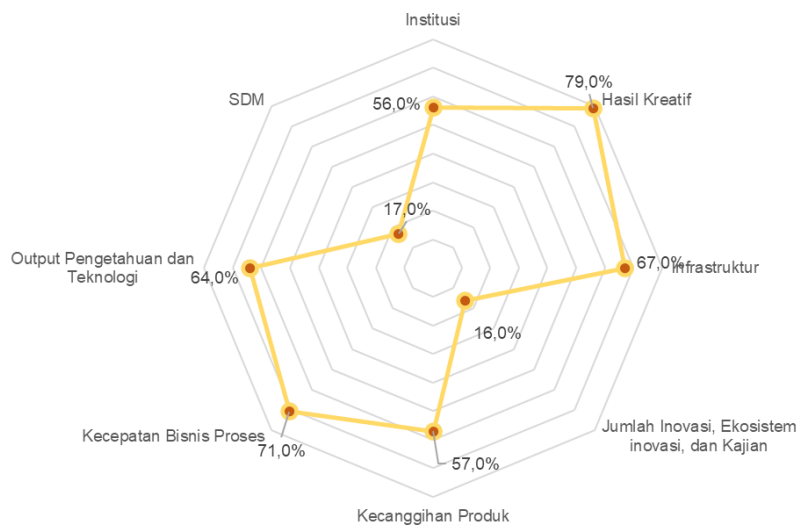
j. Daftar Inovasi Kabupaten Indragiri Hulu beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Indragiri Hulu beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pelayanan Pajak Daerah dengan Prokes Covid-19	123
Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT Information And Tecnology	115
SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH (SEROJA)	113
PELAYANAN PERIZINAN DARING	101
SI-ATAN	99
PTSP C-19 Kab. Indragiri Hulu	95
Aplikasi SI-DINA	94
Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Korban Kekerasan Korban Perempuan Dan Anak Pada P2TP2A Kab. Inhu Di Kecamatan Se Kab.Inhu	84
Inhu Terang bersama Penerangan Jalan umum (PJU) Mandiri	83
SATGAS COVID 19 SATPOL PP KAB.INHU	79
Sistem Informasi Rilis Berita Pembangunan Daerah	72
Diversifikasi Pangan Lokal (Dipangkal)	69
Edukasi Keamanan Pangan Melalui Leaflet (Si Kepang Lea)	59
Pengembangan Destinasi Agrowisata Melon Madu Sebagai Pelopor Desa Mandiri di Kab.Indragiri Hulu	56
Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP)	55
Inovasi Budidaya Bawang Merah Indragiri Hulu Melalui Metode Perbanyak Umbi	52
Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	51
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	48
Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan Sistem Hidroponik	48
Aplikasi Teknologi Pupuk Cair Terfermentasi (POC) pada Tanaman Kelapa Sawit	48
KAM VID 19 KPBD	47
Gerai Pangan Murah	45
APAR	43
E-PAYMENT	42
GERAKAN PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (GAPPENDUK)	42
Tanda tangan elektronik	42
Penanganan Penyakit Jamur Akar (Ganoderma sp) Melalui Aplikasi Trichoderma Skala Rumah Tangga Pada Budidaya Ubi Kayu	42
TUAH IKM	40
Obor Pangan Lestari (OPAL)	37
Gerakan Cinta Buku (GERTAK-KU)	34
Tempat Wisata C-19 Danau Raja Kab. Indragiri Hulu	15

Host to Host	15
Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture Manajemen Surat Menyurat (Elektronik - Kenaikan Gaji Berkala (E-KGB))	14
SIADINDA/SIMAKDA	10
Keluarga ku Masa Depan	8
Layanan Pengaduan Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu	5

D. KABUPATEN KAMPAR



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kampar

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kampar memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 79%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM dan variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu masing-masing sebesar 17% dan 16%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada kedua variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



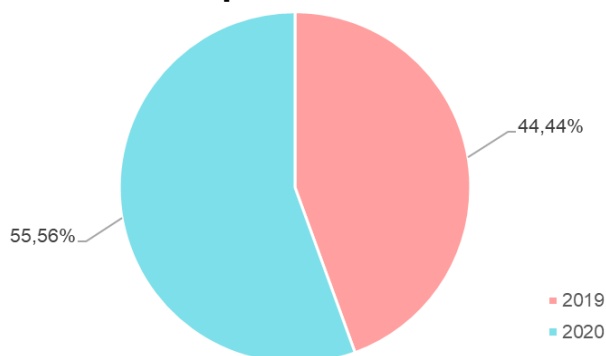
Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Kampar

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kampar belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih terdapat 5 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.17%, yang berarti bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0.17% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan jumlah pengangguran terbuka ini masih lebih baik dibandingkan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92%. Selain itu, indikator Nilai IPM turun sebesar 0.32% dibandingkan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 18.53%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 18.53% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 9.09% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ketiga indikator ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM, naik sebesar 5% bagi jumlah perizinan, dan naik sebesar 8% bagi jumlah PAD. Sedangkan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 0.91% dibandingkan tahun lalu. Perubahan nilai indikator ini masih lebih baik dibandingkan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 1.85%.

Dua indikator lain yang mengalami perubahan positif adalah indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Jumlah Peningkatan Investasi. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.33%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 turun sebesar 0.33% dibandingkan dengan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan sebesar 42.72%, dan. Perubahan dua indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin dan naik sebesar 0.45% bagi jumlah investasi.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

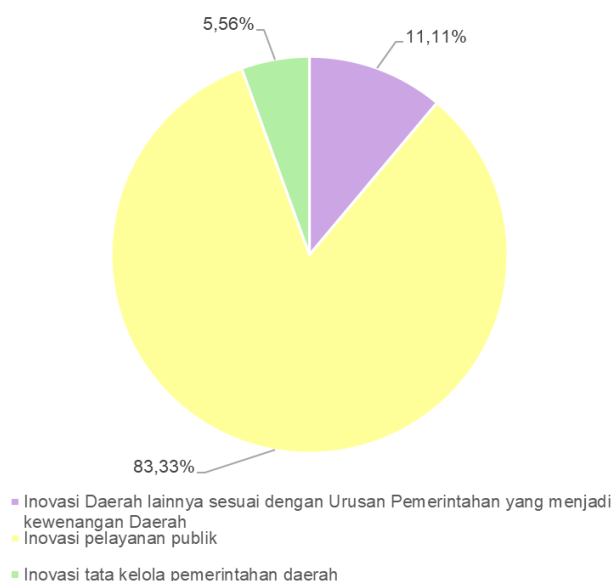
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Kampar

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kampar telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 10 (55.56%) inovasi dari 18 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020 dan sejumlah 8 (44.44%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

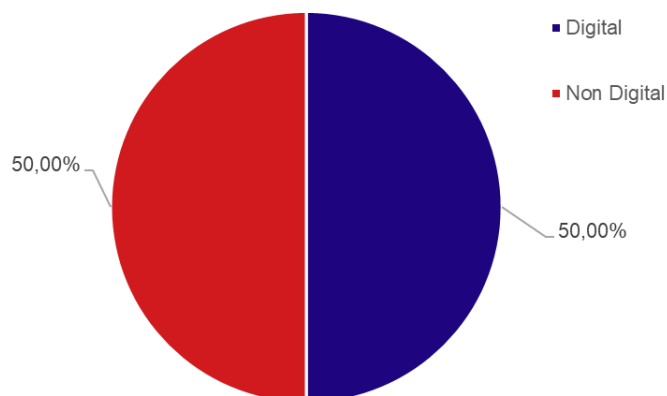
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Kampar

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kab. Kampar merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 15 (83.33%) inovasi dari total 18 inovasi. Sedangkan sejumlah 2 (11.11%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 1 (5.56%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

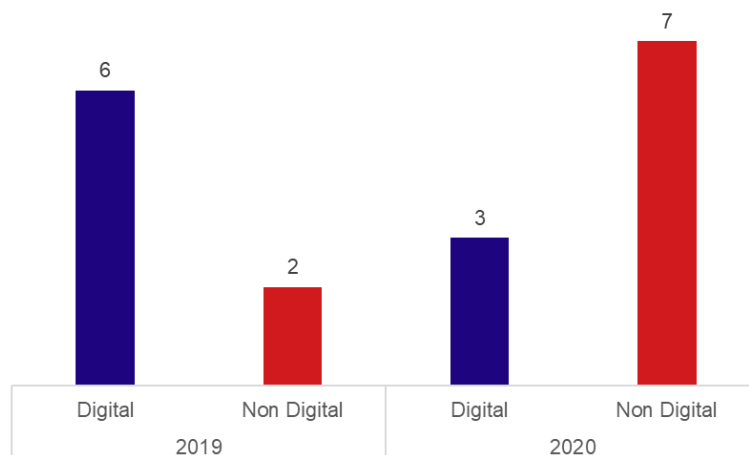
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Kampar

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (50%) dari 18 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kampar merupakan inovasi non digital, dan 9 (50%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kampar pada tahun 2021.

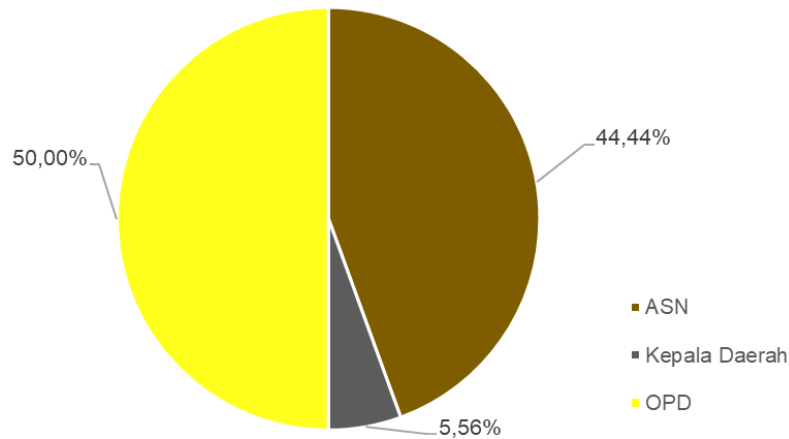
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kampar

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kampar mengalami perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami penurunan dari 6 inovasi pada tahun 2019, menjadi 3 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dari 2 inovasi menjadi 7 inovasi.

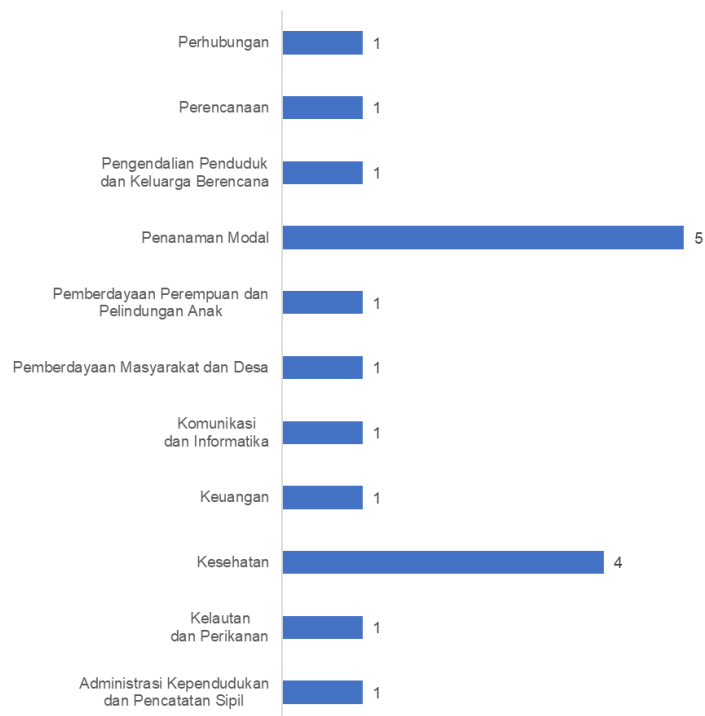
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Kampar

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kampar pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 9 (50%) inovasi. Sedangkan sejumlah 8 (44.44%) inovasi diinisiasi oleh ASN, dan 1 (5.56%) inovasi lainnya diinisiasi oleh kepala daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan masyarakat.

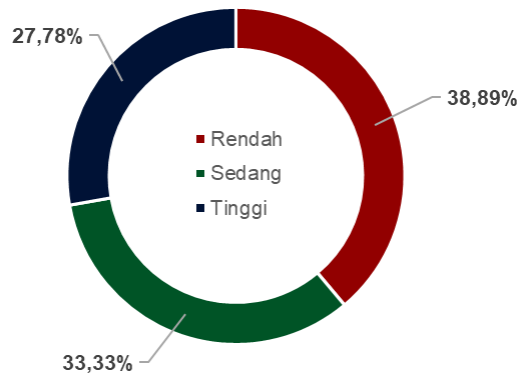
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Kampar

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kampar berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada penanaman modal, yaitu sebanyak 5 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 1 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 4 inovasi.

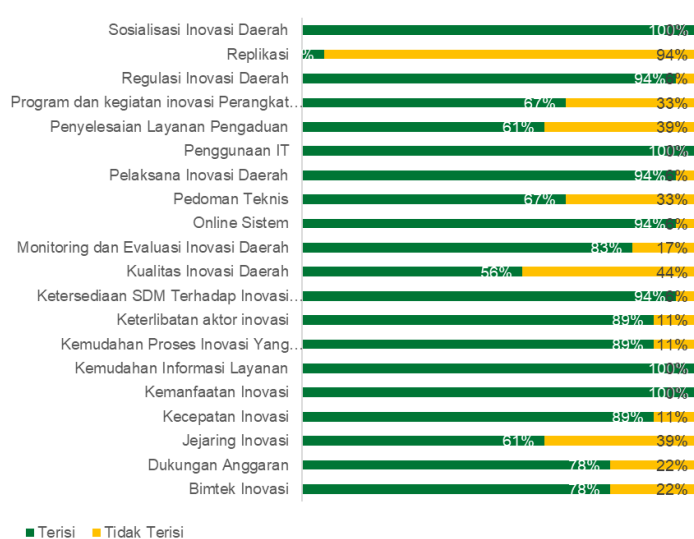
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Kampar

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 7 (38.89%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 6 (33.33%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 5 (27.78%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

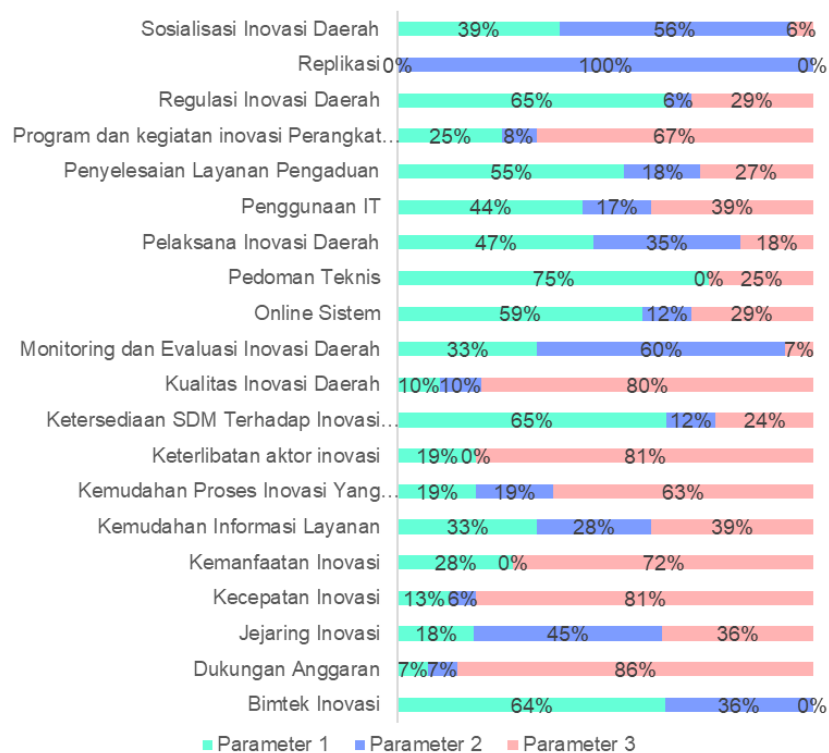
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kampar

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 80%, artinya dari 18 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Kampar, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 16 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah. Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kampar telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 6%, yang berarti bahwa hanya 1 dari 18 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kampar

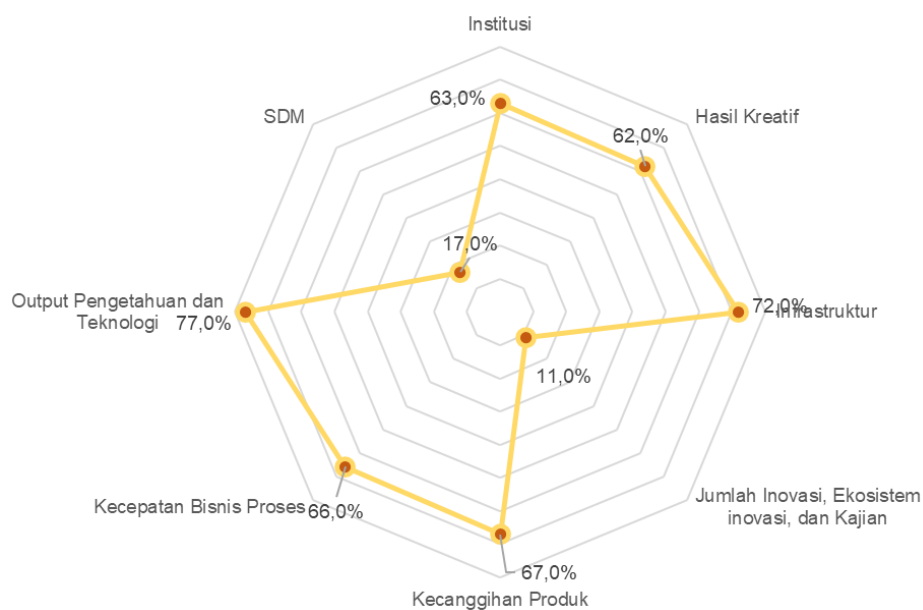
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 86%, yang berarti bahwa sebanyak 86% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 75%, yang berarti bahwa sebanyak 75% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kampar beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Kampar beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SISTEM INFORMASI MENUJU DESA MANDIRI (SIDAMRI)	128
PSC 119 Kampar	108
BISTIK (Bus Integrasi Sekolah dengan Teknologi Informasi yang ber-Keselamatan)	106
Siomai (Sosialisasi Gemar Makan Ikan)	103
KECAPI RAKIT (Kerjasama Catatan Sipil dan Rumah Sakit)	102
Aplikasi Simpad (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah)	97
E-Wartawan	96
(BCA) Bahagia Ceria Bersama Anak	96
Neli Ting Ting (Nenek peduli stunting itu penting), Warkop Ayah Hebat (Warung Kopi Ayah Hebat)	88
E PLANNING	87
SISRANAP (SISTEM INFORMASI RAWAT INAP)	61
SISTEM INFORMASI RUJUKAN TERPADU (SISRUTE)	49
MAMBOLO OSS (Inovasi Prioritas Membenahi Aktifitas Perizinan Mandiri Berusaha Melalui OSS)	46
SADAR (Penyajian Buku Statistik Data Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kampar)	34
PAIBO (Penyediaan Media Informasi Banner Online) Single Submission (OSS)	34
Sistem Pelayanan Terpadu	32
KOJOU IKM (Kuesioner Jemput Data Oleh Petugas Perizinan Untuk Mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat)	28
LOYOUT UMKM (Inovasi Layanan Berbantuan OSS Untuk Pelaku UMKM)	20

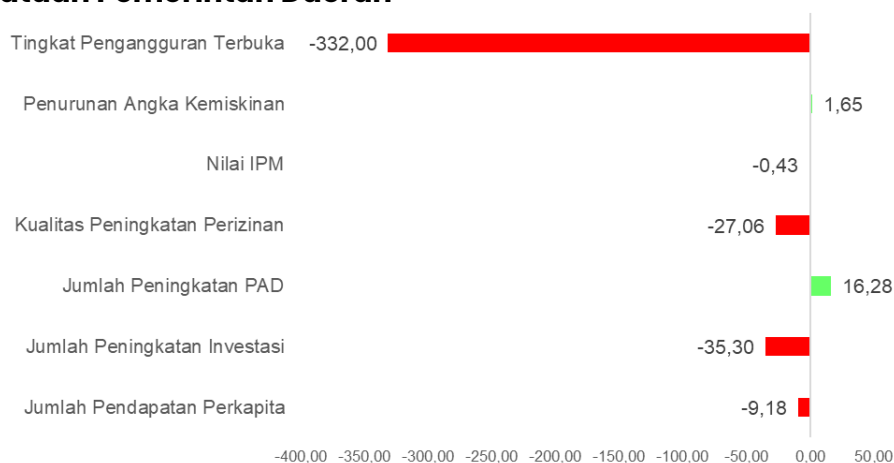
E. KABUPATEN KEP. MERANTI



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kep. Meranti

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu sebesar 77%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM dan variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu masing-masing sebesar 17% dan 11%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada kedua variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Kep. Meranti

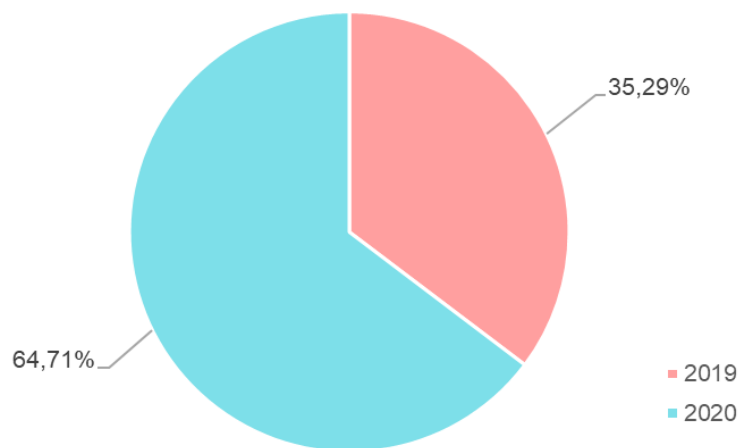
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas

dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kepulauan Meranti belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 5 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 332%. Dikarenakan nilai perubahan ini sangat besar dan lebih dari 100%, data yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang diminta sehingga dapat diabaikan. Selain itu, indikator Nilai IPM turun sebesar 0.43% dibandingkan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 27.06%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 27.06% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 35.30% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 9.18%. Perubahan keempat indikator ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM, naik sebesar 5% bagi jumlah perizinan, naik 0.45% bagi jumlah investasi, dan turun hanya sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

Dua indikator lain yang mengalami perubahan positif adalah indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Jumlah Peningkatan PAD. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1.65%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 turun sebesar 1.65% dibandingkan dengan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan sebesar 16.28%. Perubahan dua indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin dan naik sebesar 8% bagi jumlah PAD.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

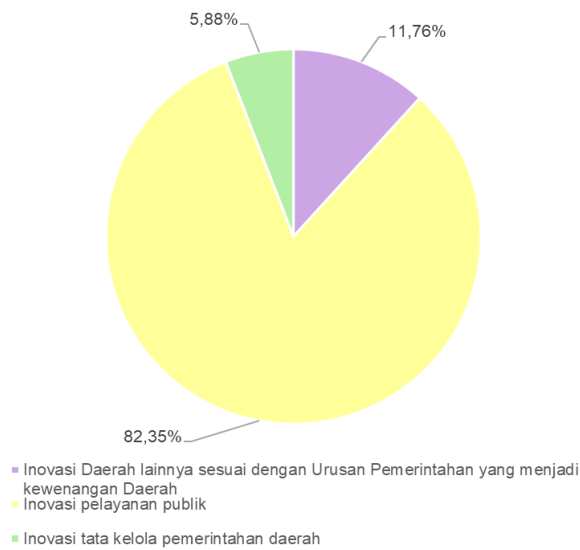
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 11 (64.71%) inovasi dari 17 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020 dan sejumlah 6 (35.29%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

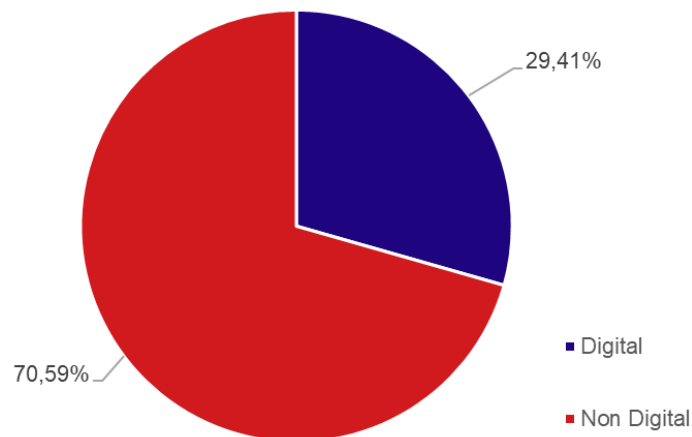
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kab. Kepulauan Meranti merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 14 (82.35%) inovasi dari total 17 inovasi. Sedangkan sejumlah 2 (11.76%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 1 (5.88%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

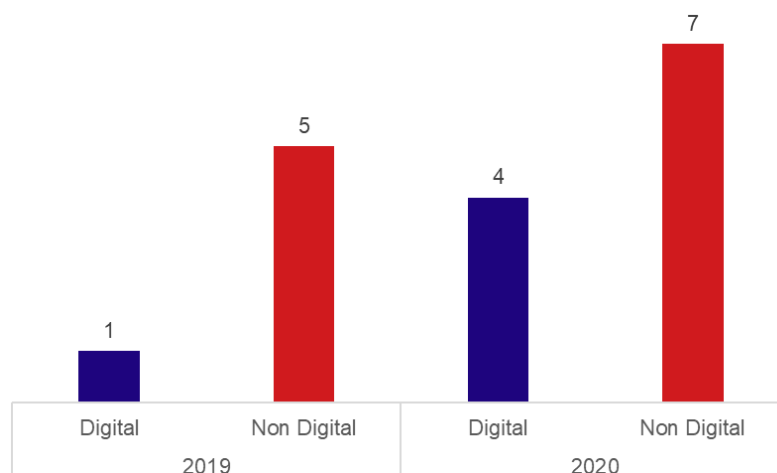
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 12 (70.59%) dari 17 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan inovasi non digital, dan 5 (29.41%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021.

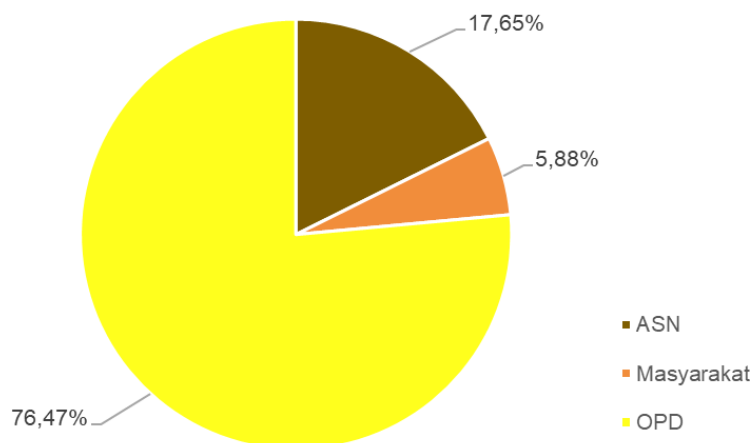
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kep. Meranti

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami peningkatan dari 1 inovasi pada tahun 2019, menjadi 4 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dari 5 inovasi menjadi 7 inovasi.

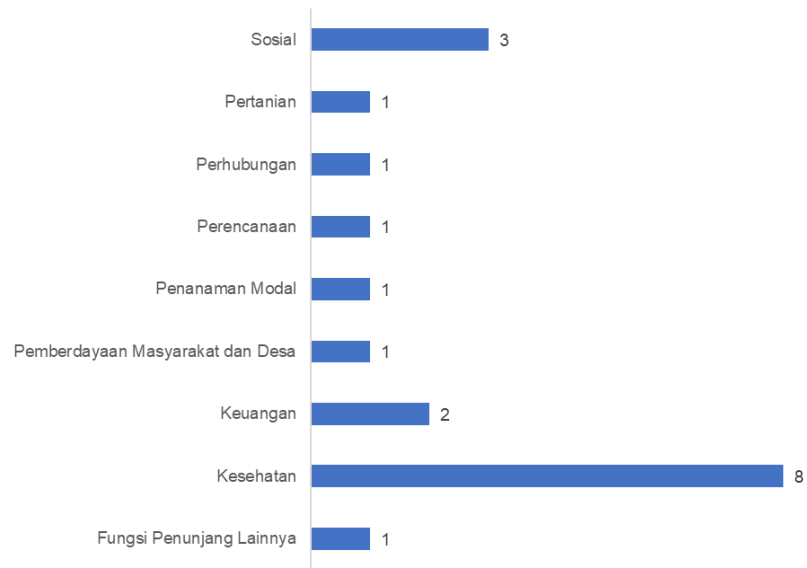
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Kep. Meranti

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 13 (76.47%) inovasi. Sedangkan sejumlah 3 (17.65%) inovasi diinisiasi oleh ASN, dan 1 (5.88%) inovasi lainnya diinisiasi oleh masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan kepala daerah.

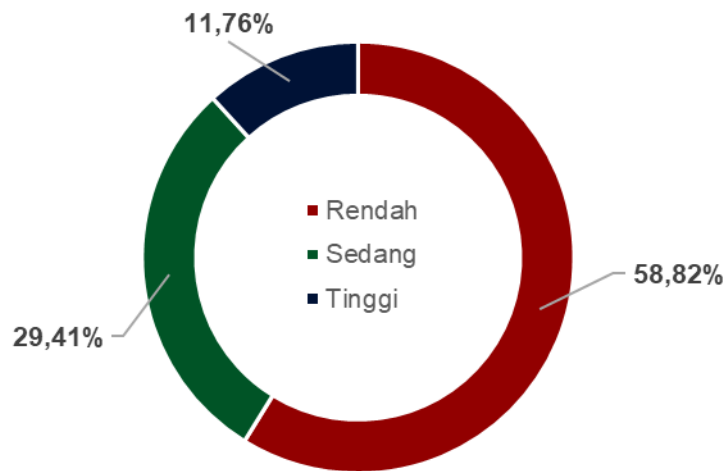
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Kep. Meranti

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada kesehatan, yaitu sebanyak 8 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 3 inovasi dan urusan kesehatan dengan 8 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

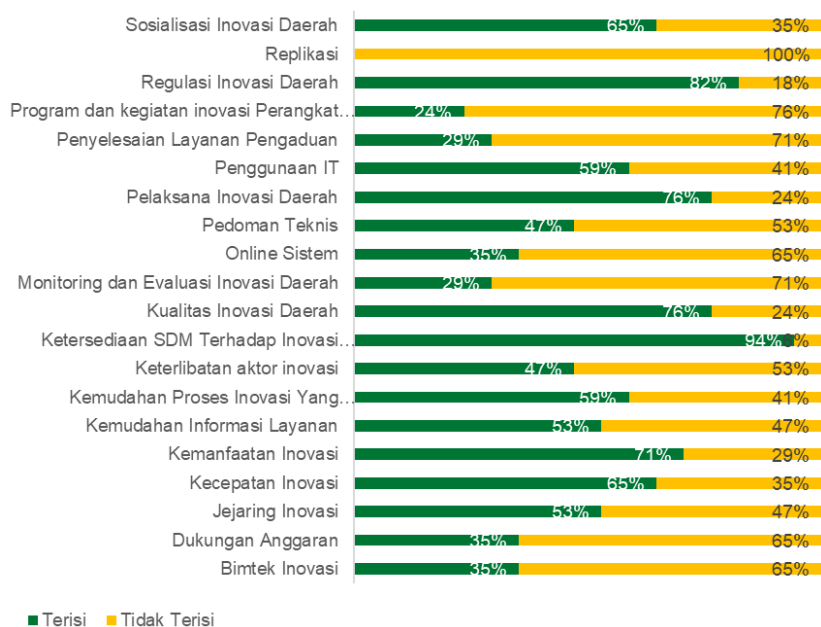


Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Kep. Meranti

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 10 (58.82%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 5 (29.41%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 2 (11.76%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor

kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

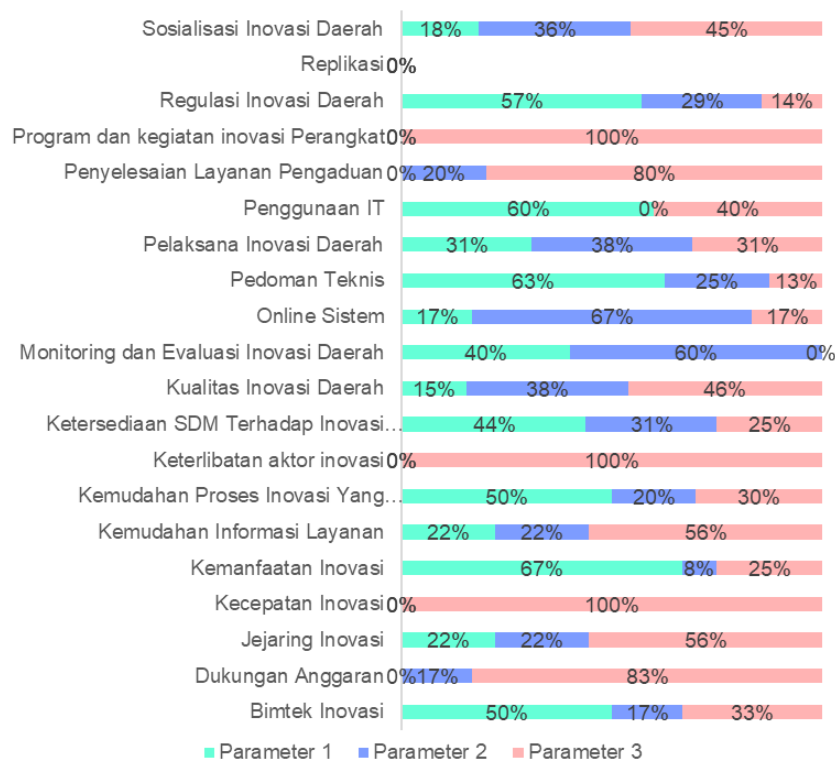


Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kep. Meranti

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 51.76%, artinya dari 17 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 10 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian sebesar 94%, yang berarti bahwa 16 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kep. Meranti

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Kecepatan Inovasi yaitu masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem sebesar 67%, yang berarti bahwa sebanyak 67% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi yaitu sebesar 67%, yang berarti bahwa sebanyak 67% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

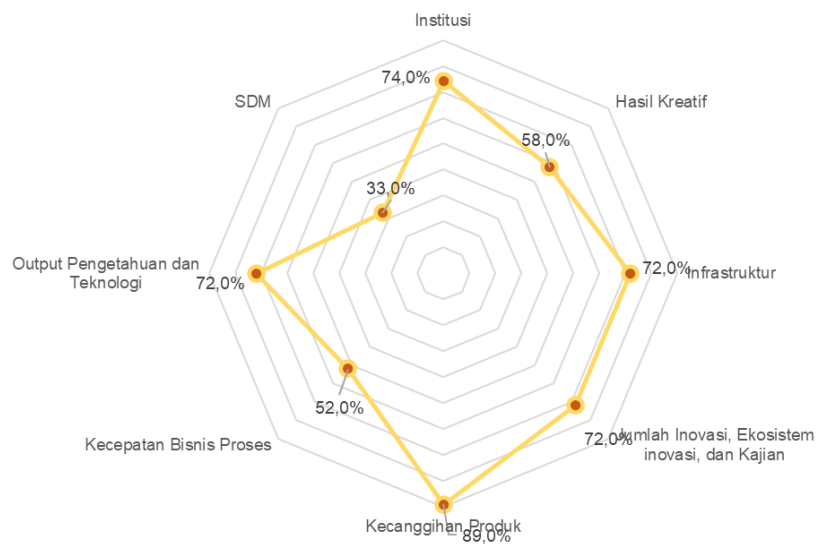
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kep. Meranti beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Kep. Meranti beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SATU DATA TERPADU HARAPAN MERANTI (SATU HATI)	117
Sistem Informasi Perizinan Online Terpadu (SEMPOLET)	115
SIAP KUNJUNGI KELUARGA RAWAN (BERMASALAH KESEHATAN)/ "SIAGA RAWAN"	99
Aplikasi Sistem Pengelolaan Pendapatan Perpajakan (SITANJAK)	97
MERANTI SIGAP COVID-19	68

POSYANDU ODGJ TAZKIYATUL QOLBI	52
PRAJA WIBAWA PEDULI SESAMA (PRAJA LIMA)	50
PAPA (Pemantau Alarm Persalinan Aman)	47
MASMAN GA JAHAT (Masyarakat Aman Gunakan Jamban Sehat)	46
Pembayaran non Tunai pada Pajak PBB-P2	44
Motor Keliling Serba Guna "MOLINA"	38
SAPURING (SAGU PARUT KERING)	37
DAPUR TRADISIONAL	36
KELOMPOK UPAYA PEDULI PERSALINAN FASKES "KELUPAS	28
JUMAT BERKAH	23
TALITANDU (Tabungan Balita Posyandu)	17
Bukan Kempang Biasa, Biar COVID Binasa	0

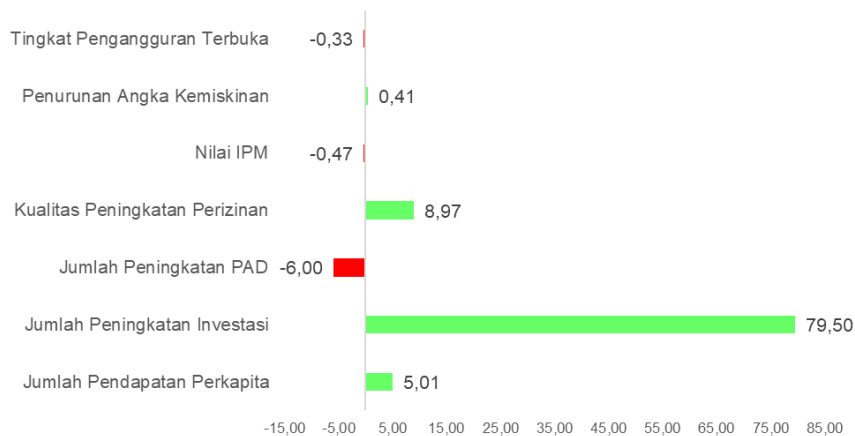
F. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Kuantan Singingi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu sebesar 89%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM masih cukup rendah, yaitu sebesar 33%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



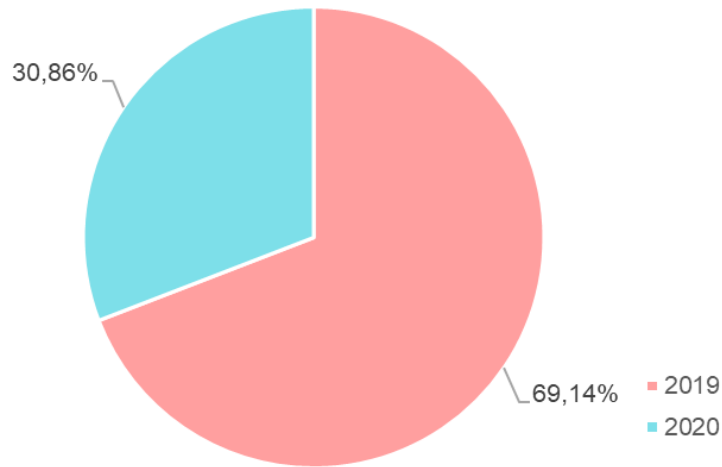
Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Kuantan Singingi

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun masih terdapat 3 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.33%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.33% dibandingkan tahun 2019. Perubahan jumlah pengangguran terbuka ini masih sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik hingga 0.92%. Selain itu, indikator Nilai IPM turun sebesar 0.47% dibandingkan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan PAD turun sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan kedua indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM dan naik sebesar 8% bagi jumlah PAD.

Empat indikator lain mengalami perubahan positif. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.41%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.41% dibandingkan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 8.97%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 8.97% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan sebesar 79.50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita naik sebesar 5.01%. Perubahan keempat indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, naik sebesar 5% bagi jumlah perizinan, naik sebesar 0.45% bagi jumlah investasi, dan turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

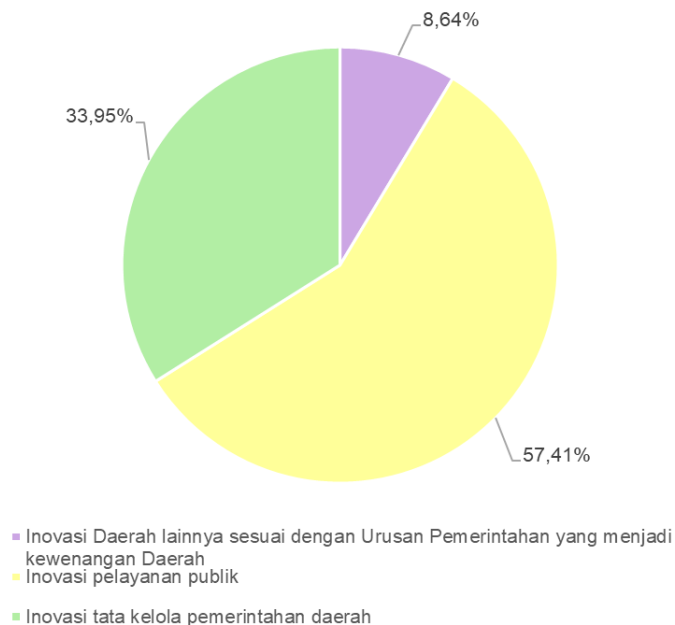
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 112 (69.14%) inovasi dari 162 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sejumlah 50 (30.86%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

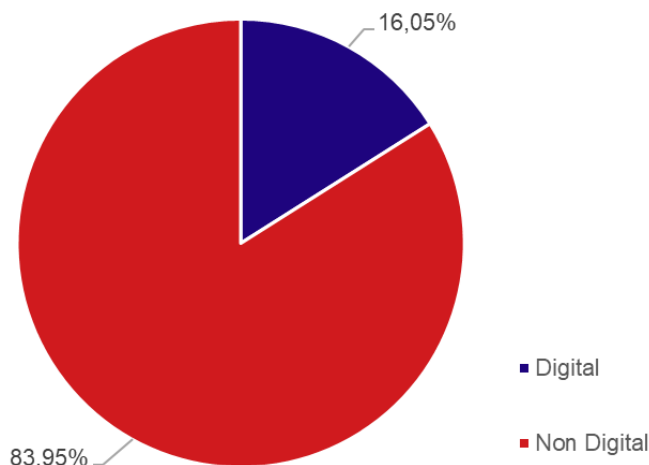


Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kab. Kuantan Singingi merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 93 (57.41%) inovasi

dari total 162 inovasi. Sedangkan sejumlah 55 (33.95%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah, dan 14 (8.64%) inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

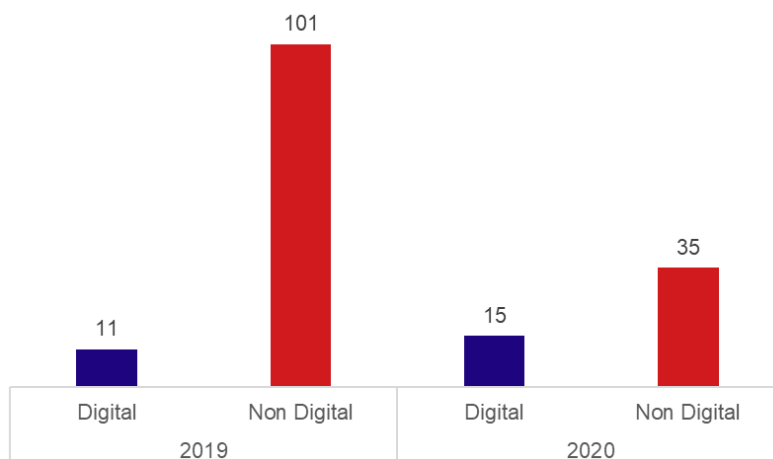
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 136 (83.95%) dari 162 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan inovasi non digital, dan 26 (16.05%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2021.

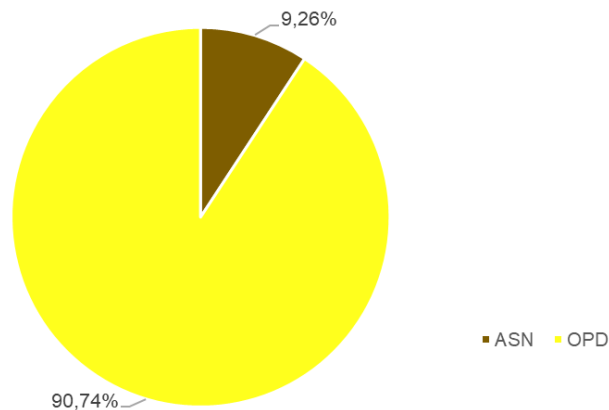
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Kuantan Singingi

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi digital, namun mengalami penurunan pada inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami peningkatan dari 11 inovasi pada tahun 2019, menjadi 15 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan dari 101 inovasi menjadi 35 inovasi.

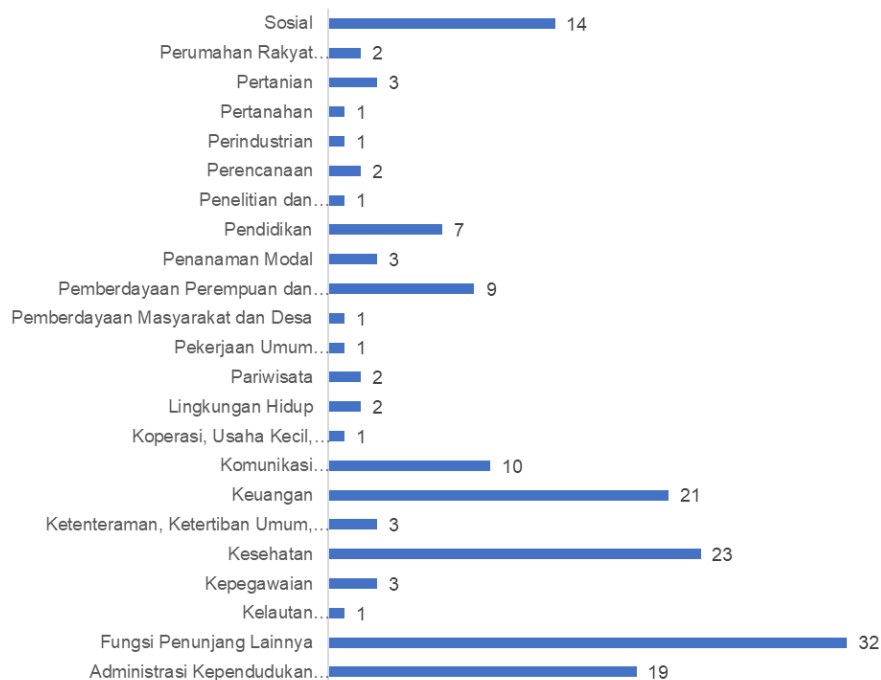
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Kuantan Singingi

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 147 (90.74%) inovasi. Sedangkan sejumlah 15 (9.26%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD, kepala daerah, dan masyarakat.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Kuantan Singingi

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada fungsi penunjang lainnya, yaitu sebanyak 32 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 14 inovasi, urusan

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan 2 inovasi, urusan pendidikan dengan 7 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 1 inovasi, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 3 inovasi, dan urusan kesehatan dengan 23 inovasi.

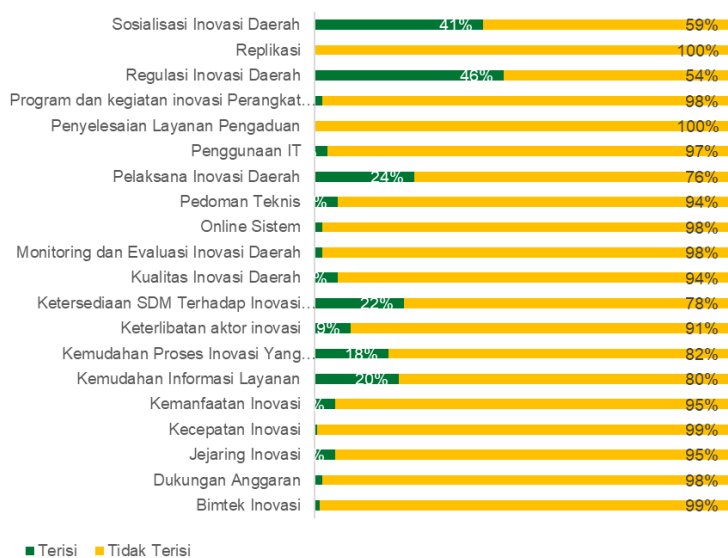
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Kuantan Singingi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 161 (99.38%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, dan hanya 1 (0.62%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Tidak ada inovasi yang dilaporkan yang mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

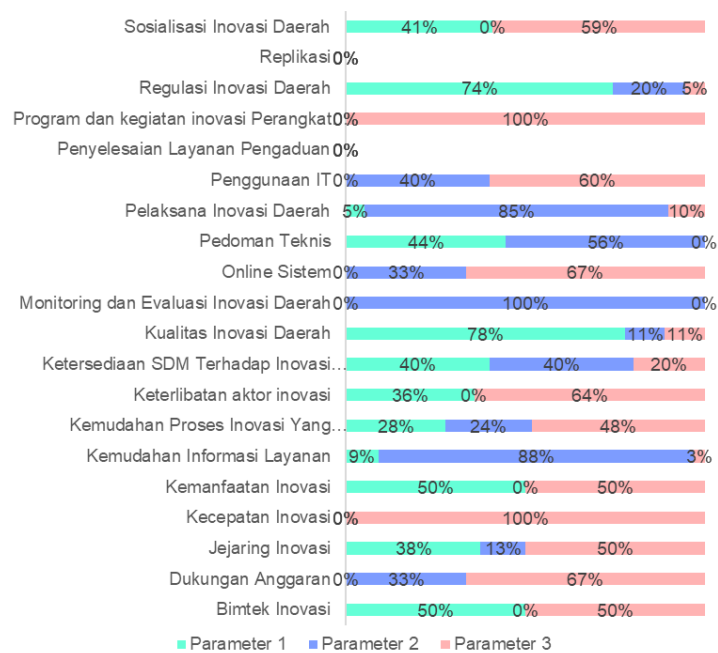
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kuantan Singingi

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 10.62%, artinya dari 162 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 2 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah. Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian sebesar 46%, yang berarti bahwa 75 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kuantan Singingi telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi dan Penyelesaian Layanan Pengaduan, yaitu masing-masing sebesar 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi dan Penyelesaian Layanan Pengaduan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Kuantan Singingi

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dan Kecepatan Inovasi yaitu masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 78%, yang berarti bahwa sebanyak 78% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

j. Daftar Inovasi Kab. Kuantan Singingi beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kab. Kuantan Singingi beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
KOIBEN (KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN BENDAHARA.	95
Pembentukan Kampung Keluarga Berencana	43
PESONA JERING (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KUANTAN TENGAH)	30
MOU PLN Tentang Pemungutan Pajak dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	29
Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Whatsapp (Singingi)	29
POSBINDU KESORGA (POS PEMBINAAN TERPADU KAMIS SEHAT DENGAN BEROLAHRAGA)	29
USILA CERIA (USIA MASA TUA AYOO..CEK KESEHATAN ANDA)	29
Optimalisasi pelayanan publik melalui program inovasi pembangunan daerah "INOVA BUNDA"	28
AJAK (ANTAR JEMPUT AKTE KELAHIRAN) .GUNUNG TOAR	27
CETAR GEMBIRA (CEGAH STUNTING GUNUNG TOAR DENGAN GERAKAN PANTAU TUMBUH KEMBANG, MAKANAN BERGIZI, RAJIN IMUNISASI DAN JAGA KEBERSIHAN)	27
Publikasi dan informasi berbasis teknologi	27
GOTONG ROYONG FASILITAS UMUM BERSAMA WARGA (GUNUNG TOAR)	26
PANGEAN BASILEK (BERSAMA JALIN SILATURAHMI DEMI KEBAIKAN)	26
SIPATEN MAWAR (SISTEM INOVASI PELAYANAN TERPADU KECAMATAN MENYAPA WARGA) .GUNUNG TOAR	26
Kamis Manis (SINGINGI)	25
Singingi Mengaji	25
MOU PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	24
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SINGINGI HILIR TAHUN 2020	24
Coffe Morning /bincang-bincang pagi (Singingi)	23
PEDULI PEKAT (GUNUNG TOAR)	23
Efektivitas pengelolaan tanah pemerintah daerah melalui pembangunan database tanah pemerintah kabupaten berbasis digital	22
GREEN OFFICE (SINGINGI)	22
Peningkatan kinerja layanan penyediaan data base bangunan gedung melalui pelaksanaan sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) berbasis geographoc information system (GIS) di kabupaten kuantan singingi	22
Antar Jemput Akte Kelahiran (AJAK) (Singingi)	21
COFFE MORNING (GUNUNG TOAR)	21

KAMIS BERSIH/KAMIS SEHAT (GUNUNG TOAR)	21
ONE VILLAGE ONE PRODUCT/DESTINATION (SINGINGI)	21
PUBLIKASI DAN PENGADUAN BERBASIS ANDROID (GUNUNG TOAR)	21
SUBUH BERJAMA'AH (GUNUNG TOAR)	21
FRONT OFFICE PELAYANAN (Singingi)	20
MOU dengan Bank Riau kepri (TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN)	20
MoU Kantor wilayah direktorat jenderal pajak Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah	20
SIPATEN MAWAR (Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Menyapa Warga) (Singingi)	20
MONITORING PEKAT, PETI, KARHUTLA, DANA DESA, DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN POKOK	19
FASILITASI PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH (GUNUNG TOAR)	18
JUM'AT BERKAH (GUNUNG TOAR)	18
MAGHRIB MENGAJI (GUNUNG TOAR)	18
OVOP (ONE VILLAGE ONE PRODUCT/DESTINATION) (GUNUNG TOAR)	18
PBB Online (TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)	18
PEMBINAAN AKHLAK BERBASIS SURAU DAN MESJID	18
Reviu RKA OPD melalui Aplikasi e-reviu	18
SOSIALISASI KESEHATAN LINGKUNGAN (GUNUNG TOAR)	18
ZERO COMPLAIN PELAYANAN PUBLIK (GUNUNG TOAR)	18
ANJELIN SIAGA (ANTAR JEMPUT IBU BERSALIN, SEHAT IBU DAN KELUARGA)	17
Data Aplikasi Berbasis Aplikasi (Singingi)	16
JUM'AT BERKAH (SINGINGI)	16
Optimalisasi capaian penemuan kasus TB melalui mak marmut di kabupaten kuantan singingi.	16
Optimalisasi pelayanan rehabilitasi ODGL melalui sistem layanan pengaduan gangguan kejiwaan di kabupaten kuantan singingi (LAPAK KUANSING) berbasis online	16
BIDANG BATANDANG	15
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN UP2K-PKK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	14
Optimalisasi percepatan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan melalui pembentukan tim koordinasi pertanggungjawaban keuangan (TKPK) di bidang kebudayaan pada dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kuantan singingi	14
optimalisasi promosi dan kerjasama investasi melalui tim penyebar informasi investasi potensi daerah di kabupaten kuantan singingi	14

Pembentukan Forum Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Kuantan Singingi.	14
Optimalisasi pelayanan informasi rawan bencana di kecamatan melalui pelopor peduli bencana banjir kabupaten kuantan singingi	13
Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi.	12
CERIA (Camat Berkantor di Desa)	12
Optimalisasi Pengembangan Penyediaan Air Bersih Melalui Program Perencanaan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Kuantan Singingi	12
PANGEAN SATU DATA	12
Peduli TB (Pendampingan Dan Lindungi pasien TB)	12
Pengelolaan Pelayanan Informasi Pembangunan melalui jendela Kuansing Pembangunan pada Website Resmi Pemerintah Kab. Kuansing	12
Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI Melalui Coaching klinik penyelesaian tindak lanjut (klinik petinju) di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi	12
POJOK DESA	12
PUCUK RANTAU EMAS MENCAPAI MUTIARA UJUNG NEGERI (MAJU, UNGGUL, TENTRAM, AGAMIS DAN SEJAHTERA)	12
UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting)(Sapi)	12
REHABILITASI SOSIAL ANAK	11
PATEN KUAN-TENG (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KUANTAN TENGAH)	10
E- Kinerja	8
Optimalisasi layanan data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD melalui digitalisasi data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.	8
OPTIMALISASI PENGURUSAN KARTU KELUARGA BERBASIS ONLINE MELALUI PEMBERDAYAAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	8
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kab. KUANTAN SINGINGI	8
Petunjuk Teknis Aplikasi Siaga Tani	8
Program Pengintegrasian Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Kabupaten Kuantan Singingi	8
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MELALUI TIM KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	6
Fasilitasi untuk disabilitas (kursi roda dan jalur disabilitas)	6
KLINIK BANG KADES KUAN-TENG	6
Payment Point Bank Riau	6
Pojok Bermain Anak	6
Ruang Ibu Menyusui (Ruang Lactasi)	6

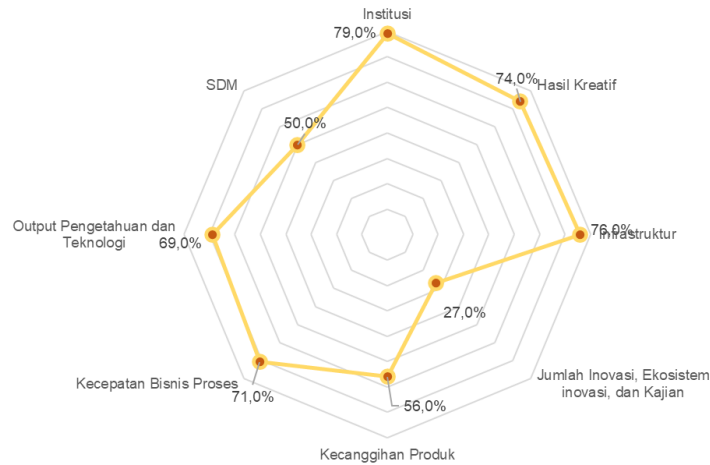
Ruang Kesehatan	6
Ruang Tunggu	6
Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	4
Meja Pengaduan/Rujak Simping (Ruang Konsultasi Pajak dan Retribusi Melayani dan Gratis)	2
Penghargaan kepada kolektor	2
Aplikasi SIPKD Aset	0
Aplikasi SIPKD Pembendaharaan	0
Aplikasi SIPKD Penanggung Jawaban	0
Aplikasi SIPKD Penganggaran (E-Bageting)	0
Display Produksi Unggulan Industri Kecil Dalam Rangka MTQ XXXVIII Tingkat Provinsi Di Kampar	0
E- Monev	0
'Evaluasi Verifikasi dan Monitoring Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	0
Halaman kumpulan informasi	0
Jual beli gas	0
Kasda Online	0
Keg Pemberantasan Sarang Nyamuk dng pelaksanaan 3M Plus & Gerakan 1(satu) rumah 1 (satu) Jumantik (Juru Pemantau Jentik) di 2 Kecamatan (Kec. Sentra dan Kec. Kuantan Tengah)	0
Keg Posbindu ODGJ di masing- masing Puskesmas yang dilaksanakan setiap bulan dng peserta seluruh pasien gangguan jiwa di wilayah kerja masing2 Puskesmas	0
Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan praktik keperawatan NERS kesehatan masyarakat, kebidanan,praktek belajar lapangan ,pengabdian masyarakat,oenelitian dosen dan mahasisiwa STIKes tengku maha ratu pekanbaru	0
Kerjasama antara BPJS ketenaga kerjaan dengan RSUD teluk kuantan tentang pelaksanaan kepersertaan BPJS ketenaga kerjaan bagi tenaga Opendamping orang sakit (POS) BLUD RSUD teluk kuantan	0
Kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian,pengabdian kepada masyarakat,magang,bagi dosen dan mahasisiwa program studi administrasi negara fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi	0
Kerjasama oleh ilmu tinggi kesehatan AL-INSYARAH Pekanbaru dengan RSUD teluk kuantan kab. Kuantan singingi tentang praktik profesi NERS	0
Kesehatan Ibu, Bayi Lahir, Bayi, Balita, Anak dan ASI Eksklusif (KIBLA)	0
Melaksanakan kegiatan Jemput Bola dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dng Klinik Swasta dan RS Ibu dan Anak pada kegiatan Penerbitan Akta Kelahiran bagi Bayi baru lahir sehingga bayi baru lahir langsung dapat NIK & terdaftar pada KK.	0
Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Koorwil Dinas	0

Pendidikan Pemuda & Olahraga se Kab. KS tentang Percepatan Penertiban Akta Kelahiran.	
Melakukan Pembinaan pada Petugas Front Office dalam rangka Perbaikan Mutu Pelayan kepada Masyarakat	0
Memberi Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, Diskriminasi Perlindungan Khusus dan masalah lainnya.	0
Membuat SOP tentang pelaksanaan Reses dan Pengelolaan Website DPRD Kab. Kuansing	0
Memfasilitasi ruangan khusus tenaga ahli fraksi dalam menelaah pokok2 pikiran DPRD	0
Mengkoneksikan aplikasi e-lapor dalam Website	0
Menyediakan Fasilitas Mobil Perpustakaan Keliling bekerjasama dng Dinas Perpustakaan dan Arsip.	0
Menyediakan Fasilitas untuk Disabilitas (Kursi Roda dan Jalur Disabilitas)	0
Menyediakan peralatan penghasil oksigen	0
Menyediakan Ruang Ibu Menyusui (Ruang Lactasi)	0
Menyediakan Ruang Tunggu Pelayanan	0
Optimalisasi Capaian Penemuan Kasus TB melalui MAK MARMUT (Mak Mari Temukan TBC)	0
'Optimalisasi Kebersihan Pasar Lubuk Ambacang melalui Berbelanja sambil memungut sampah untuk menunjang Keindahan Kota	0
Optimalisasi kemitraan pemerintah dan swasta dengan skema tanggung jawab sosial perusahaan pada pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.	0
'Optimalisasi Proses Pengurusan Identitas Anak (KIA) melalui Kerjasama dengan UPT Pendidikan dan Bidan Desa.	0
PELATIHAN AMT	0
Pelayanan Keliling Jemput Bola Perekaman KTP-el Goes To Campus/School	0
Pelayanan Keliling Penertiban Akta Kelahiran di 15 Kecamatan & Desa se Kab. Kuansing	0
Pelayanan Keliling Perekaman KTP -el di 15 Kecamatan & Desa se Kab. Kuansing	0
Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin di Kab. Kuansing	0
Pelayanan Penertiban KIA (Kartu Identitas Anak)	0
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	0
Pemanfaatan Data Wisuda (Wilayah Satu Data) Penerbitan Buku Propil Kependudukan Semester I & II	0
Pembentukan Kelompok BKB Ayah Hebat	0
Pembentukan Tim kelompok kerja operasional (pokjanal) BKB Posyandu padu	0
Pembuatan Aplikasi Reses e- Reses	0
Pembuatan Buku Pedoman Reses	0
Pembuatan Website Sekretariat	0

Pengangkutan sampah domestik	0
Pengangkutan sampah medis dan B3	0
Pengelolaan Informasi Harga Pasar Komunitas Pertanian	0
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 RUMAH TANGGA MELALUI KELOMPOK RUMAH TANGGA PEDULI LIMBAH B3 DI DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	0
Penyediaan Meja Pengaduan/Kotak Saran serta Ruang Konsultasi masalah Administrasi & Kependudukan	0
Penyelenggaraan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) MOW, MOP,IUD dan Implan	0
Penyelesaian Tata Tertib DPRD Periode 2019-2024	0
Perjanjian kerjasama antara dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Kuansing dng 10 Dinas/Badan di Kab. Kuansing tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.	0
Perjanjian Kerjasama dgn UPT Diskes tentang Percepatan Penertiban Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Thn.	0
Radio Online LPPD.Kuansing .go.id	0
SIAKO (Kepangkatan Siap Antar ke OPD)	0
SIDIK (Sistem Manajemen Aparatur Terpadu)	0
Si-Perben	0
SIPETIR (Sistem pelaporan terpadu inten PUPR)	0
Sistem E-Tamu daerah (tepat, nyaman, cepat, akurat, dan hemat)	0
Sistem Informasi Dokumentasi Hukum JDIH.Kuansing.go.id	0
Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kab. KUANTAN SINGINGI	0
Sistem Informasi Kesehatan	0
Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Kab. KUANTAN SINGINGI	0
Sistem Informasi Kota Jalur KotaJalur.Kuansing.go.id	0
Sistem informasi manajemen pembayaran tunjangan guru	0
Sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian (dan) berkelanjutan	0
Sistem informasi manajemen tunjangan profesi guru	0
Sistem pendataan skala nasional yang terpadu dibidang pendidikan dasar dan menengah	0
Sistem pendataan skala nasional yang terpadu pendidikan anak usia dini	0
Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID.Kuansing.go.id	0
Sistem Portal DaerahPortal.Kuansing.go.id	0
Sistem Website Daerah Kab. Kuansing Kuansing.go.id	0
SMART (Sistem Manajemen Aparatur Terpadu)	0
Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)	0
Upaya Perbenihan Ikan Gabus (Channa Striata) dengan Sistim Pemijahan Alami serta Pembesaran (Budidaya) di	0

Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi	
Usila Ceria (Usia Masa Tua Ayoo.... Cek Kesehatan Anda).	0

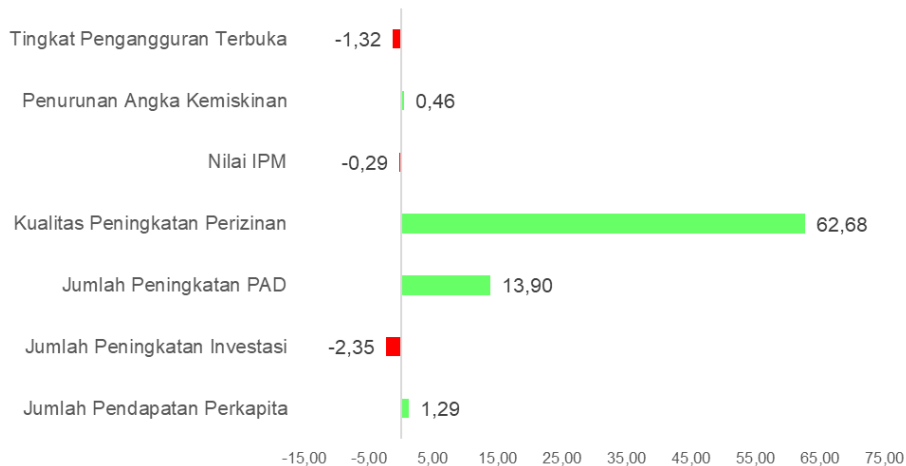
G. KABUPATEN PELALAWAN



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Pelalawan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Pelalawan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu sebesar 79%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 27%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Pelalawan

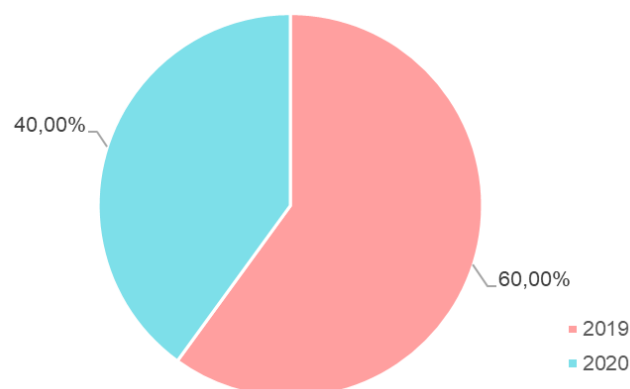
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pelalawan sudah cukup mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun masih terdapat 3 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.32%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.32% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, indikator Nilai IPM turun sebesar 0.29% dibandingkan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi turun sebesar 2.35% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ketiga indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka, tetap bagi nilai IPM, dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi.

Empat indikator lain mengalami perubahan positif. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.46%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.46% dibandingkan tahun 2019. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 62.68%, yang berarti bahwa jumlah perizinan naik sebesar 62.68% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 13.90% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita naik sebesar 1.29%. Perubahan keempat indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, meningkat sebesar 5% bagi jumlah perizinan, meningkat sebesar 8% bagi jumlah PAD, dan turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

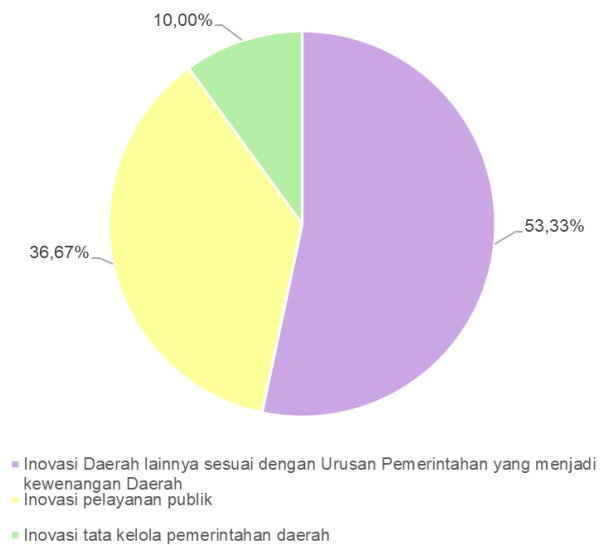
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Pelalawan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pelalawan telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 18 (60%) inovasi dari 30 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sejumlah 12 (40%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

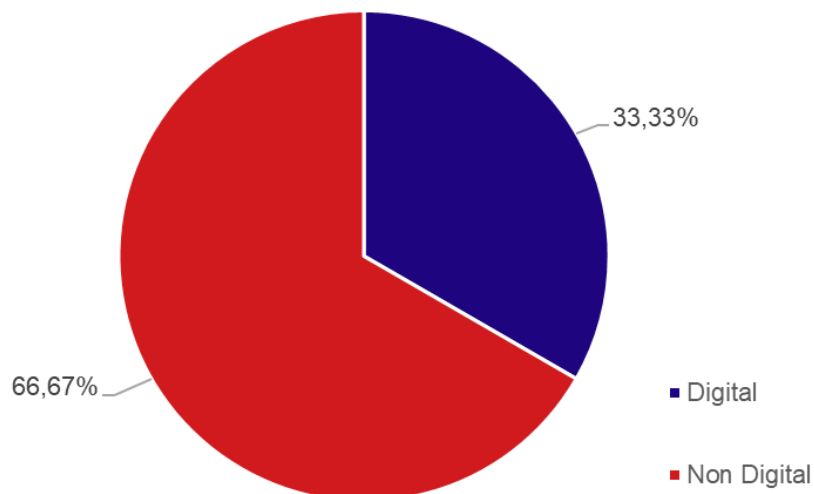
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Pelalawan

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kab. Pelalawan merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebanyak 16 (53.33%) inovasi dari total 30 inovasi. Sedangkan sejumlah 11 (36.67%) inovasi merupakan inovasi pelayanan publik, dan 3 (10%) inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

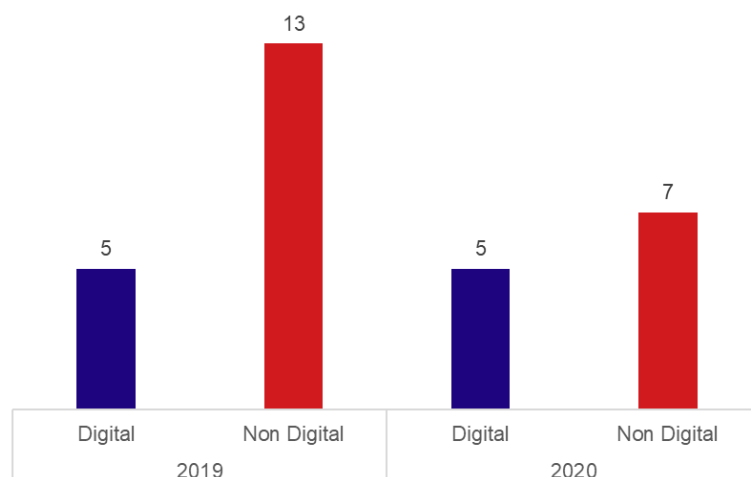
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Pelalawan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 20 (66.67%) dari 30 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Pelalawan merupakan inovasi non digital, dan 10 (33.33%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum ada inovasi jenis teknologi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021.

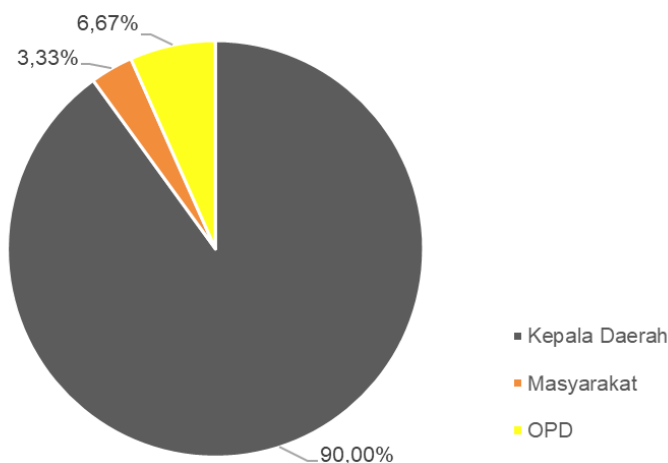
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Pelalawan

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pelalawan tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi digital, namun mengalami penurunan pada inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan tetap sebesar 5 inovasi pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan dari 13 inovasi menjadi 7 inovasi.

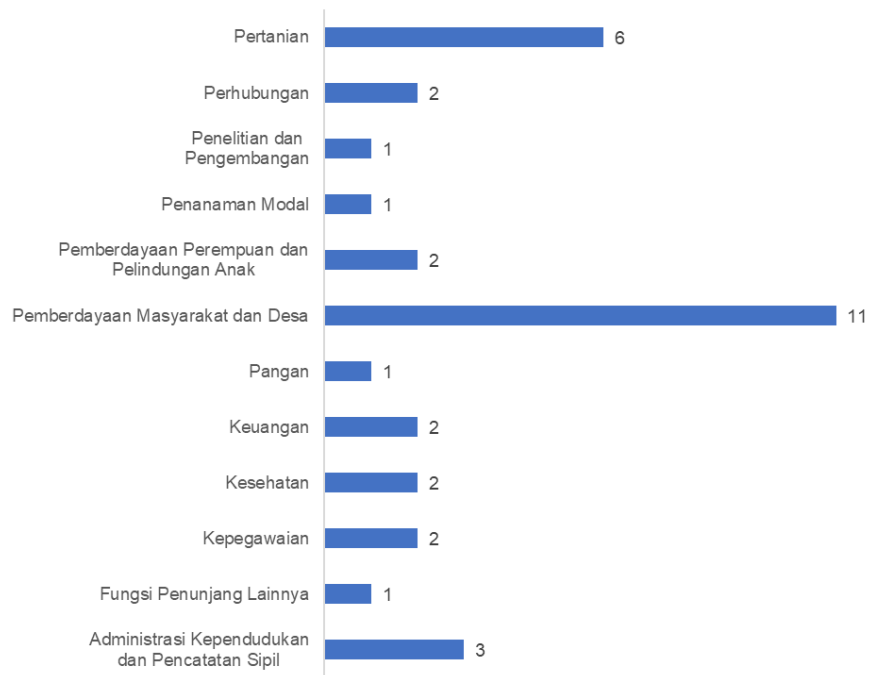
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Pelalawan

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021 diinisiasi oleh kepala daerah, yaitu sejumlah 27 (90 %) inovasi. Sedangkan sejumlah 2 (6.67%) inovasi diinisiasi oleh OPD, dan 1 (3.33%) inovasi lainnya diinisiasi oleh masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan ASN.

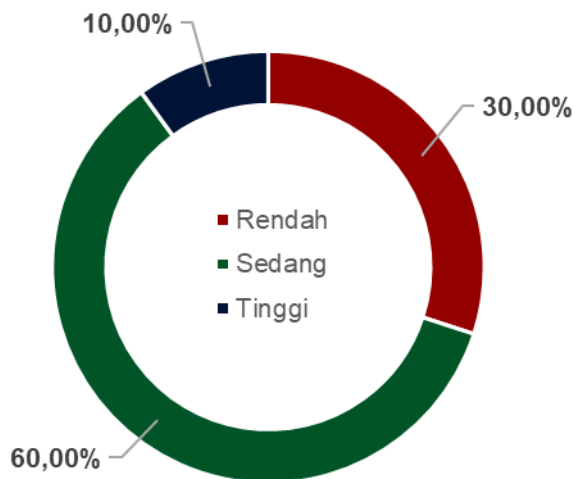
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Pelalawan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Pelalawan berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu sebanyak 11 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 1 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 2 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

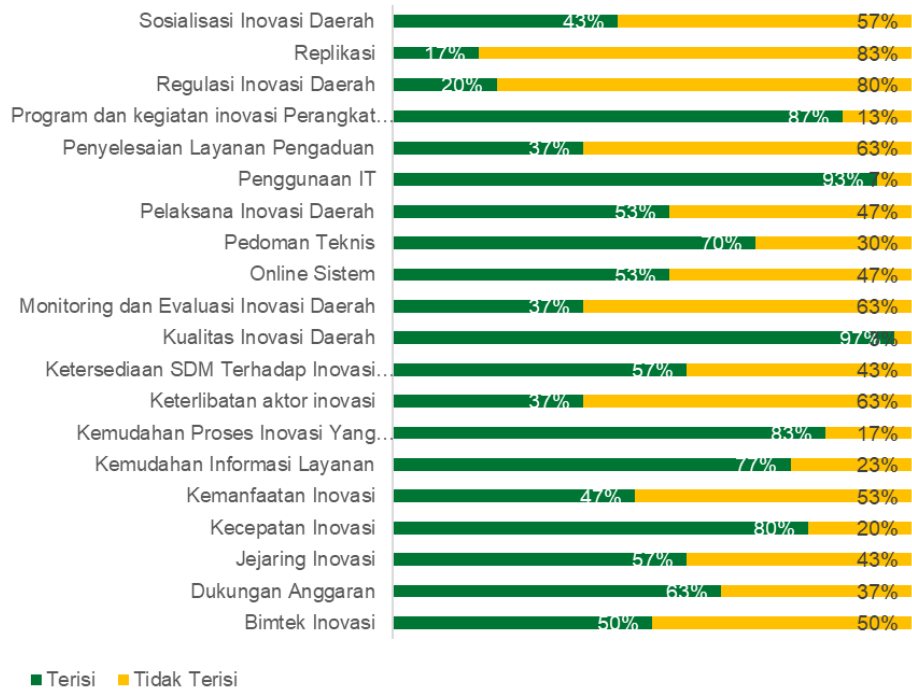


Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Pelalawan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 9 (30%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 18 (60%) inovasi termasuk kategori skor

kematangan sedang, dan 3 (10%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

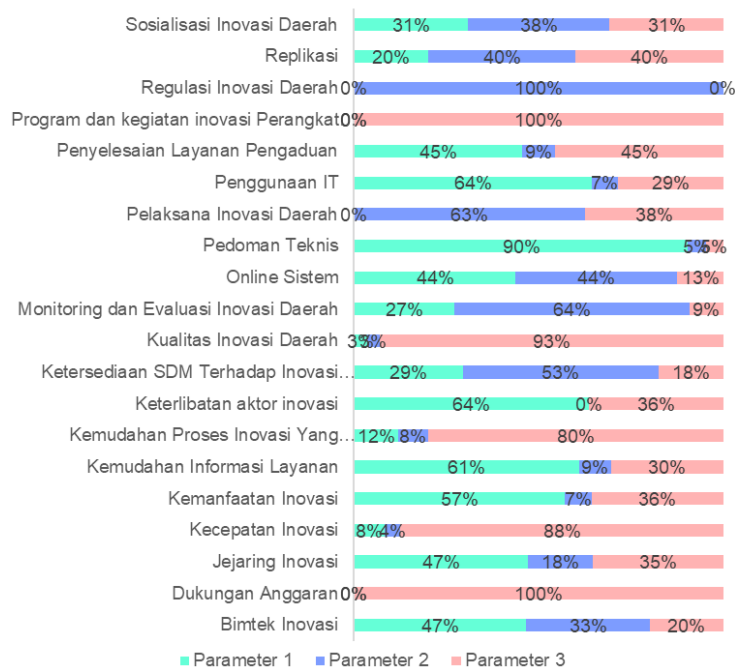


Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Pelalawan

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 57.83%, artinya dari 30 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Pelalawan, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 12 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian sebesar 97%, yang berarti bahwa 29 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pelalawan telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 17%, yang berarti bahwa 5 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Pelalawan

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dan Dukungan Anggaran yaitu masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 90%, yang berarti bahwa sebanyak 90% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

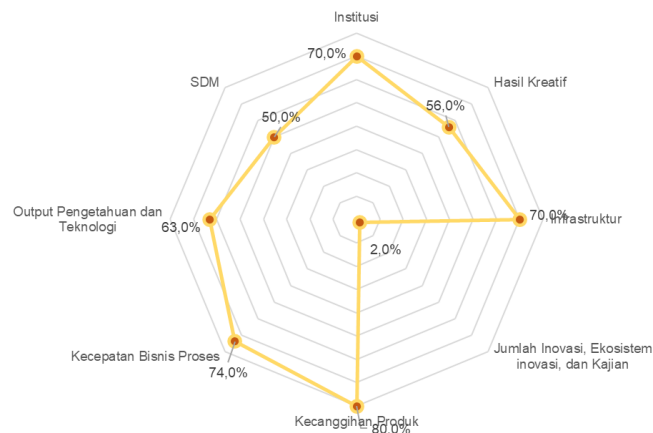
j. Daftar Inovasi Kabupaten Pelalawan beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Pelalawan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
DPMPPTSP PINTAR (DPMPPTSP Pelayanan Perizinan Kecamatan Terintegrasi)	120
SABER KE PETANG JEBOL (Semua Administrasi Kependudukan Beres Ketika Petugas Datang Jemput Bola)	110
APLIKASI SIBADIK (Sistem Informasi Bantuan Pendidikan)	106
Aplikasi KIR Pelalawan berbasis android	97
Remt Bolling System (Reduced Time Test by Automatical Controlling System)	94
LAMBE KELING (Layanan Metode KB Keliling)	93

GELAY SI LING LING (Gerak Cepat Pelayanan Konsultasi dan Konseling Keliling)	92
BIO-SIP (Pupuk Organik Cair)	86
SELEMBAYUNG MELAYU (Selamatkan Lindungi Masyarakat dari Bahaya Pasung Melalui Pelayanan Terpadu)	83
PBB P2 Melon	82
Parut Multi Guna	78
PeDes Nasi (Penilaian Desa Inovasi)	78
Alat Pengering Pinang	74
ANJEP GRATIS (Antar Jemput Pasien Rawat Jalan Gratis)	69
Pencacah Rumput (CR ROZY OK)	64
ALPRES COCONUT MILK KK	60
Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM ASET) Online	60
Proliga Gertambe (Produksi Lipat Ganda melalui Gerakan Tanam Cabe 2 Ha Per Desa/Kelurahan)	58
Satu Berkas Minimal Empat Produk (SABER MEMPRO)	55
APEL E3 ZI Serba Guna	54
Alat Penghemat Listrik	51
"Mesin Pamarut & Pengiris E2 (MPP E2)"	49
Alat Pembelah Pinang (Pacep)	48
MESIN PEMIPIL JAGUNG	40
SIMPEG (Sistem Manajemen Kepegawaian) Online	38
WAK UNGGAL SAKTI (Ado Warga Kito Sudah Meninggal Segera Akta Kematian Terbit)	38
Mesin Pemecah Jagung (Hammer Mill)	36
SEJA ROMI (Alat Penampi Serbaguna)	34
ROMPI MAGNETIK (ROTIK)	33
LAKU (Layanan Administrasi Kepegawaian Terpadu)	25

H. KABUPATEN ROKAN HILIR



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Rokan Hilir

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Rokan Hilir memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu sebesar 80%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah, yaitu sebesar 2%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



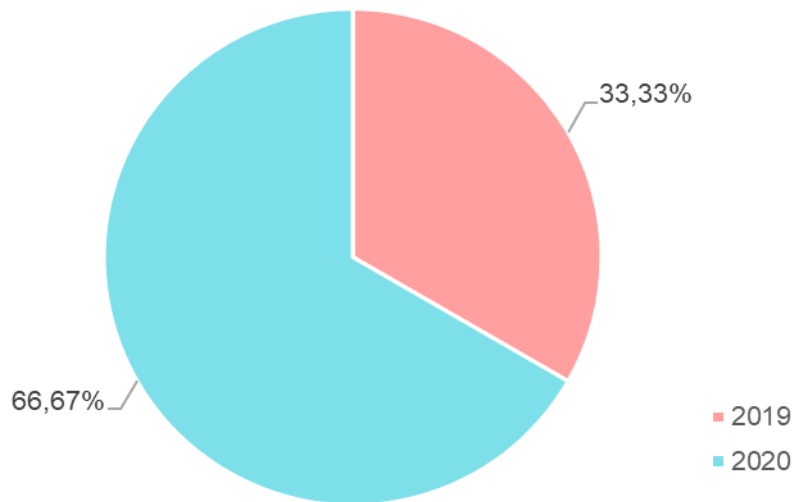
Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Rokan Hilir

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun masih terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 5.76%, sedangkan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 5.53%. Perubahan kedua indikator ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat 8% bagi jumlah PAD dan turun hanya sebesar 1.85% bagi pendapatan perkapita. Selain kedua indikator tersebut, indikator Jumlah Peningkatan Investasi tidak mengalami peningkatan, yang berarti bahwa jumlah investasi pada tahun 2020 sama dengan jumlah investasi di tahun 2019.

Empat indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan sebesar 1.13%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka turun sebesar 1.13% dibandingkan tahun 2019. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.29%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.29% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 0.62% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 187,2%. Perubahan keempat indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka, turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, tetap bagi nilai IPM, dan meningkat sebesar 5% bagi jumlah perizinan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

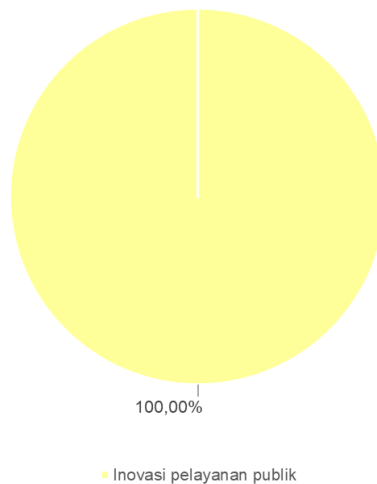
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hilir telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 4 (66.67%) inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020 dan sejumlah 2 (33.33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

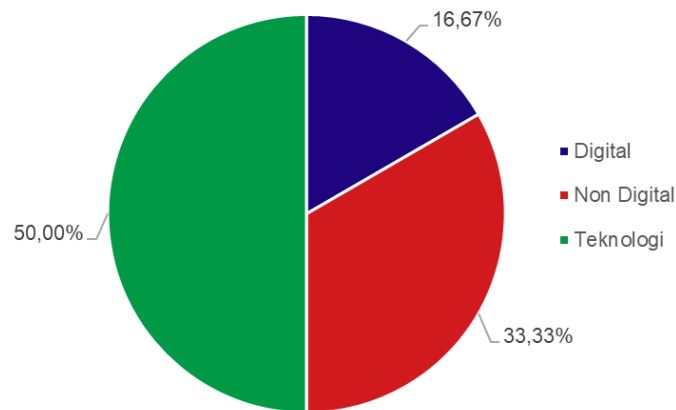
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Berdasarkan bentuk inovasi, semua inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hilir merupakan inovasi pelayanan publik. Belum terdapat inovasi tata kelola pemerintah daerah dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaporkan tahun 2021.

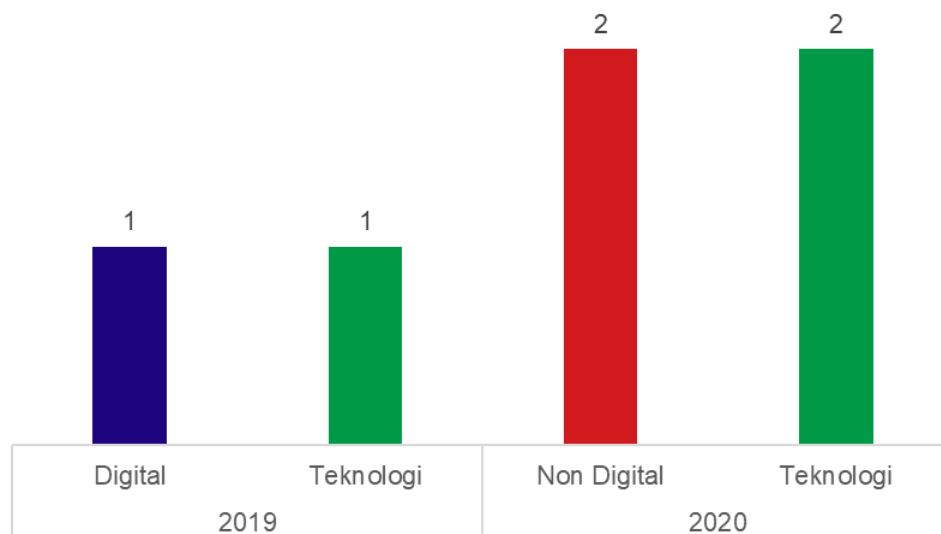
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 3 (50%) dari 6 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Rokan Hilir merupakan inovasi teknologi, sedangkan 2 (33.33%) inovasi merupakan inovasi non digital, dan 1 (16.67%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

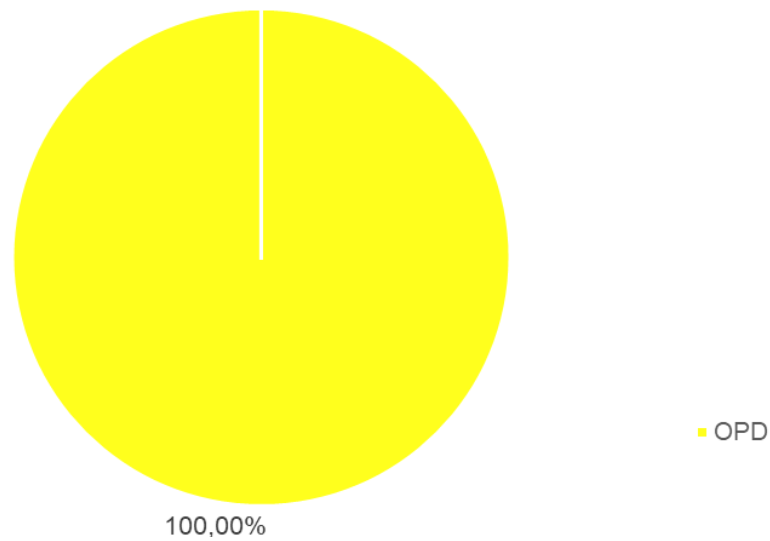
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Rokan Hilir

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hilir mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi teknologi dan inovasi non digital, namun mengalami penurunan pada inovasi digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan mengalami penurunan dari 1 inovasi pada tahun 2019, menjadi tidak ada inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dari tidak ada inovasi di tahun 2019 menjadi 2 inovasi, dan inovasi teknologi mengalami peningkatan dari 1 inovasi di tahun 2019 menjadi 2 inovasi di tahun 2020.

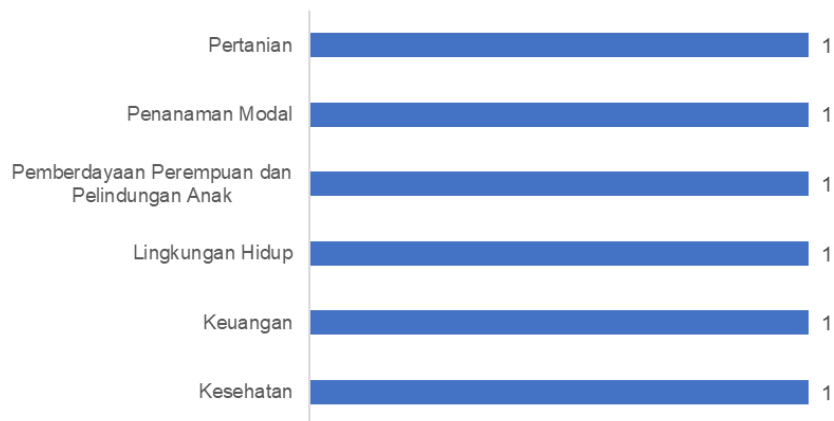
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Rokan Hilir

Semua inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh kepala daerah, DPRD, ASN, dan masyarakat.

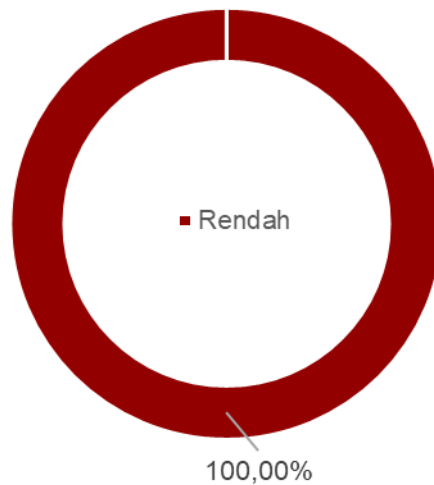
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Rokan Hilir

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan urusan pemerintahan sangat merata dengan masing-masing sebesar 1 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 1 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 1 inovasi.

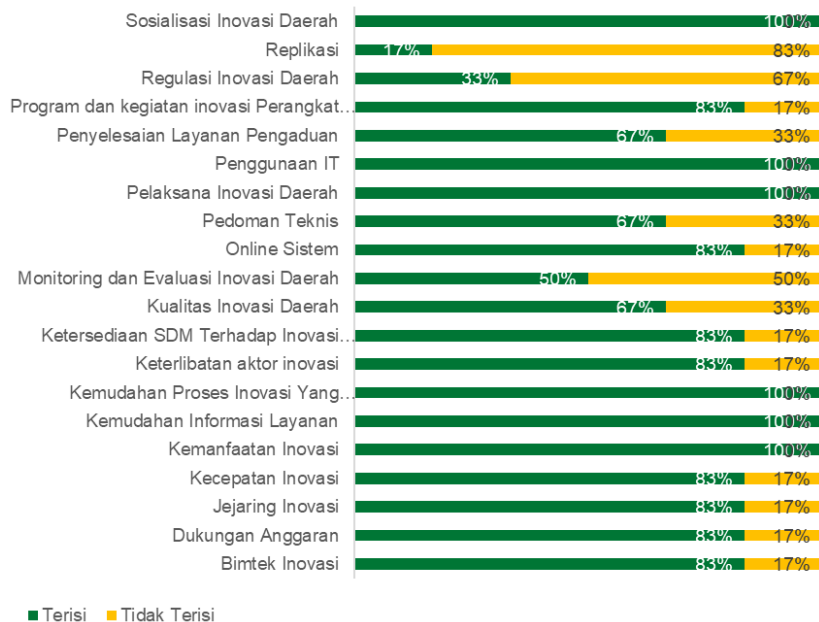
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Rokan Hilir

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hilir termasuk dalam skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

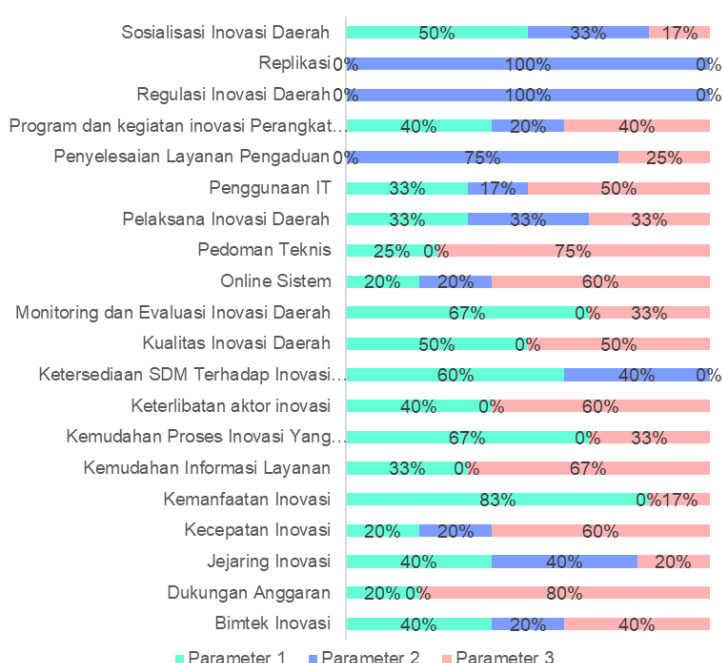


Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hilir

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 78.33%, artinya dari 6 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hilir, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 16 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Inovasi dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hilir telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 17%, yang berarti bahwa hanya 1 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hilir

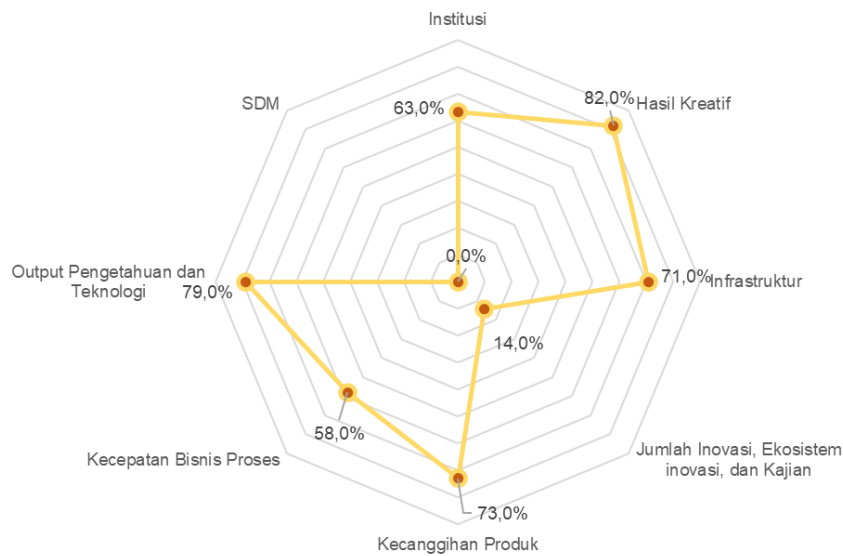
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 80%, yang berarti bahwa sebanyak 80% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi yaitu sebesar 83%, yang berarti bahwa sebanyak 83% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hilir beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hilir beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SILINDA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir	25
Kasih Sayang Ibu	15
Klik Layanan Publik Pengaduan Masyarakat	5
TAMAN EDUKASI PERTANIAN	5
Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	2
E-BPHTB, E-SPTPD, SIMPATDA	0

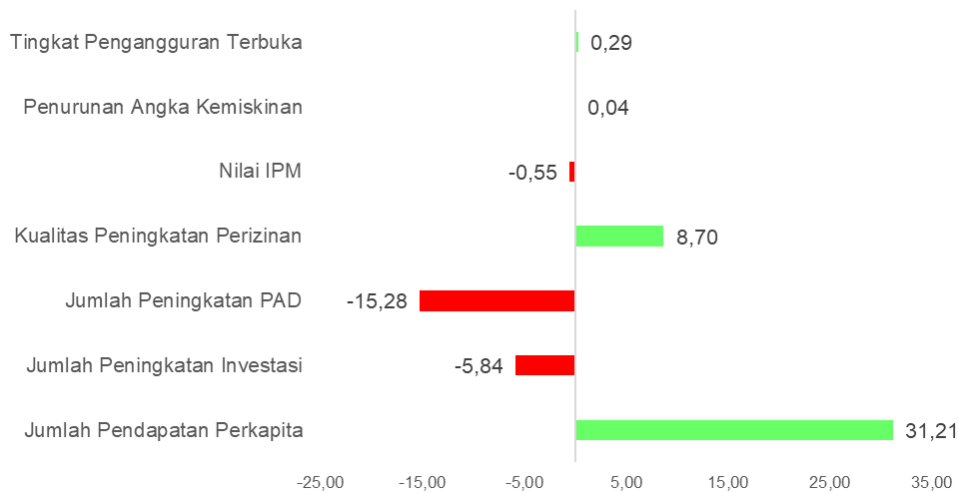
I. KABUPATEN ROKAN HULU



Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Rokan Hulu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Rokan Hulu memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 82%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dan variabel SDM masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 14% dan 0%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



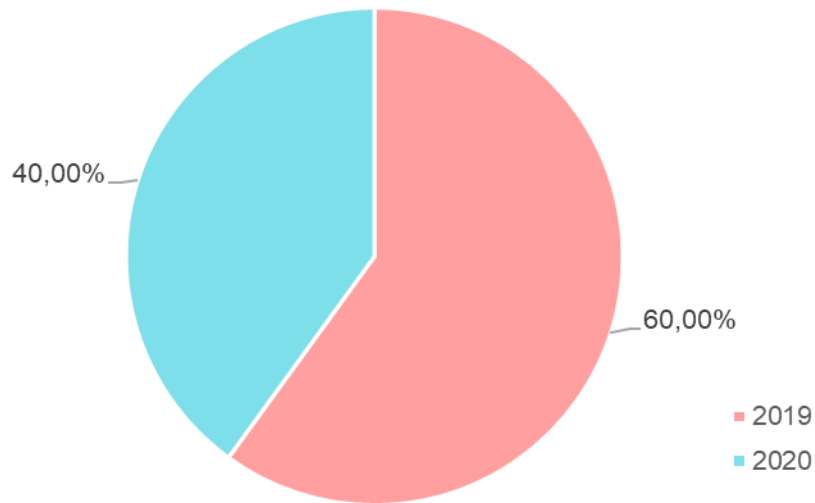
Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Rokan Hulu

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun masih terdapat 3 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Pada tahun 2020, indikator Nilai IPM mengalami penurunan sebesar 0.55% dibandingkan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 15.28% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 5.84%, yang berarti bahwa jumlah investasi turun sebesar 5.84% dibanding tahun sebelumnya. Perubahan ketiga indikator ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya tetap bagi nilai IPM, meningkat sebesar 8% bagi jumlah PAD, dan dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi.

Empat indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan sebesar 0.29%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka turun sebesar 0.29% dibandingkan tahun 2019. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.04%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.04% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 8.7%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita naik sebesar 31.21% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan keempat indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka, turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, meningkat sebesar 5% bagi jumlah perizinan, dan turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

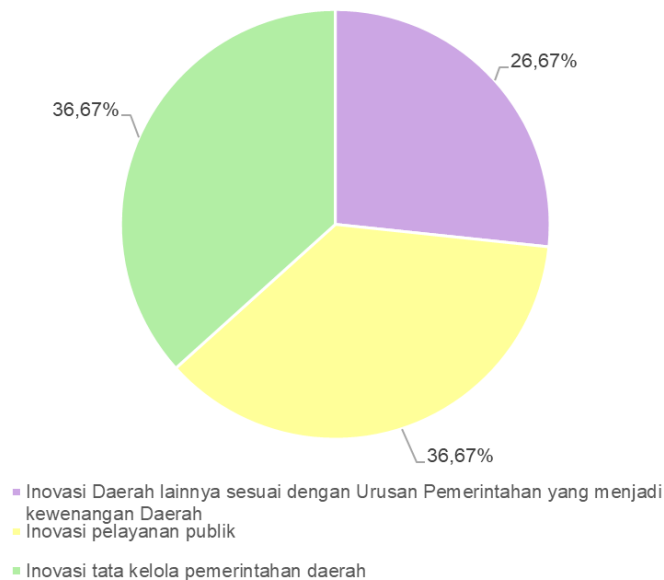
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hulu telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 18 (60%) inovasi dari 30 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sejumlah 12 (40%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

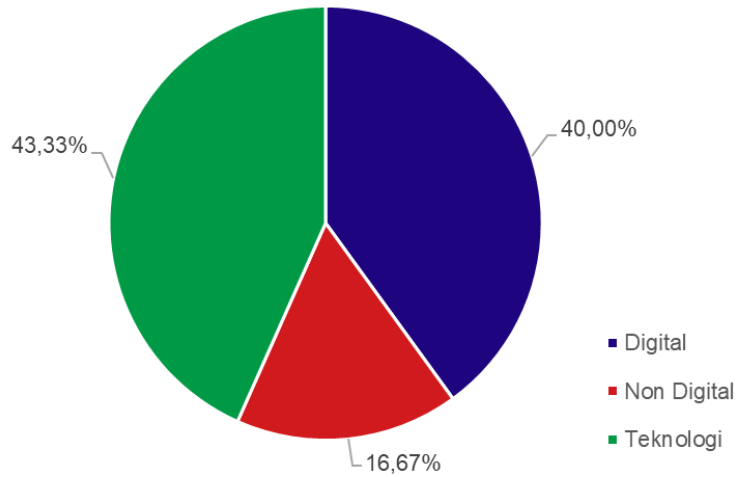


Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hulu merupakan inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola

pemerintahan daerah, yaitu masing-masing sebanyak 11 (36.67%) inovasi. Sedangkan sejumlah 8 (26.67%) inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

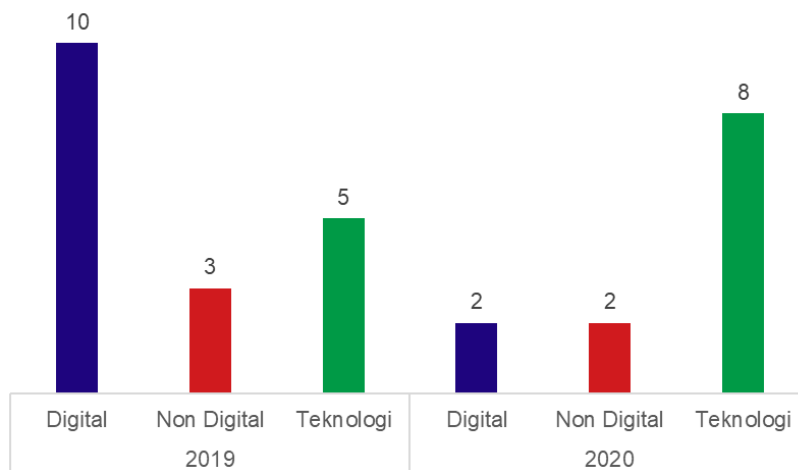
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (16.67%) dari 30 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Rokan Hulu merupakan inovasi non digital, 12 (40%) inovasi merupakan inovasi digital, dan 13 (43.33%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

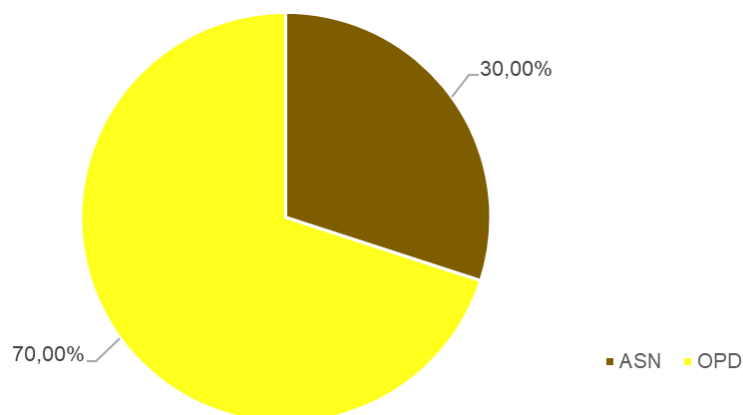


Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Rokan Hulu

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi teknologi, namun mengalami penurunan pada inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi teknologi yang diterapkan naik dari 5 inovasi pada tahun 2019 menjadi 8 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi non

digital mengalami penurunan dari 3 inovasi menjadi 2 inovasi, dan inovasi digital mengalami penurunan dari 10 inovasi menjadi 2 inovasi.

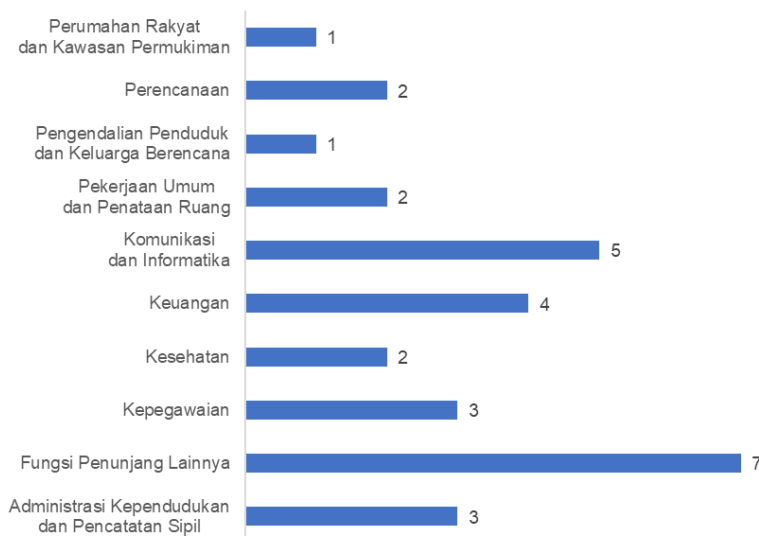
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Rokan Hulu

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 21 (70%) inovasi. Sedangkan sejumlah 9 (30%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD, ASN, dan masyarakat.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

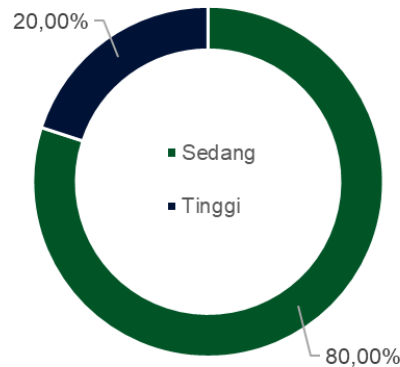


Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Rokan Hulu

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada fungsi penunjang lainnya, yaitu sebanyak 7 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 1

inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 2 inovasi, dan urusan kesehatan dengan 2 inovasi.

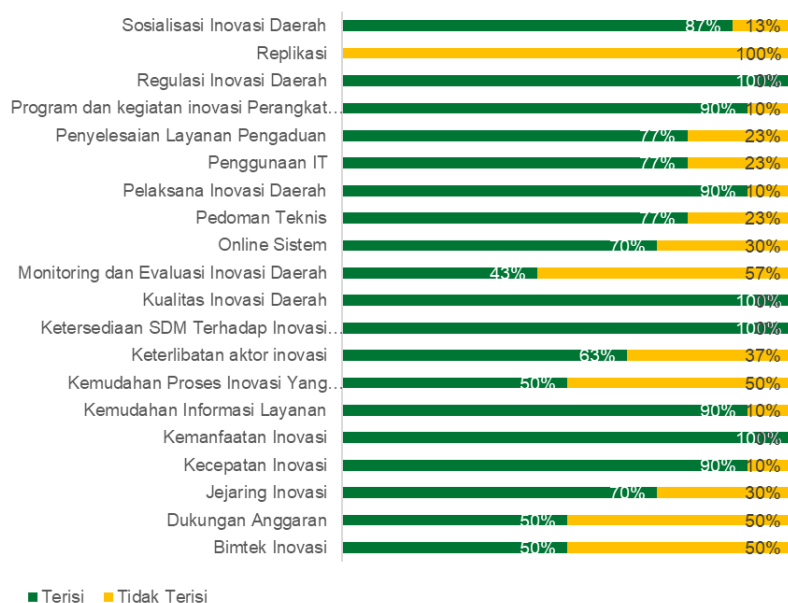
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Rokan Hulu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 24 (80%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 6 (20%) inovasi lainnya telah mencapai skor kematangan tinggi. Belum ada inovasi yang dilaporkan Kabupaten Rokan Hulu yang termasuk dalam skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

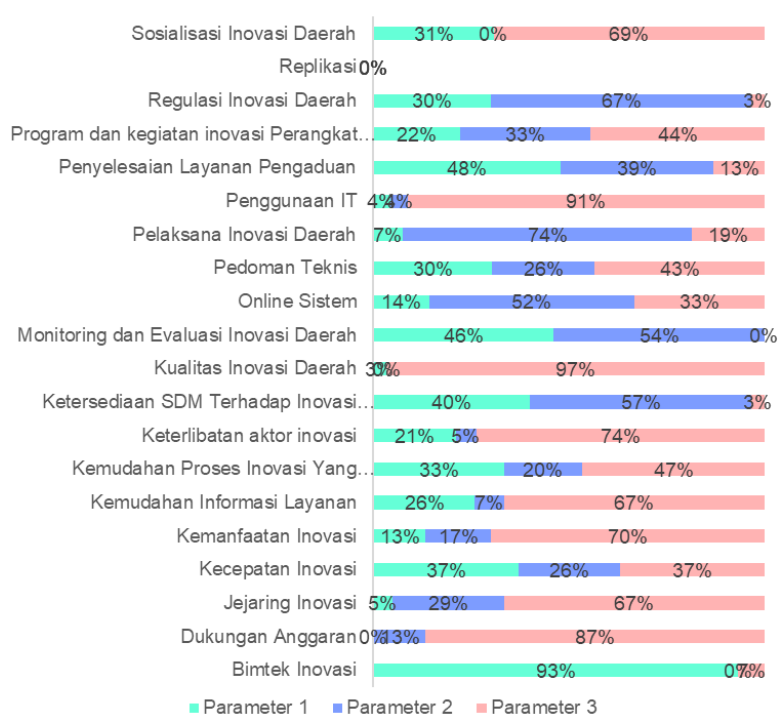


Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hulu

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 73.67%, artinya dari 30 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 15 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Rokan Hulu telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Rokan Hulu

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 97%, yang berarti bahwa sebanyak 97% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 74%, yang berarti bahwa sebanyak 74% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi yaitu sebesar 93%, yang berarti bahwa sebanyak 93% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

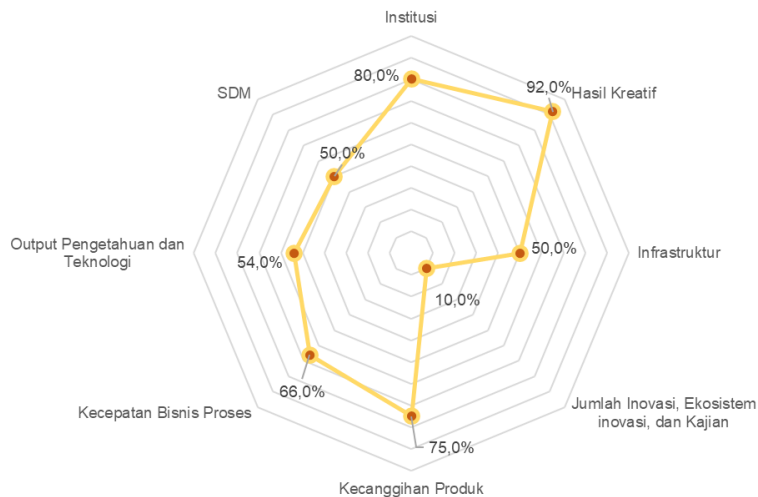
j. Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Kabupaten Rokan Hulu beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
ROKAN HULU SMART ACCESS (ROSA)	119
ROKAN HULU SMART ACCESS	117
NEW PSC 119 ROKAN HULU	112
KASIPELIKAT	110
Aplikasi Dashboard corona dalam pengelolaan data dan informasi pada Posko Terpadu Covid-19 Kabupaten Rokan Hulu (SIDAVID-19)	103
Sistem Informasi Layanan Pengaduan Perizinan Terintegrasi Secara Online (SIMPONI)	102
Sistem Registrasi Terpadu (SIRATU) Peserta Diklat Di UPTB Balai Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu	97
e-MONEP+	94
Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Irigasi Melalui Pengalihan Pengelolaan Dana Operasional Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai (P3A) Di Kabupaten Rokan Hulu	92
BPHTB Online	90
Sistem Informasi Layanan Pengaduan Perizinan terintegrasi Secara Online	89
Sistem Informasi Pelaporan (SIMPEL) PBB-P2	85
Pelayanan Cetak Langsung Di Kecamatan (Pecel Mantan)	84
Pelayanan Cetak Langsung Di Desa (PECAL DESA)	82
SELINDIT (Sistem Elektronik Layanan Informasi Tender)	81
Pelayanan Administrasi Desa Berbasis IT "SIPADE" dan Informasi Desa Berbasis IT	79
COACHING CLINIC INSPEKTORAT DAERAH	76
Aplikasi Pembayaran PDL Host To Host Bapenda dengan BRK	76
Optimalisasi Pembangunan Gedung Pemerintah Melalui Program Pembinaan Konstruksi Bangunan Gedung Pemerintah Di Kabupaten Rokan Hulu	75
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) BERBUDI	75
Optimalisasi sistem penggajian melalui operasionalisasi aplikasi sim gaji	74
Optimalisasi Sistem Pengajian Melalui Operasionalisasi Aplikasi Sim Gaji Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu	73
Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Irigasi Melalui Pengalihan Pengelolaan Dana Operasional Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai (P3A) Di Kabupaten Rokan Hulu	73
COACHING CLINIC INSPEKTORAT DAERAH	72
Fasilitas Pelaksanaan Pramusdes	69
Fasilitasi pelaksanaan Pra Musyawarah Desa	69

Aplikasi Pengelolaan Administrasi Kontrak (SIKAP)	65
Pendataan Keluarga	65
Sistem Penilaian Kinerja Teknis Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu (Aplikasi Trello)	59
SISTEM APLIKASI KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI	51

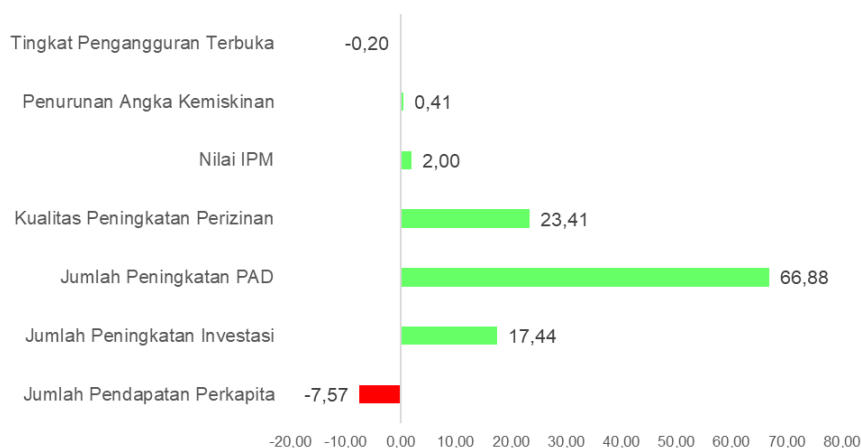
J. KABUPATEN SIAK



Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kab. Siak

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Siak memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 92%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah, yaitu sebesar 10%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



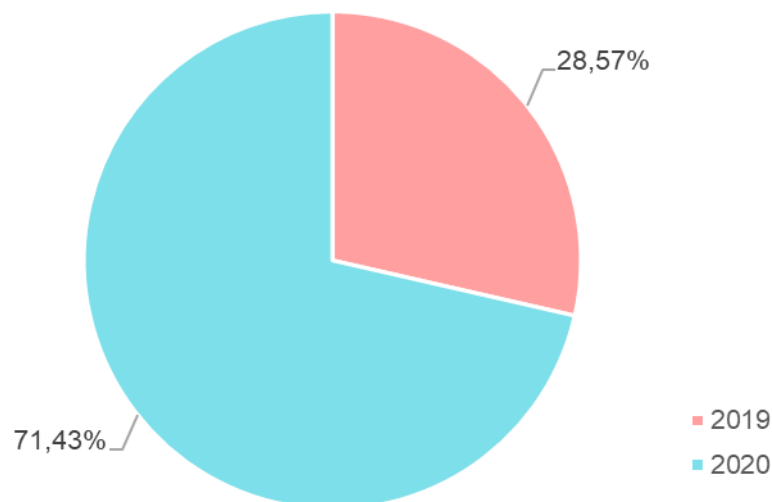
Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kab. Siak

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Siak sudah cukup mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun masih terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.20%, hal ini berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 0.20% dibandingkan dengan tahun 2019. Perubahan ini masih sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat hingga 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 7.57% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun hanya sebesar 1.85%.

Lima indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.41%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.41% dibandingkan tahun 2019. Indikator Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 23.41%, yang berarti bahwa jumlah perizinan meningkat sebesar 23.41% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Jumlah Peningkatan PAD naik cukup signifikan, yaitu sebesar 66.88% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan sebesar 17.44% dibanding tahun sebelumnya. Perubahan kelima indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, tetap bagi nilai IPM, meningkat sebesar 5% bagi jumlah perizinan, meningkat sebesar 8% bagi jumlah PAD, dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

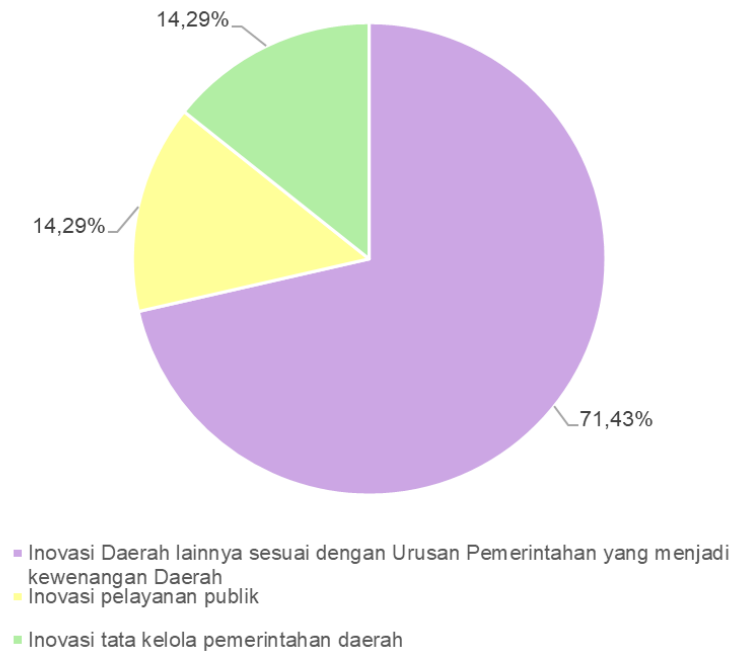
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kab. Siak

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Siak telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 10 (71.43%) inovasi dari 14 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020 dan sejumlah 4 (28.57%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

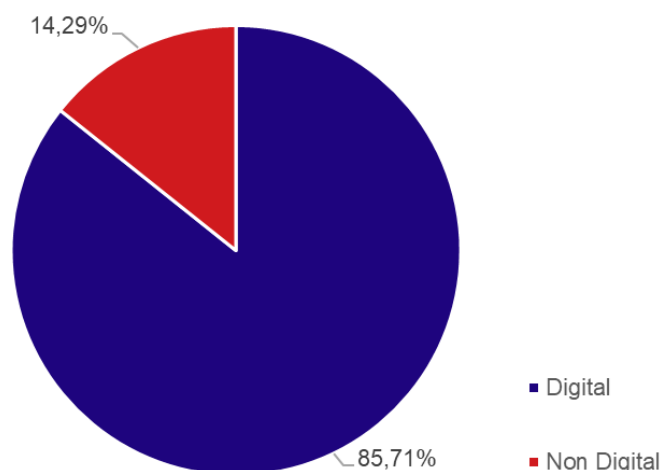
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kab. Siak

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Siak merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebanyak 10 (71.43%) inovasi. Sedangkan inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah masing-masing sebanyak 2 (14.29%) inovasi.

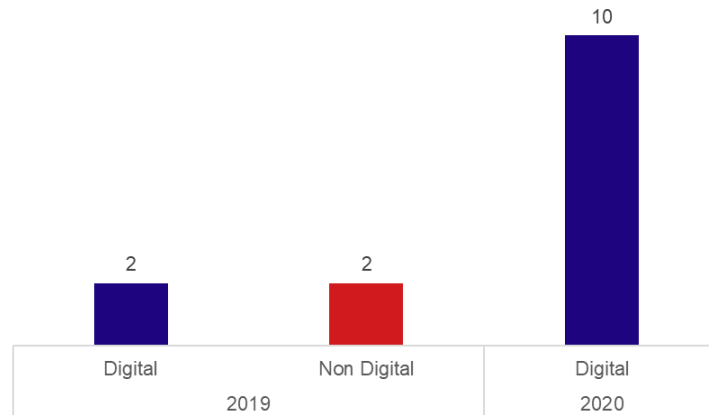
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kab. Siak

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (14.29%) dari 14 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Siak merupakan inovasi non digital, dan 12 (85.71%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum terdapat inovasi teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

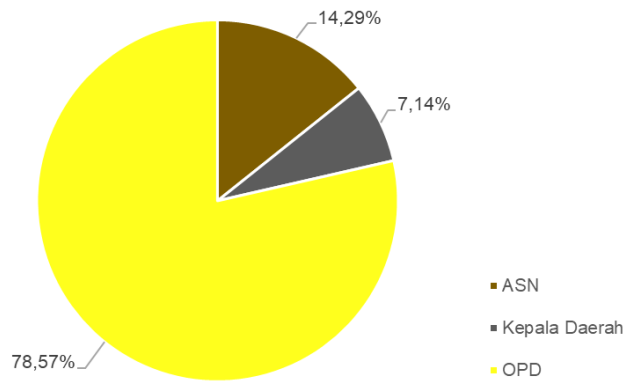
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kab. Siak

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Siak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi digital, namun mengalami penurunan pada inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital yang diterapkan berkurang dari 2 inovasi pada tahun 2019 menjadi tidak ada inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi digital mengalami penambahan dari 2 inovasi menjadi 10 inovasi.

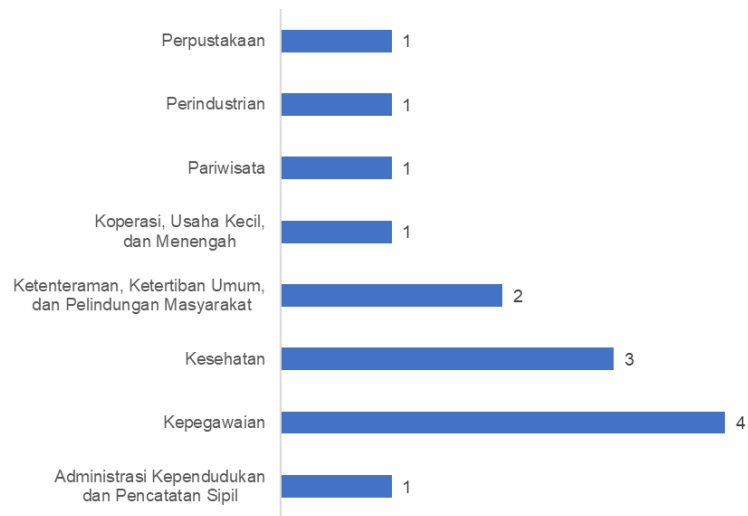
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kab. Siak

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Siak pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 11 (78.57%) inovasi. Sedangkan sejumlah 2 (14.29%) inovasi diinisiasi oleh ASN, dan 1 (7.14%) inovasi lainnya diinisiasi oleh kepala daerah. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan masyarakat.

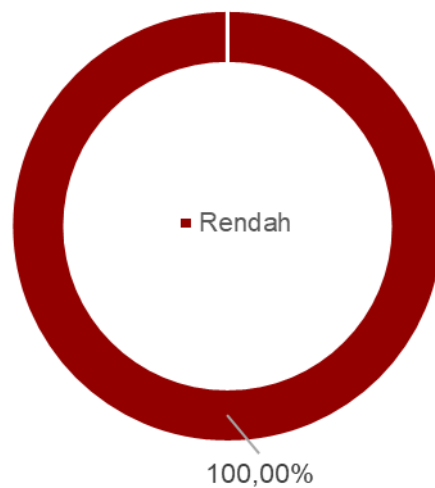
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kab. Siak

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Siak berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kepegawaian, yaitu sebanyak 4 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 2 inovasi, dan urusan kesehatan dengan 3 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

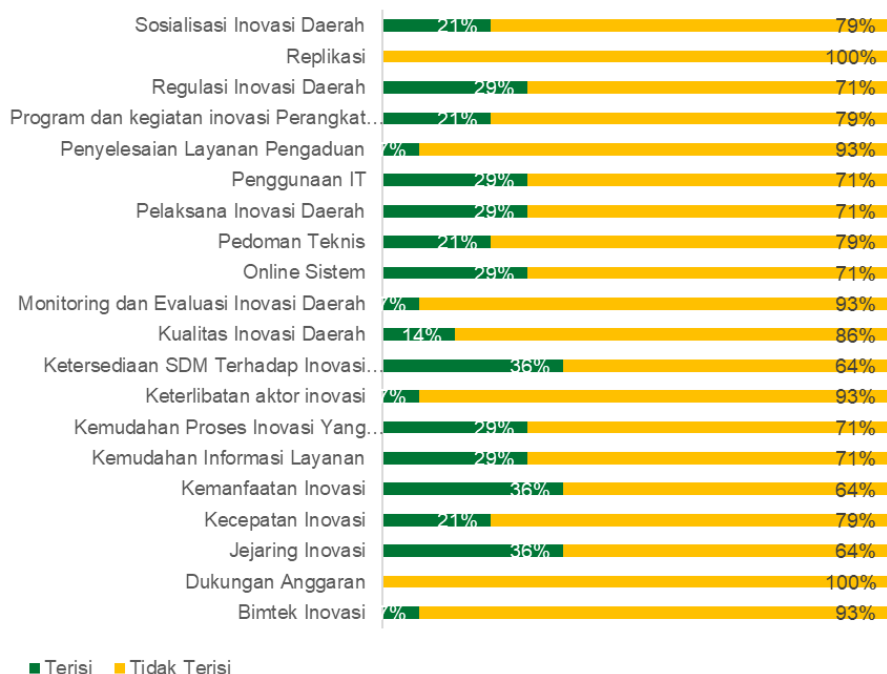


Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kab. Siak

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, semua inovasi termasuk dalam kategori skor kematangan rendah. Belum ada inovasi yang dilaporkan Kabupaten Siak yang termasuk dalam skor kematangan sedang atau tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor

kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

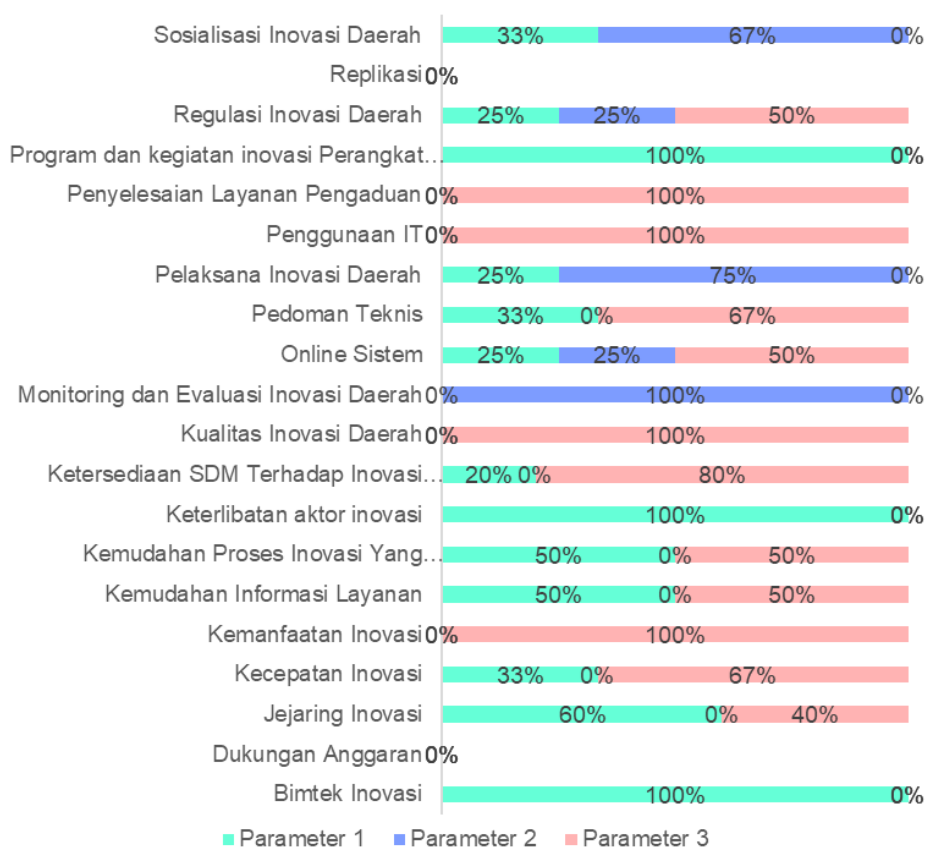


Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Siak

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 20.36%, artinya dari 14 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kabupaten Siak, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 4 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi Daerah, dan Jejaring Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 36%, yang berarti bahwa sebanyak 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Siak telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi dan Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 0%, yang berarti bahwa tidak ada inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi dan Dukungan Anggaran.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kab. Siak

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi yaitu masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Bimtek Inovasi yaitu masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

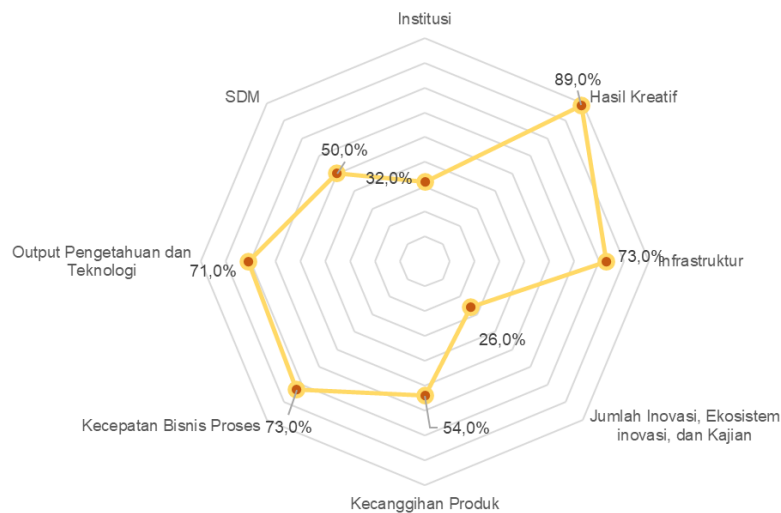
j. Daftar Inovasi Kabupaten Siak beserta Skor Kematangannya

Tabel 11 Daftar Inovasi Kabupaten Siak beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAK)	33
Sistem Informasi Hukum Kabupaten Siak	6
SILAU	27

PERUBAHAN KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH	14
Absensi online (smartphone)	41
Portal Absensi Pegawai Kabupaten Siak	0
Penerapan penyimpanan data pegawai Non ASN dan Informasi DIKLAT Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dengan membangun aplikasi (SICOMEL)	0
Inovasi ini dibuat agar wisatawan yang akan dan ingin datang ke Kabupaten Siak dapat mengetahui objek wisata yang ada di Kabupaten Siak	0
Perpustakaan Digital Siak (E-Pusdasiak)	0
Penerapan data terkait Covid-19 dengan membangun Portal Informasi Covid-19	0
Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Perda (SIPLA)	0
LAPISKU (Layanan Pengingat Suara Kunjungan Ulang)	0
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING ITS BAT NIKAH	0
APLIKASI ONLINE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPI)	0

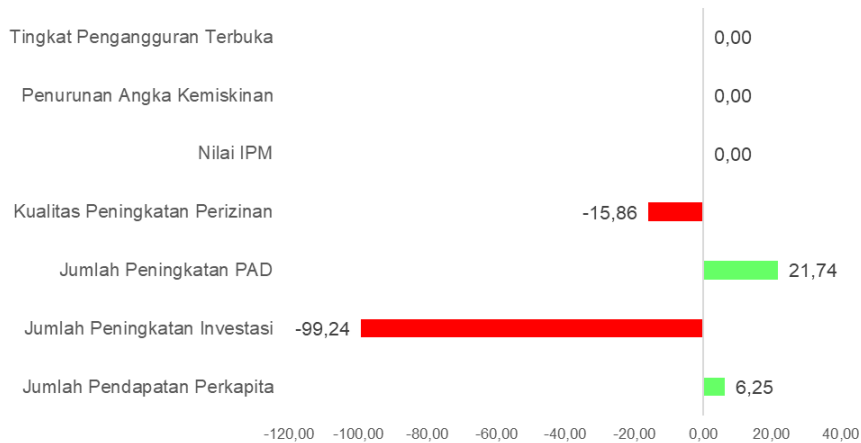
K. KOTA DUMAI



Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Dumai

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Dumai memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 89%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Institusi dan variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu masing-masing sebesar 32% dan 26%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variabel-variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



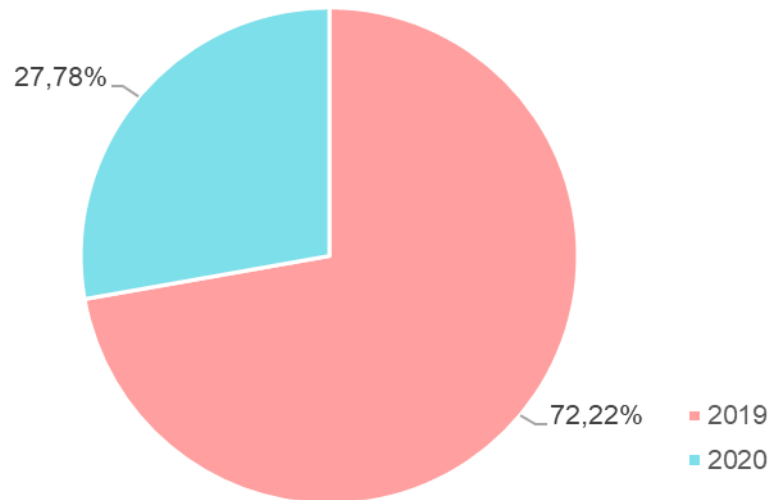
Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Dumai

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Dumai belum mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih terdapat 2 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 15.86%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah perizinan turun sebesar 15.86% dibandingkan tahun 2019. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 99.24%, dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan kedua indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 5% bagi jumlah perizinan dan meningkat sebesar 0.45% bagi jumlah investasi. Selain kedua indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang tidak mengalami perubahan, yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, indikator Penurunan Angka Kemiskinan, dan indikator Nilai IPM. Bagi indikator Penurunan Angka Kemiskinan, hal ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin. Sedangkan bagi dua indikator lainnya, telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah, yaitu naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka dan tetap bagi nilai IPM.

Dua indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan sebesar 21.74%, dan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan sebesar 6.25% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan kedua indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat hanya sebesar 8% bagi jumlah PAD dan justru turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

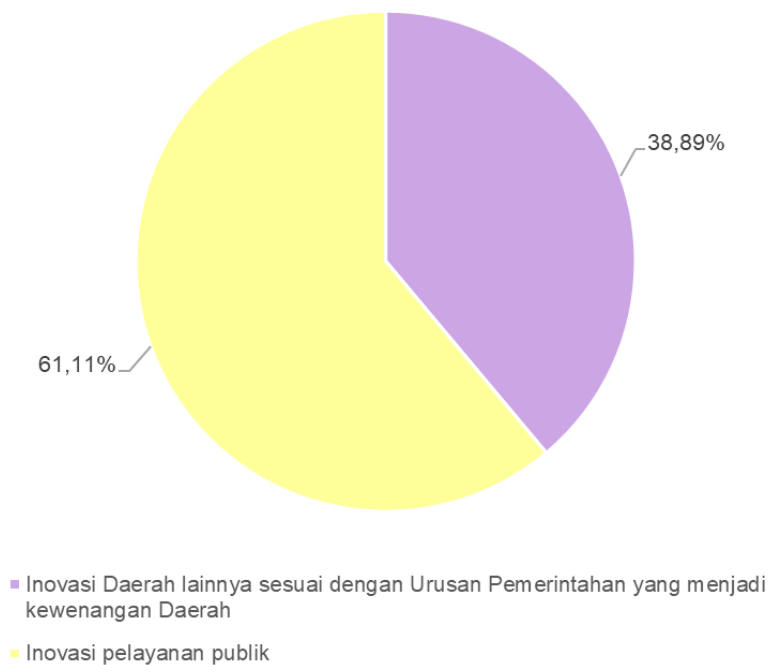
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Dumai

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Dumai telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 13 (72.22%) inovasi dari 18 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sejumlah 5 (27.78%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

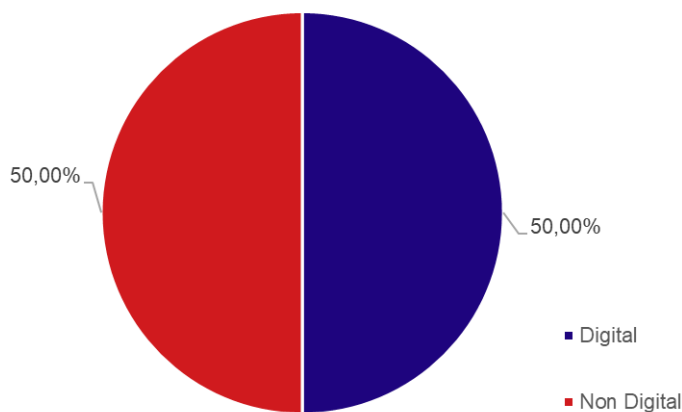
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Dumai

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Dumai merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 11 (61.11%) inovasi. Sedangkan 7 (38.89%) inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belum terdapat inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dilaporkan pada tahun 2021.

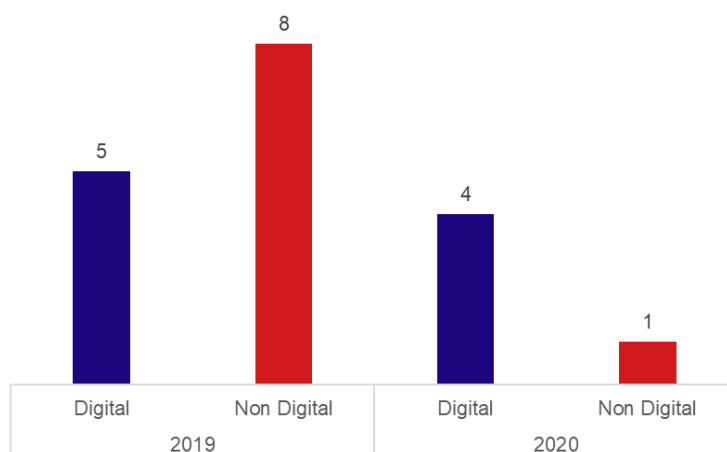
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Dumai

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (50%) dari 18 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Dumai merupakan inovasi non digital, dan 9 (50%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum terdapat inovasi teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

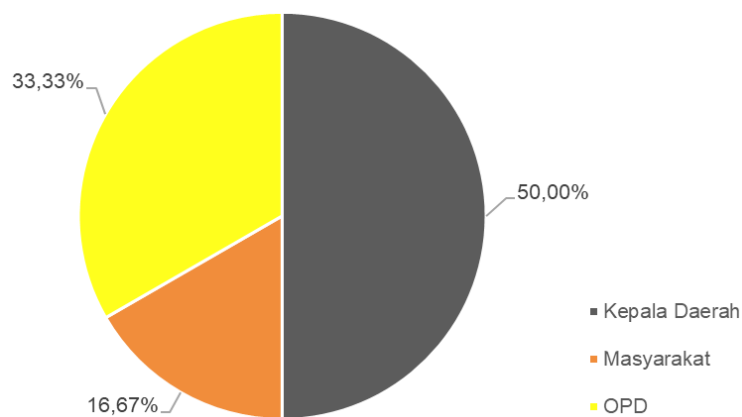


Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Dumai

Secara umum jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital yang diterapkan berkurang dari 5 inovasi pada tahun 2019

menjadi 4 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi digital mengalami penurunan dari 8 inovasi menjadi 1 inovasi.

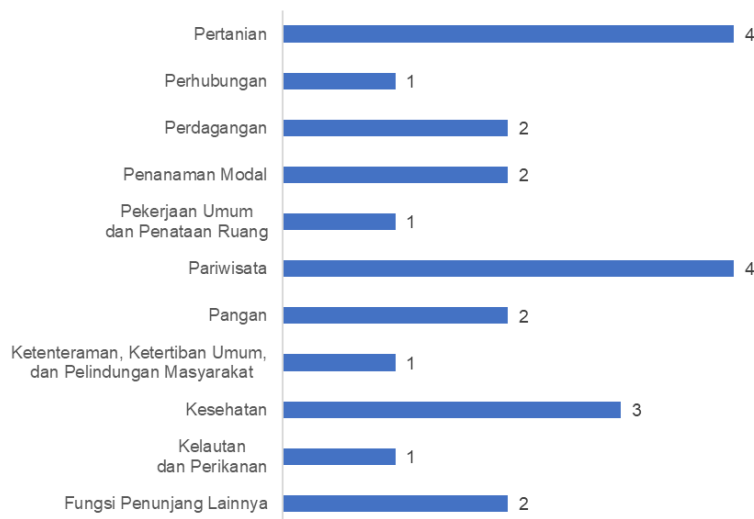
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Dumai

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Dumai pada tahun 2021 diinisiasi oleh kepala daerah, yaitu sejumlah 9 (50%) inovasi. Sedangkan sejumlah 6 (33.33%) inovasi diinisiasi oleh perangkat daerah, dan 3 (16.67%) inovasi lainnya diinisiasi oleh masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD dan ASN.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Dumai

Sebaran inovasi daerah pada Kota Dumai berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pertanian dan urusan pariwisata, yaitu masing-masing sebanyak 4 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 1 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 1 inovasi, dan urusan kesehatan dengan 3 inovasi.

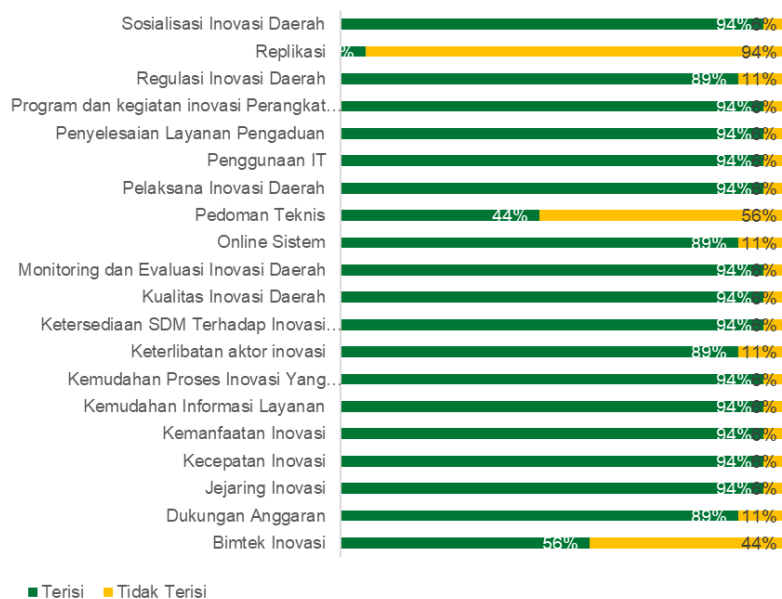
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Dumai

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 17 (94.44%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, dan hanya 1 (5.56%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Belum terdapat inovasi yang dilaporkan yang termasuk dalam kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

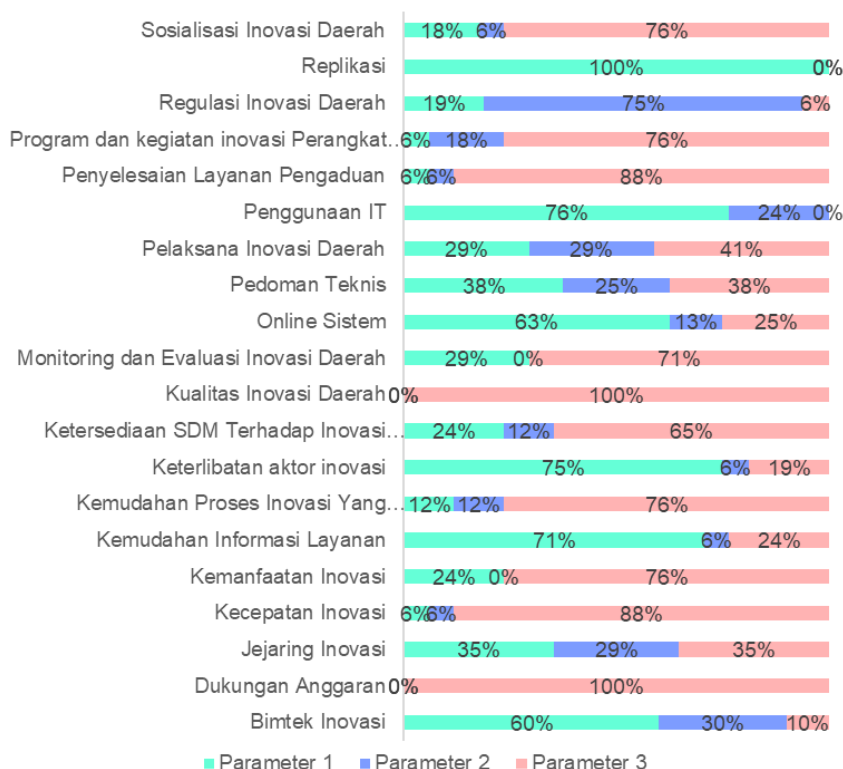


Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 84.44%, artinya dari 18 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kota Dumai, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 17 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, dan Jejaring Inovasi Daerah dengan tingkat keterisian masing-masing sebesar 94%, yang berarti bahwa sebanyak 17 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Dumai telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 6%, yang berarti bahwa 1 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai'

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Dukungan Anggaran yaitu masing-masing sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 75%, yang berarti bahwa sebanyak 75% inovasi yang telah terisi data

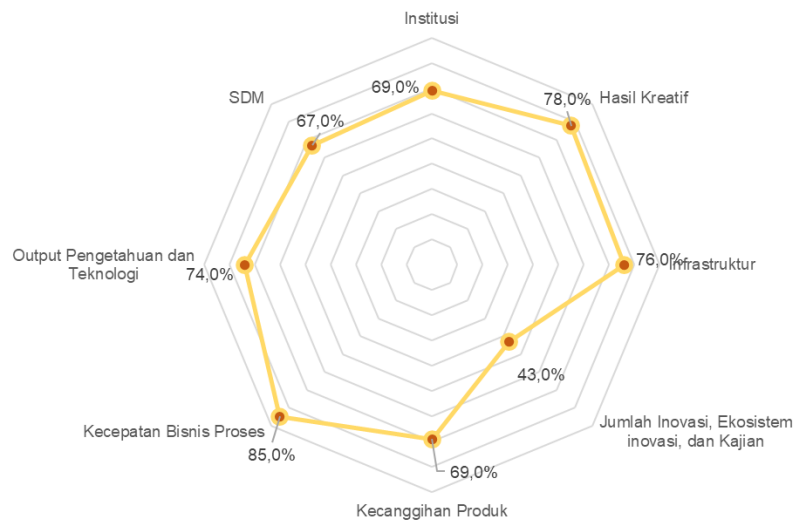
pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

j. Daftar Inovasi Kota Dumai beserta Skor Kematangannya

Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Dumai beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Dumai Kapasitas 450 LPD (Unsolicited)	80
Hidroponik, Pertanian Lahan Pekarangan Tanpa Tanah sebagai upaya penanganan stunting	35
SAHABAT AMBULANCE	29
Sistim Informasi Daerah Binaan (SIDARBIN) Kota Dumai	27
Pemantauan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19	24
Pupuk Organik Cair (POC)	22
Alat Sedot Air Tanpa Mesin	21
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern/Mal	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Restoran	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	15
Budidaya Ikan Sistem Bioflok	15
Sistem Manajemen Pertanahan Terpadu (SI MANTAP)	12
Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan (SI PEKA)	10
Pestisida Nabati Sabut Kelapa	0

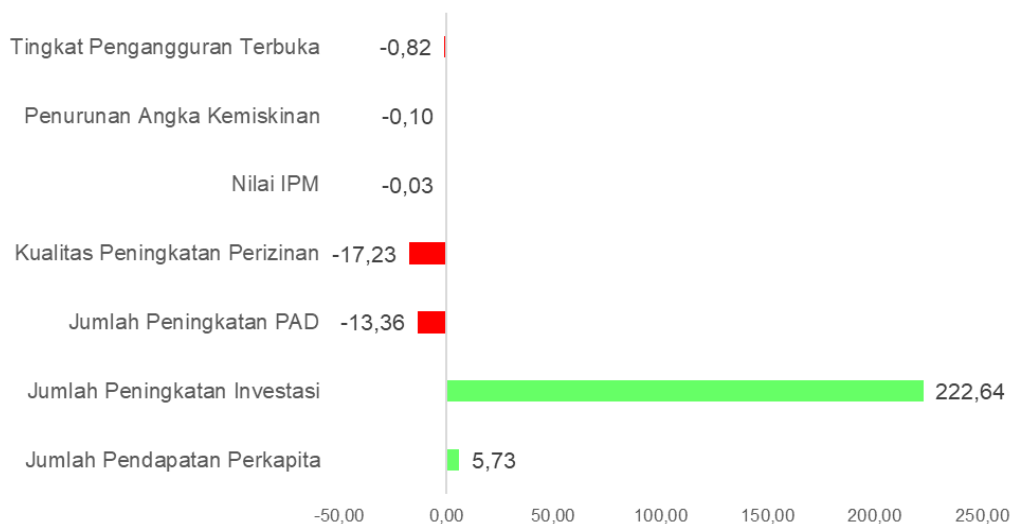
L. KOTA PEKANBARU



Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Pekanbaru

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Pekanbaru memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu sebesar 85%. Artinya secara umum indikator-indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 43%, yang berarti bahwa secara umum capaian skor indikator-indikator pada variable-variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pekanbaru

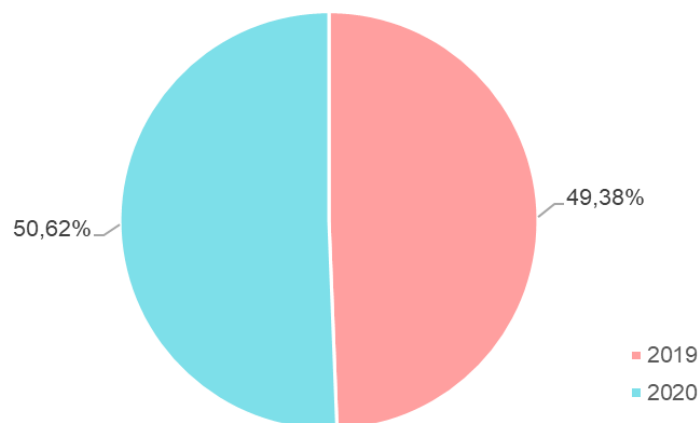
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pekanbaru belum

mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 5 dari 7 indikator yang mengalami perubahan negatif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.82%, yang berarti bahwa pada tahun 2020, jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.82% dibandingkan tahun 2019. Namun perubahan ini masih sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik hingga 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.10%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.10% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator Nilai IPM mengalami penurunan sebesar 0.03%. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 17.23%, yang berarti bahwa jumlah perizinan turun sebesar 17.23% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 13.36%. Perubahan keempat indikator ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin, tetap bagi nilai IPM, meningkat 5% bagi jumlah perizinan, dan meningkat 8% bagi jumlah PAD.

Dua indikator lainnya mengalami perubahan positif. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 222.64%, dan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan sebesar 5.73% dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan kedua indikator ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat hanya sebesar 0.45% bagi jumlah investasi dan justru turun sebesar 1.85% bagi jumlah pendapatan perkapita.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

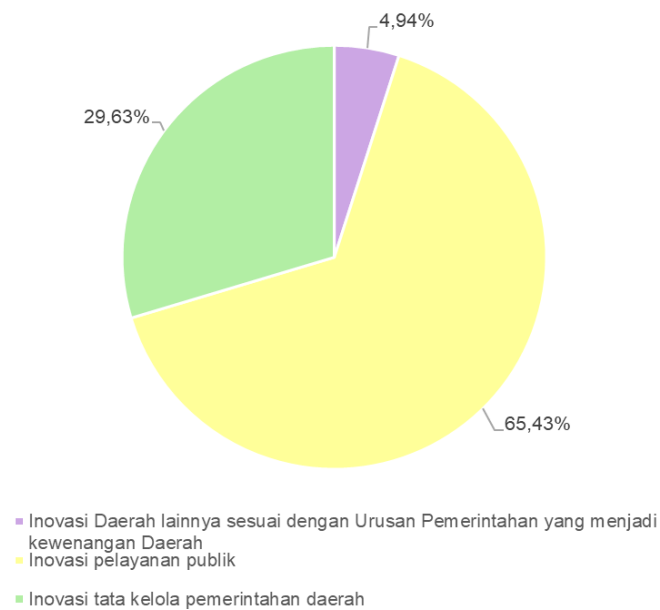
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Pekanbaru

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Dumai telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 41 (50.62%) inovasi dari 81 inovasi yang dilaporkan telah diterapkan sejak tahun 2020 dan sejumlah 40 (49.38%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

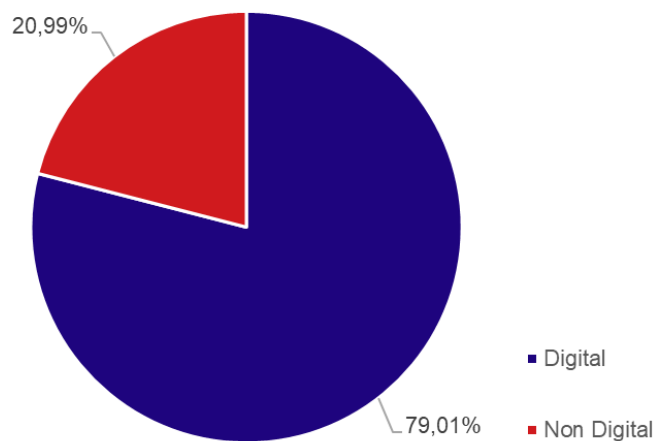
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Pekanbaru

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Pekanbaru merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 53 (65.43%) inovasi. Sedangkan 24 (29.63%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, dan 4 (4.94%) inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

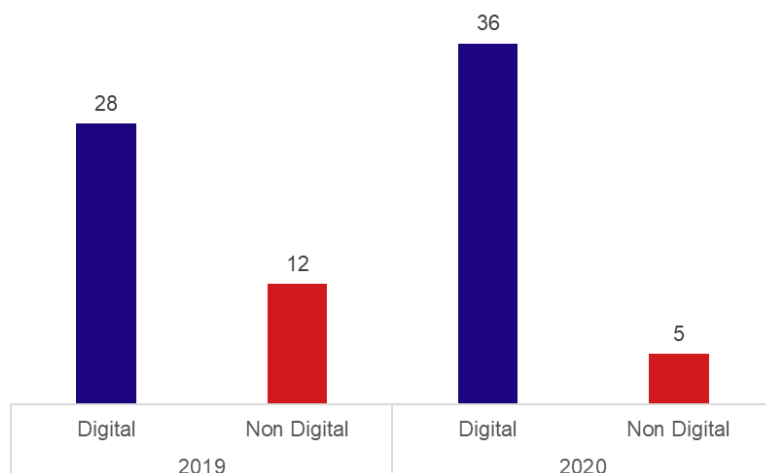


Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Pekanbaru

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 17 (20.99%) dari 81 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Pekanbaru merupakan inovasi non

digital, dan 64 (79.01%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital. Belum terdapat inovasi teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

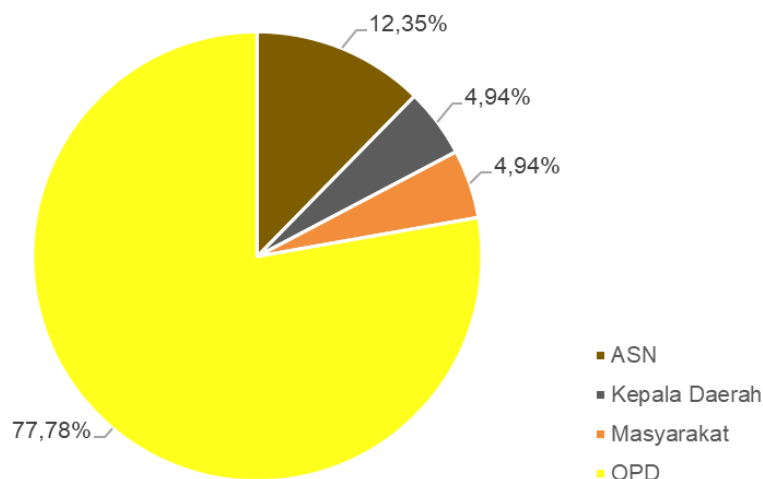
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Pekanbaru

Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada inovasi digital, namun mengalami penurunan pada inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital yang diterapkan berkurang dari 12 inovasi pada tahun 2019 menjadi 5 inovasi pada tahun 2020. Sedangkan inovasi digital mengalami kenaikan dari 28 inovasi menjadi 36 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

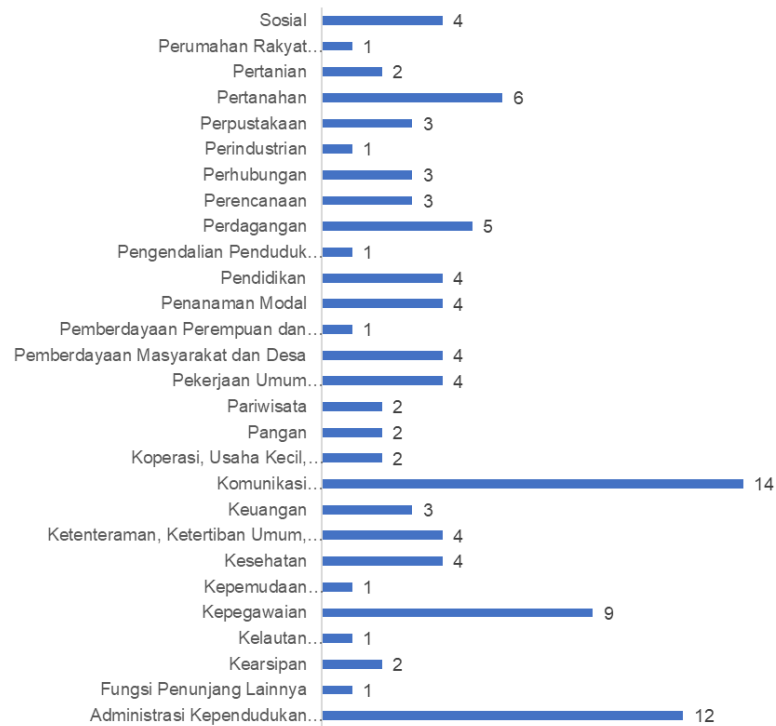


Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Pekanbaru

Sebagian besar inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Pekanbaru pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 63 (77.78%) inovasi. Sedangkan sejumlah 10 (12.35%) inovasi diinisiasi oleh ASN, 4 (4.94%) inovasi diinisiasi oleh kepala daerah, dan

4 (4.94%) inovasi lainnya diinisiasi oleh masyarakat. Belum terdapat inovasi dilaporkan tahun 2021 yang diinisiasi oleh DPRD.

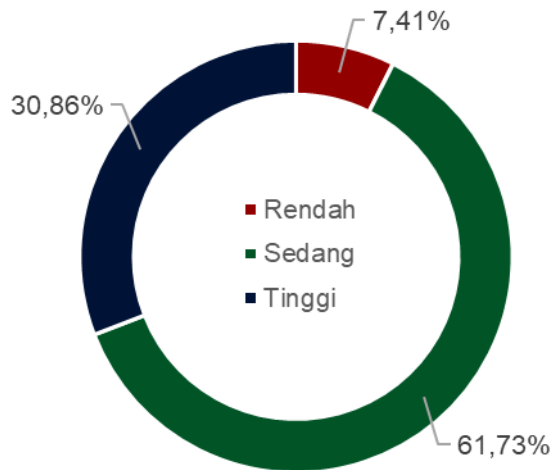
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Pekanbaru

Sebaran inovasi daerah pada Kota Pekanbaru berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan komunikasi dan informatika, yaitu sebanyak 14 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 4 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 1 inovasi, urusan pendidikan dengan 4 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 4 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 4 inovasi, dan urusan kesehatan dengan 4 inovasi.

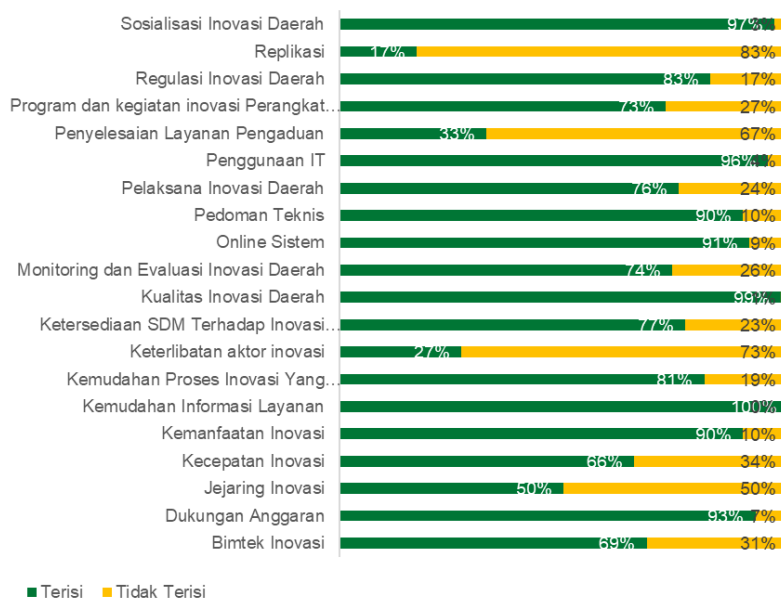
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Pekanbaru

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, terdapat 6 (7.41%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah, 50 (61.73%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang, dan 25 (30.86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

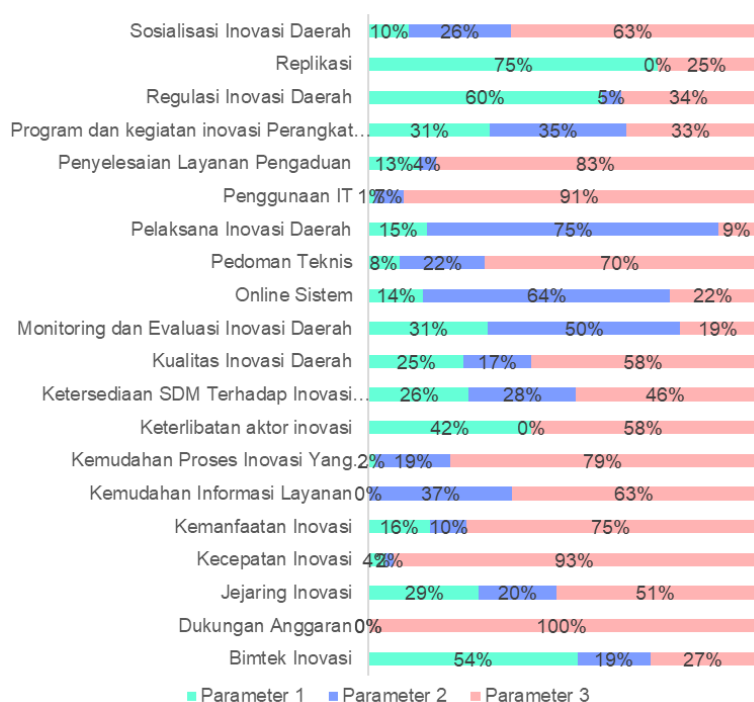


Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan tingkat keterisian data pendukung setiap indikator satuan inovasi daerah, rata-rata tingkat keterisian data pendukung setiap inovasi adalah sebesar 74.07%, artinya dari 81 inovasi yang telah dilaporkan oleh Kota Pekanbaru, rata-rata setiap inovasi terisi data pendukung sejumlah 15 indikator dari 20 indikator satuan inovasi daerah.

Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah indikator Kemudahan Informasi Layanan dengan tingkat keterisian sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pekanbaru telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator dengan tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator Replikasi, yaitu sebesar 17%, yang berarti bahwa 14 inovasi yang dilaporkan menyertakan data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 75%, yang berarti bahwa sebanyak 75% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 75%, yang berarti bahwa sebanyak 75% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter satu.

j. Daftar Inovasi Kota Pekanbaru beserta Skor Kematangannya

Tabel 13 Daftar Inovasi Kota Pekanbaru beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
TappingBox	132
KADO CAMER (Kerjasama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan)	128
KOTAK (Klasifikasi Ordo Tanah Kosong)	128
LAGU (Layanan Tunggu)	126
SIPADU (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu) Bukitraya	123
SIPENDUDUK (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan)	122
LAYANAN PINDAH DATANG	122
SMART PETAKU (SISTEM MANAJEMEN ASET PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)	122
KIASAN (Kerjasama Penerbitan Kartu Identitas Anak)	121
SEMANGAT (SISTEM ELEKTRONIK MANAJEMEN PENGADAAN TANAH)	120
Smart Rescue Madani	117
Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru (E-Planning)	117
KENALI AKSI DUKCAPIL (Kerjasama Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk Dukcapil)	115
MAS RAPID (Perekaman Khusus Narapidana)	111
JASA DUKCAPIL (Kerjasama Pendistribusian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	110
MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)	108
E-TibUm Pekanbaru	107
TTD Elektronik BKPSDM	107
SITAWA (Sistem Informasi Data Pegawai) BKPSDM	107
PEDULI (Pelayanan Disabilitas untuk Lengkapi Identitas)	106
SPPD Online (Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas) BKPSDM	105
SIMUSI BKPSDM	102
SINERGI BKPSDM	102
Si-SMART (Sistem Informasi Seleksi Mutasi Antar Instansi) BKPSDM	100
SISTEM INFORMASI PELANGGARAN DISIPLIN BKPSDM	100
e-Respon	99
PRESTASI (Percepatan Sertifikat Tanah melalui Survey Informasi)	99
e-PMBRW (Elektronik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga)	98
SMARTPBB	97
POSPBB (Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan)	97
Jendela Informasi Bukitraya	96

KEMON (Kegiatan Mendongeng Online)	96
BASAHILA (BANK SAMPAH INDAH LESTARI ASRI)	95
Sosialisasi Daftar Tagih Bapenda (SDT)	94
Bansos Kota Pekanbaru	94
KORELASI (Kongkow Sore Literasi)	94
SISTEM INFORMASI SITAMPAN TUAN MADANI	93
Musyawahar Rencana Pembangunan secara elektronik (e-MUSRENBANG)	93
Pangkalan Dokumen Strategis	92
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW)	91
Thermal Data Record dengan Aplikasi Pekanbaru Tourism pada sektor restoran	90
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN KAMPUNG KB (SISTEM RECORD ACTIVITY) BERBASIS WEBSITE	89
SIGAP RSD Madani	89
Memorabilia (Rekam Jejak Pekanbaru)	89
SMART SYSTEM/ SMART LIGHTING	87
SIPERDA (Sistem Informasi Pembangunan dan Pemberdayaan)	87
Radio Online BELACAN (Belajar dalam Canda)	87
Aplikasi Pekanbaru Tourism pada Sektor Tempat Wisata	86
E-ARSIP	86
elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-MONEV) Rencana Kerja Perangkat Daerah	84
SIKaPKU (Sistim Informasi Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru)	83
SMART SYSTEM/SMART LIGHTING	82
SIM Pendaftaran Pasien RSD Madani Kota Pekanbaru	81
E-SKP BKPSDM	81
SIMADANI (Sistem Informasi Aset Terkini)	80
SIPAGU (Sistem Informasi Pelayanan Guru)	79
SIPADU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu)	79
Srv-151	79
SIPADA (Sistem Informasi Pajak Daerah)	78
E-BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Elektronik)	77
SISTIK Madani (Sistem Informasi Data Logistik RSD Madani)	77
Pekan Pangan Madani (PPM)	76
SIGAPEN (Sistem Informasi Pemutusan Gaji Pensiun)	76
UBANMASBRO (USULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS ONLINE)	76
Outlet Pangan Puan Berseri (Pemasaran Usahan Pangan Bersama Secara Lestari)	75
Broadcast	72

PADADIK (Pangkalan Data Kependidikan)	71
LOMAK (LAYANAN OKE MASYARAKAT KELILING)	71
RUMPI (Rumbai Pesisir Berbagi)	69
Aplikasi E-Lapor Dinas PUPR Kota Pekanbaru	65
LABRAK (LACAK BARANG KECAMATAN)	65
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) Versi 2.0	64
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK)	61
TARGET (Tenayan Raya Geotagging)	58
Aplikasi Perizinan Online	58
Penerapan dan Inovasi New Normal pada PTSP Kota Pekanbaru Digital, Efektif dan Aman Covid-19	38
Sekolah Sepak Bola (SSB)	35
HALO DINKES PEKANBARU	17
Belanja Online Pasar Tradisional	15
penerapan Protokol kesehatan di mall	15
pameran	0



BAB III

PEMBAHASAN REKOMENDASI

Pada Provinsi Riau terdapat 12 Kabupaten /Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 48,3 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Bengkalis melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 62,42 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan replikasi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang, diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, Bantuan HKI. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Indragiri Hilir melalui Replikasi inovasi, melakukan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, rapat teknis inovasi provinsi, eksebis dan konfrensi seminar dan penghargaan inovasi.

C. Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 41,38 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Indragiri Hulu melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

D. Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 42,66 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kampar melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Sukabumi Meranti memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 35,47 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

F. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 32,01 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kuantan Singingi melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 47,33 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Pelalawan melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

H. Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 17,75 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Rokan Hilir melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

I. Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 47,64 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Rokan Hulu melalui bentuk pembinaan antara lain: pengintegrasian sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

J. Kabupaten Siak

Kabupaten Siak memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 20,98 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Siak melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

K. Kota Dumai

Kota Dumai memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 20,48 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Dumai melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan pemetaan inovasi daerah.

L. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 60,14 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan replikasi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang, diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, bantuan HKI. Namun Provinsi Riau juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Pekanbaru melalui bentuk pembinaan antara lain: replikasi inovasi, melakukan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, rapat teknis inovasi Provinsi, eksepsi dan konferensi/seminar, dan Penghargaan inovasi.